



LAPORAN PENELITIAN

Bidang/Tema/Topik:
Keilmuan

**ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN
ANTARKABUPATEN/KOTA STUDI EMPIRIS
KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA TAHUN 2000-2004**

Oleh:

1. Ake Wihadanto, SE., MT.
2. Adrian Sutawijaya, SE., M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA
DESEMBER 2007**

HALAMAN PENGESAHAN USUL PENELITIAN KEILMUAN

1.	Judul Penelitian	:	Analisis Tingkat Pertumbuhan dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2000-2004
2.	a. Mata Kuliah	:	Ekonomi Pembangunan I & II
	b. Bidang Kajian	:	Keilmuan
3.	Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Ake Wihadanto, SE., MT.
	b. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	c. Pangkat, Golongan, NIP	:	Penata Muda / III/a, 132312465
	d. Program Studi/Jurusan	:	Ekonomi dan Studi Pembangunan/IESP
	e. Fakultas	:	Ekonomi
	f. Alamat Rumah	:	Perumahan Vila Inti Persada, Blok D1 No. 19, Jl. Raya Ciputat – Sawangan, Desa Pamulangan Timur – Kecamatan Pamulang 15417
	g. Nomor Telepon/HP	:	021-70631301/08111776680
	h. Email	:	ake@mail.ut.ac.id
3.	Nama anggota Peneliti (1 Orang)	:	1. Adrian Sutawijaya, SE., M.Si.
4.	Lama Penelitian	:	24 (dua puluh empat) minggu
5.	Biaya yang Diperlukan	:	Rp. 10,000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
6.	Sumber Pembiayaan	:	LPPM

Pondok Cabe, 18 Desember 2007

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Yun Iswanto, M.Si
NIP.131675901

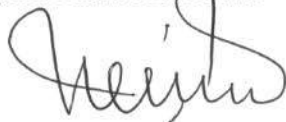


Ketua Peneliti



Ake Wihadanto, SE., MT
NIP. 132312465

Mengetahui,
Kepala Pusat Keilmuan



Dra. Endang Nugraheni, M.Ed, M.Si
NIP.131476464

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat



Drs. Agus Doko Purwanto, M.Si
NIP. 132002049

ABSTRAKSI

Ketimpangan pendapatan antardaerah dapat menjadi pemicu masalah disintegrasi bangsa di Indonesia, ketimpangan pembangunan antarwilayah yang terjadi tidak saja dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah tetapi dapat juga dengan membandingkan penguasaan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dan laju pertumbuhan PDRB antar pulau. Ketimpangan antarwilayah dapat terjadi di dalam propinsi tertentu antar kota/kabupaten dalam satu pulau.

Penelitian ini bertujuan (1) menghitung dan menganalisis pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Pulau Sumatera berdasarkan karakteristik pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita dengan Tipologi Klassen. (2) menghitung dan menganalisis tingkat ketimpangan regional dari distribusi pendapatan antarwilayah (Kota/Kabupaten) di Pulau Sumatera dengan menggunakan Indeks Theil yang meliputi komponen dalam grup Kabupaten/Kota dan komponen antar grup Kabupaten/Kota.

Teknik analisis untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan Tipologi Klassen dan untuk menganalisis tingkat pemerataan distribusi pendapatan antardaerah digunakan Indeks Entrophy Theil dan Indeks Ketimpangan Williamson. Data yang digunakan yaitu data sekunder dari Biro Pusat Statistik pada kurun waktu 2000-2004.

Berdasarkan analisis tipologi klassen di Pulau Sumatera kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh kecenderungan berada di Kota Propinsi dan sebagian di Kabupaten/Kota yang memiliki sumber daya yang dimanfaatkan secara maksimal seperti, pertambangan dan perdagangan. Pola sebaran pertumbuhan antarwilayah di Pulau Sumatera yang cenderung mengumpul pada kuadran II dan Kuadran III. Sementara itu daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi berada pada kuadran I dan cenderung menyebar terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan dan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Indeks ketimpangan PDRB perkapita antarpropinsi di Pulau Sumatera selama periode tahun 2000-2004 dengan menggunakan indeks Williamson menunjukkan kecenderungan yang menurun Sementara itu hasil perhitungan indeks Theil menunjukkan hasil sama yaitu kecenderungan penurunan ketimpangan Walaupun cenderung menurun angka indeks rata-rata ketimpangan Williamson tersebut masih relatif tinggi (kategori ketimpangan taraf tinggi yakni diatas 0,50). Kondisi tersebut menunjukkan PDRB per kapita di Propinsi di Pulau Sumatera relatif tidak merata. Berdasarkan hasil perhitungan indeks Wiliamson dan indeks entropi Theil ketimpangan antardaerah yang tertinggi terjadi di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Lampung.

Ketimpangan pendapatan antardaerah tidak akan dihilangkan sama sekali karena tiap daerah mempunyai karakteristik dan sumberdaya yang berbeda-beda namun begitu nilainya sebaiknya terus ditekan agar suatu daerah mempunyai ketimpangan pendapatan taraf rendah karena ketimpangan pendapatan merupakan sumber pemicu dari disintegrasi suatu daerah maupun bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT segala berkah dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian keilmuan yang berjudul “ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN STUDI EMPIRIS KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA”.

Penulis telah berusaha untuk menuangkan seluruh pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan penelitian ini namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap, laporan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya. Dengan selesainya penelitian ini, dari hati yang tulus dan ikhlas penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yun Iswanto, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka.
2. Bapak Zulfahmi, SE., sebagai Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka.
3. Bapak Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si sebagai Ketua LPPM IESP Universitas Terbuka.
4. Ibu. Dra. Endang Nugraheni, M.Ed, M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian Kelembagaan LPPM Universitas Terbuka.
5. Serta rekan-rekan Dosen di Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka yang telah banyak membantu dan memberikan masukan yang sangat berharga selama proses penelitian ini berlangsung.

Insya Allah, niat dan amal baik kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT, Amien.

Pondok Cabe, 18 Desember 2007

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	4
I.3 Tujuan dan Kegunaan	5
I.4 Kerangka Berpikir Studi	6
I.4.1 Wilayah Studi	6
I.4.2 Model dan Alat Analisis	7
I.4.3 Sistematika Laporan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
II.1 Teori Pertumbuhan Wilayah	9
II.1.1 Teori Pertumbuhan Klasik dan Neoklasik	10
II.1.2 Teori Export Base	10
II.1.3 Teori Pertumbuhan Wilayah Neoklasik	11
II.1.4 Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah	12
II.2 Beberapa Hasil Penelitian Tentang Pertumbuhan dan Ketimpangan Wilayah (Regional)	14

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Metode Klasifikasi Pertumbuhan Daerah: Tipologi Klassen	18
III.2 Model Ketimpangan Antarwilayah	23
3.1.1 Model Ketimpangan: Ideks Williamson	23
3.1.2 Model Ketimpangan: Indeks Entropi Theil.....	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Analisis Tipologi Klaassem Kabupaten/Kota Per Propinsi di Pulau Sumatea	27
IV.2 Pola Pertumbuhan Ekonomi Antarwilayah di Pulau Sumatera	42
IV.3 Analisis Ketimpangan (Disparitas) Antarwilayah Di Propinsi Sumatera	45

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

V.1 Simpulan	35
V.2 Saran	36

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****BIODATA**

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Klasifikasi Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Daerah Menurut Tipologi Klassen	23
Tabel 4.1	Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarwilayah Berdasarkan Indeks Ketimpangan Williamson Tahun 2000-2004.....	45
Tabel 4.3	Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarwilayah Berdasarkan Indeks Ketimpangan Entropi Theil Tahun 2000-2004.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 <i>Alur Berpikir Penelitian</i>	6
Gambar 1.2 <i>Peta Lokasi Penelitian: Pulau Sumatera</i>	7
Gambar 1.3 <i>Sistematika Laporan Penelitian</i>	8
Gambar 3.1 Siklus Perkembangan (Hipotesis Klaassen)	19
Gambar 3.2 <i>Kuadran dan Klasifikasi Kabupaten/Kota Menurut Tipologi Klassen</i>	20
Gambar 4.1 Analisis Tipologi Klassen Propinsi NAD	28
Gambar 4.2 Analisis Tipologi Klassen Propinsi Sumatera Utara	30
Gambar 4.3 Analisis Tipologi Klassen Propinsi Sumatera Barat	32
Gambar 4.4 Analisis Tipologi Klassen Propinsi Sumatera Selatan	33
Gambar 4.5 Analisis Tipologi Klassen Propinsi Riau	35
Gambar 4.6 Analisis Tipologi Klassen Propinsi Kep. Riau	36
Gambar 4.7 Analisis Tipologi Klassen Propinsi Kep. Bangka Belitung	37
Gambar 4.8 Analisis Tipologi Klassen Propinsi Bengkulu	39
Gambar 4.9 Analisis Tipologi Klassen Propinsi Jambi	40
Gambar 4.10 Analisis Tipologi Klassen Propinsi Lampung	41
Gambar 4.11 Pola Pertumbuhan Ekonomi Antarwilayah Di Propinsi Selatan	43
Gambar 4.12 Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 200-2004	46
Gambar 4.12 Indeks Entropi Theil Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 200-2004	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil Perhitungan Tipologi Klassen
- Lampiran 2. Hasil Perhitungan Indeks Williamson
- Lampiran 3. Hasil Perhitungan Indeks Entropi Theil Tahun 2000
- Lampiran 4. Hasil Perhitungan Indeks Entropi Theil Tahun 2004

Universitas Terbuka



I.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999; Blakely, 1989). Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun demikian, pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Sedangkan tujuan utama yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.

Namun dalam perjalanannya pembangunan ekonomi baik dalam konteks negara maupun daerah kerap kali terjadi tidak merata dan secara spasial menimbulkan ketimpangan antardaerah. Adanya ketimpangan antardaerah menunjukkan terjadinya perbedaan tingkat pembangunan tingkat kesejahteraan. Ketimpangan antardaerah sering kali menjadi permasalahan serius. Beberapa



daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat.

Ketimpangan antar daerah di Indonesia, selain warisan historis, juga karena kebijaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan kepada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar golongan masyarakat serta belum signifikan dalam memfokuskan pemerataan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan ini diperkuat pula oleh perbedaan karakteristik wilayah, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta kelengkapan infrastrukturnya. Hasil studi Kuncoro (2004) menyimpulkan adanya perbedaan dalam laju pertumbuhan antara daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti: prasarana perhubungan, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang trampil; disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Data BPS tahun 2004 mengenai penguasaan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) seluruh provinsi dan lajur pertumbuhan PDRB antarprovinsi menunjukkan bahwa Provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 61,0 persen dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatra menguasai sekitar 22,2 persen, provinsi di Kalimantan menguasai 9,3 persen, Sulawesi menguasai 4,2 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya 3,3 persen. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2004 sebesar 10,71 persen, provinsi di Sumatra sebesar 7,78 persen, provinsi di Kalimantan 5,72 persen, provinsi di Sulawesi sebesar 11,22 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebesar 4,34 persen. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antarwilayah.

Jika melihat pada keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan selama ini cenderung terkonsentrasi di pusat



(Pulau Jawa). Keseimbangan pembangun antardaerah ternyata tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan dari semangat pemerataan pembangunan. Pulau Jawa semakin menonjol perannya selaku pusat kegiatan ekonomi, pusat pengumpul dan distribusi komoditi. Daerah luar Jawa yang tadinya berhubungan langsung ke luar negeri, kemudian malah memerlukan Jawa untuk melakukannya. Penciptaan nilai tambah semakin terkumpul di Jawa. Lebih-lebih lagi kemudian konsentrasi investasi di sektor sekunder sejalan dengan kecenderungan pemusatan tersebut. Pulau Jawa semakin cepat tumbuh dan berkembang serta semakin terkukuhkan sebagai pusat dan penyambung ke dunia internasional.

Isu ketimpangan antardaerah kerap kali muncul di Indonesia berkenaan dengan persoalan ketidakadilan proses pembangunan yang terjadi. Prof. Sumitro juga pernah mengingatkan adanya ketimpangan pertumbuhan pendapatan antarwilayah yang perlu diwaspadai karena dapat mengancam keutuhan bangsa. (Widodo, 1996: 34). Ketimpangan pembangunan antarwilayah juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama masyarakat di perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan.

Di Indonesia ketimpangan pembangunan antarwilayah yang terjadi tidak saja dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah dengan membandingkan penguasaan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dan laju pertumbuhan PDRB antar pulau. Ketimpangan antarwilayah dapat terjadi di dalam propinsi tertentu antar kota/kabupaten dalam satu pulau. Hal ini disebabkan latar belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda. Studi ini berupaya untuk mengidentifikasi fenomena ketimpangan wilayah yang terjadi antar kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Studi ini akan memfokuskan analisis pada daerah. Digunakannya daerah, dan bukan



negara, sebagai unit analisis di banyak studi empiris disarikan dengan baik oleh Rodriguez-Pose (1998: 54-5).

I.2. Rumusan Masalah

Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Bahkan ketimpangan regional antar daerah dapat menjadi pemicu masalah disintegrasi bangsa. Penelitian ini menganalisis masalah tersebut tanpa bermaksud untuk menghentikan dan atau menurunkan tingkat pendapatan dan laju pertumbuhan daerah yang telah maju. Walaupun banyak yang melakukan studi mengenai ketimpangan ekonomi regional di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya. Diantaranya dari Ibrahim (1974), Esmara (1975), Uppal dan Handoko (1988), Azis (1989), Hill dan Williams (1989), Sediono dan Igusa (1992), Sondakh (1994), Aktia dan Lukman (1994), dan Safrizal (1997,2000) namun daerah penelitian dan kurun waktu yang dilakukan sangat berbeda.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka diduga terjadi perbedaan kinerja antarwilayah dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten (kota) sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten (kota) di Pulau Sumatera. Adanya perbedaan kinerja antar wilayah selanjutnya akan menyebabkan terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Adapun permasalahannya dalam penelitian ini yaitu :

1. Adanya perbedaan pertumbuhan antarwilayah di kabupaten/Kota di Pulau Sumatera berdasarkan karakteristik pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita.
2. Adanya ketimpangan regional antardaerah (Kota/Kabupaten) di Pulau Sumatera.
3. Bagaimana pola pertumbuhan dan ketimpangan regional antardaerah (Kota/Kabupaten) di Pulau Sumatera.



I.3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menghitung dan menganalisis pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Pulau Sumatera berdasarkan karakteristik pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita dengan menggunakan Tipologi Klaasen.
2. Menghitung dan menganalisis tingkat ketimpangan regional dari distribusi pendapatan antarwilayah (Kota/Kabupaten) di Pulau Sumatera dengan menggunakan Indeks Theil yang meliputi komponen dalam grup Kabupaten/Kota dan komponen antar grup Kabupaten/Kota.M
3. Mengetahui pola pertumbuhan dan pola ketimpangan regional antardaerah (Kota/Kabupaten) di Pulau Sumatera

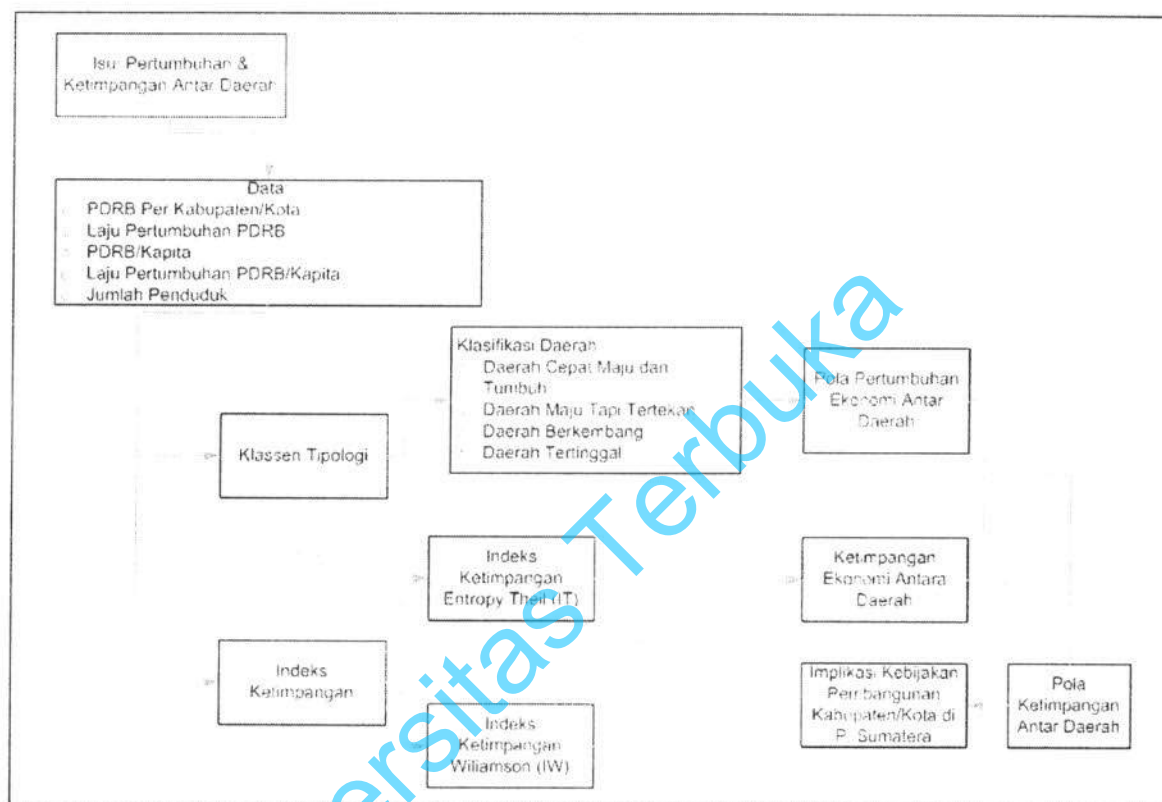
Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Informasi dan masukan bagi pengambilan keputusan (pemerintah daerah) dalam menyusun strategi dan program pembangunan secara lebih terstruktur, efisien, efektif serta mengetahui sepenuhnya implikasi eksternalitas dari setiap keputusan yang diambil pemerintah daerah untuk perencanaan pembangunan daerah dan menentukan kebijaksanaan arah pembangunan ekonomi daerah.
2. Sebagai referensi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, tingkat pemerataan distribusi pendapatan daerah, dan perkembangan struktur ekonomi wilayah. yang dapat dimasukan sebagai contoh kasus dan aplikasi model dalam modul BMP matakuliah Ekonomi Pembangunan I dan II
3. Contoh kasus dan aplikasi model khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ketimpangan distribusi pendapatan antardaerah (Kota/Kabupaten) di Pulau Sumatera yang dapat dimasukan dalam modul BMP matakuliah Ekonomi Pembangunan I dan II



I.4. Kerangka Berpikir Studi

Alur pemikiran (kerangka berpikir) dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

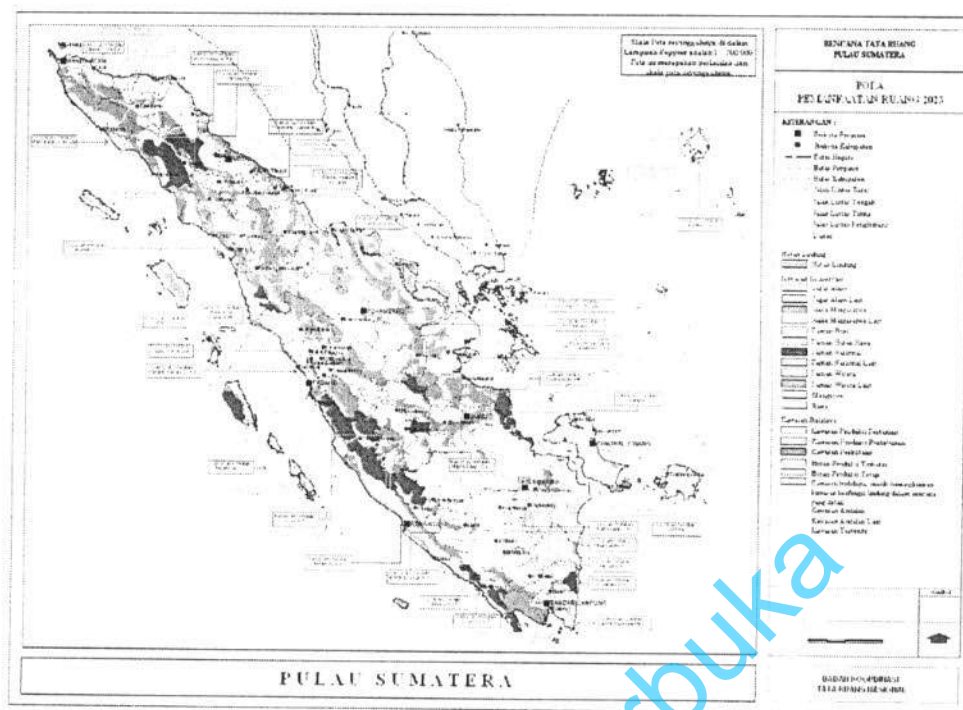


Gambar 1.1. Alur Berpikir Penelitian

I.4.1. Wilayah Studi

Lokasi dan populasi obyek penelitian ini di seluruh wilayah kabupaten/kota di Pulau Sumatera.





Gambar 1.2. Peta Lokasi Penelitian: Pulau Sumatera

I.4.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah; data sekunder yang dipublikasikan oleh berbagai instansi pemerintah. Data sekunder yang dipakai adalah data urutan waktu (*time series data*) untuk kurun waktu tahun 2000-2004. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Data yang digunakan meliputi, *Pendapatan Domestik Regional Bruto* (PDRB) per kapita, laju pertumbuhan PDRB per kapita, jumlah penduduk per kapita kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Data *Pendapatan Domestik Regional Bruto* (PRB) yang digunakan menggunakan berdasarkan harga konstan

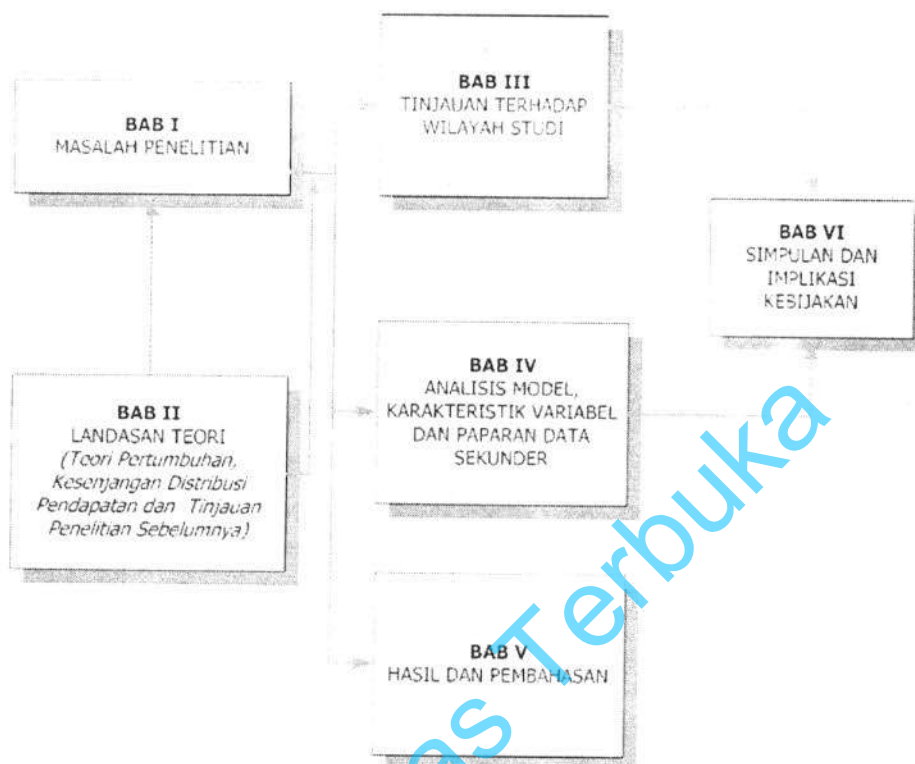
I.4.3. Model dan Alat Analisis

Teknik Analisis dalam penelitian ini menggunakan *Tipologi Klassen*, *Indeks Ketimpangan Wilamson*, dan *Indeks Ketimpangan Entropy Theil*.



I.5. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3. Sistematika Laporan Penelitian





II.1. Teori Pertumbuhan Wilayah

Pandangan para ekonom klasik (Adam Smith; David Ricardo; Robert Malthus; dan John Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), setidaknya terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) jumlah penduduk; (2) jumlah stok barang modal; (3) luas tanah dan kekayaan alam dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun demikian, pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama kepada pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja.

Berikut ini dipaparkan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah, perubahan struktur ekonomi, dan kesenjangan wilayah. Teori-teori tersebut yang dipilih atas dua kriteria. *Pertama*, teori-teori itu memberikan pengertian yang jelas tentang dinamika pembangunan wilayah. *Kedua*, teori-teori itu memberikan dasar yang lengkap dan kuat untuk analisis ekonomi wilayah.



II.1.1. Teori Pertumbuhan Klasik dan Neoklasik

Perkembangan teori pertumbuhan wilayah dimulai dari model dinamika wilayah yang sederhana sampai dengan model yang lebih komprehensif. Pembahasan ini meliputi *teori export base* atau *economic base*, teori pertumbuhan wilayah Neoklasik, model ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah.

II.1.2. Teori *Export Base*

Teori *export base* atau teori *economic base*, pertama kali dikembangkan oleh Douglas C. North pada tahun 1955. Menurut North, pertumbuhan wilayah jangka panjang tergantung pada kegiatan industri ekspornya (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 223). Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor. Dengan kata lain, permintaan komoditas ekspor akan membentuk keterkaitan ekonomi, baik ke belakang (kegiatan produksi) maupun ke depan (sektor pelayanan).

Suatu wilayah memiliki sektor ekspor karena sektor itu menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai sumberdaya yang unik untuk memproduksi barang dan jasa, mempunyai lokasi pemasaran yang unik, dan mempunyai beberapa tipe keuntungan transportasi. Dalam perkembangannya, perekonomian wilayah cenderung membentuk kegiatan pendukung yang dapat menguatkan posisi yang menguntungkan dalam sektor ekspor di wilayah itu. Penekanan teori ini ialah pentingnya keterbukaan wilayah yang dapat meningkatkan aliran modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan wilayah.

Teori *export base* mengandung daya tarik intuitif dan kesederhanaan, seperti halnya dianggap sebagai dasar teori, berdasarkan konsep beberapa sektor ekonomi lokal mengantarkan kekuatan ekonomi eksternal ke dalam wilayah untuk menstimulasikan perubahan secara cepat. Sasaran pertama dan utama teori *export*



base adalah teori *economic base* lebih tepat diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang kecil dengan ekonomi sederhana dan untuk penelitian jangka pendek tentang pengembangan ekonomi wilayah. Dalam kasus yang lebih besar, semakin kompleks perekonomian dan semakin panjang analisis pertumbuhan wilayahnya, variabel-variabel lain dapat berperan penting seperti ekspor. Kedua, teori *economic base* gagal menjelaskan bagaimana pengembangan wilayah dapat terjadi walaupun terjadi penurunan ekspor, sedangkan di lain pihak sektor nonekspor lainnya dapat tumbuh untuk mengimbangi penurunan itu.

Teori *economic base* atau *export base* menjadi dasar pemikiran bagi model analisis Location Quotient yang mengukur konsentrasi daripada sesuatu kegiatan atau industri di suatu daerah dengan jalan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan/industri yang sama dalam perekonomian nasional (Kadariah, 1982:70)

II.1.3. Teori Pertumbuhan Wilayah Neoklasik

Teori pertumbuhan wilayah Neoklasik dikembangkan oleh banyak ahli ekonomi wilayah, terutama Borts pada tahun 1960, Siebert pada tahun 1969, dan Richardson pada tahun 1973 (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 224). Meskipun asumsi-asumsinya dikembangkan dari gagasan-gagasan ilmu ekonomi Neoklasik, pemahaman terhadap ruang dinyatakan dalam biaya-biaya yang dihubungkan dengan realokasi faktor-faktor produksi, pergerakan barang-barang dan penyampaian informasi.

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sepertinya teori ini memberikan penjelasan dasar mengenai kesenjangan pendapatan (*output*) diantara wilayah-wilayah baik yang memiliki tenaga kerja, modal, dan teknologi ataupun tidak.

Hal yang penting dari teori ini adalah penekanannya pada perpindahan faktor-faktor (khususnya modal dan tenaga kerja) antarwilayah. Tenaga kerja dan



modal di dalam suatu negara lebih mudah berpindah dibandingkan antarnegara, dan hal ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini berarti teori Neoklasik juga mengasumsikan adanya fleksibilitas faktor harga yang sempurna sehingga perpindahan tenaga kerja dan modal antarwilayah secara otomatis akan menghilangkan perbedaan-perbedaan faktor harga di antara wilayah-wilayah. Pada akhirnya, hal ini akan menyeragamkan pendapatan per kapita wilayah. (Konsep pengumpulan wilayah yang dikembangkan dengan teori ini menjadi masukan studi empirik Williamson yang diturunkan dari Kuznets dan menghasilkan model pembangunan teori ekonomi wilayah) (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 225).

Asumsi dasar teori ini, yaitu informasi yang baik mengenai faktor harga dan fleksibilitas faktor harga yang sempurna, sangat meragukan, dengan hasil proses penyesuaian otonomi dalam model Neoklasik tidak bekerja secara penuh. Lebih jauh, teori ini tidak memberikan penekanan yang cukup terhadap pentingnya faktor permintaan, sehingga suatu wilayah dengan pertumbuhan permintaan yang tinggi terhadap barang-barang produksinya akan menjadi lokasi yang baik untuk investasi dan akan menarik lebih banyak modal dan tenaga kerja dari wilayah lainnya.

II.1.4. Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah

Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan dari teori Neoklasik. Tesis utama dari teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antarwilayah dalam suatu negara; bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 225-226).

Dalam kritiknya terhadap teori keseimbangan pertumbuhan, Myrdal berpendapat bahwa perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan (Tjahjati dan.



Kusbiantoro, 1997: 226). Beranjak dari pendapat ini, ia mengembangkan teori penyebab kumulatif dan berputarnya proses sosial untuk menjelaskan ketimpangan internasional dan antarwilayah.

Menurut Myrdal, terdapat dua kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi, efek balik negatif (*backwash effect*) dan efek penyebaran (*spread effect*) (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 226). Kedua kekuatan itu digunakan untuk menunjukkan konsekuensi spasial dari pertumbuhan ekonomi terpusat baik negatif maupun positif. Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran pasar hasil produksi bagi wilayah belum berkembang, penyebaran inovasi dan teknologi; sedangkan kekuatan efek balik negatif biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah tidak berkembang ke wilayah berkembang. Jadi, interaksi antarwilayah pada sistem pasar bebas cenderung memperburuk kinerja ekonomi wilayah yang belum berkembang. Kondisi ini memberikan pengesahan terhadap intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi efek balik negatif yang akan menimbulkan kesenjangan wilayah.

Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah lebih jauh dikembangkan oleh Kaldor pada tahun 1970 dan berdasarkan pandangan Kaldor teori ini diperjelas oleh Dixon dan Thirwall pada tahun 1975 (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 226).

Menurut Kaldor, pertumbuhan *output* wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapatkan keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.

Dixon dan Thirwall mengembangkan teori Kaldor dengan menekankan dampak proses penyebab kumulatif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan *output* wilayah menentukan tingkat perubahan teknologi dan pertumbuhan rasio modal dan tenaga kerja. Kedua faktor ini lebih lanjut akan



menentukan pertumbuhan dan tingkat produktivitas wilayah. Pertumbuhan ekspor suatu wilayah bergantung pada daya saing relatif terhadap wilayah lainnya; dengan kata lain, pertumbuhan wilayah bergantung pada produktivitas wilayah itu sendiri, dan hal ini berarti bahwa suatu peningkatan produktivitas akan mempengaruhi pertumbuhan dan tingkat ekspor suatu wilayah. Pada masalah ini, proses penyebab kumulatif pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara menyeluruh, karena pertumbuhan ekspor wilayah menentukan pertumbuhan *output* wilayah. Keterkaitan antara pertumbuhan *output* wilayah dan pertumbuhan produktivitas juga dikenal sebagai efek *Verdoorn* (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 227).

Teori pertumbuhan yang tidak seimbang menggambarkan bahwa pada saat suatu wilayah mencapai manfaat pertumbuhan, manfaat itu akan terus dipertahankan melalui efek *Verdoorn*. Semakin sering suatu wilayah memproduksi barang-barang dengan elastisitas permintaan yang tinggi terhadap pasar-pasar ekspor, semakin cepat tingkat pertumbuhan produktivitas sehingga wilayah lain akan menemukan kesulitan untuk menahan persaingan terhadap wilayah itu.

II.2. Beberapa Hasil Penelitian Tentang Pertumbuhan dan Ketimpangan Regional

- Hendra Asmara pada tahun 1972, dia menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan menurut propinsi untuk menghitung angka indeks ketimpangan regional untuk Indonesia (Uppal dan Handoko, 1986:292). Hasilnya pada tahun 1972 dengan nilai 0,522 ternyata berada di atas rata-rata yang dialami oleh kebanyakan negara di dunia. Negara-negara lain yang mendekati keadaan Indonesia adalah Brasil, Puerto Rico, Filipina, dan Columbia yang kesemuanya ternyata adalah negara-negara sedang berkembang (Uppal dan Handoko, 1986:293). Penelitian tersebut menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga konstan untuk tahun 1975 – 1980 untuk Indonesia yang hasilnya berkisar antara 0,40 – 0,50 yang paling rendah pada tahun 1978 yaitu 0,4344 dan paling tinggi pada tahun 1979 yaitu 0,5240.



- Sjafrizal (1997), dia menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang membedakan migas dan tanpa migas untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat (WIBB) pada 1987-1995. Metode analisis menggunakan Klassen Typologi untuk melihat kondisi pertumbuhan Wilayah Indonesia Bagian Barat yang hasilnya sebagai berikut:
 - Daerah maju dan tumbuh cepat, antara lain Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Barat.
 - Daerah berkembang cepat, antara lain Lampung.
 - Daerah maju tapi tertekan, antara lain Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.
 - Daerah relatif tertinggal, antara lain Jambi dan Bengkulu.

Kemudian menggunakan analisis Indeks Ketimpangan Regional dari Jeffrey G. Williamson untuk melihat tingkat pemerataan distribusi pendapatan, yang hasilnya bahwa angka Indeks Williamson untuk WIBB (antara 0,179 – 0,392) ternyata lebih rendah daripada angka untuk Indonesia secara keseluruhan (rata-rata = 0,462). Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa pemerataan pembangunan antardaerah di WIBB secara relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata seluruh Indonesia.

- Kuznets (1954) tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam meneliti kesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara cross-sectional dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah
- Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada kesenjangan antarwilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan rata-rata antarwilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah.
- Myrdal (1957) melakukan penelitian tentang sistem kapitalis yang menekankan kepada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi pusat-pusat perkembangan kesejahteraan. Di sisi lain, wilayah-wilayah dengan harapan



tingkat keuntungan yang rendah tidak akan berkembang sehingga terjadi kesenjangan.

- Salvadore Barrios dan Eric Strobl (2006) menuliskan laporan penelitian mengenai hubungan antara kesenjangan antarwilayah dengan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data Produk Domestik Bruto di negara-negara Uni Eropa yang diolah dengan metoda ekonometrik untuk menjelaskan pola hubungan antara PDB dengan kesenjangan antarwilayah yang berbentuk kurva huruf U terbalik. Hasil penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa untuk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa memiliki pola kesenjangan wilayah yang berbentuk kurva huruf “U” terbalik. Temuan ini sejalan dengan temuan Kuznets.
- Penelitian kesenjangan antardaerah di India yang relatif baru dilakukan oleh B. Bhattacharya dan A Sakthivel (2004). Penelitian ini menganalisis kesenjangan wilayah yang terjadi di India. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Bruto, Produk Domestik Regional Bruto, dan pendapatan perkapita sebagai dasar analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan kinerja pertumbuhan wilayah dan perubahan struktur wilayah-wilayah di India. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pembangunan industri di India berjalan secara cepat dan terpusat di wilayah-wilayah dengan infrastruktur memadai.





Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang dalam penulisannya dimaksudkan untuk menjabarkan/menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan kondisi wilayah. Analisis dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dengan alat analisis berupa formula-formula yang berhubungan dengan permasalahan yaitu: *Tipologi Klassen*, *Indeks Entropi Theil* dan *Indeks Williamson*.

Kajian ini memfokuskan unit analisisnya daerah/wilayah sebagai sub nasional. Ohmae berpendapat bahwa dalam dunia tanpa batas, region state akan menggantikan negara bangsa (nation states) sebagai pintu gerbang memasuki perekonomian global (Ohmae, 1995). Peranan wilayah sub-nasional, yaitu apakah provinsi, kabupaten dan kota dalam mempengaruhi lokasi aktifitas ekonomi, agaknya semakin penting dewasa ini. Berbagai studi dalam bidang sosial-ekonomi dan perubahan sosial menekankan semakin pentingnya daerah dan peran barunya sebagai pelaku ekonomi dalam konfigurasi baru pola pembangunan spasial (Rodriguez-Pose, 1998: chap.3).

Digunakannya daerah, dan bukan negara, sebagai unit analisis di banyak studi empiris disarikan dengan baik oleh (Rodriguez-Pose, 1998: 54-5). studi ini akan memfokuskan analisis pada daerah (Kabupaten/Kota) di Pulau Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan antar daerah (*regional income disparities*) yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan daerah dalam kelompok Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan

distribusi pendapatan antara Kabupaten dan Kota tersebut dihitung dari PDRB per kapita.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2002-2004 yang dihimpun dari sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS).

III.1. Model Klasifikasi Pertumbuhan Daerah: Tipologi Klassen

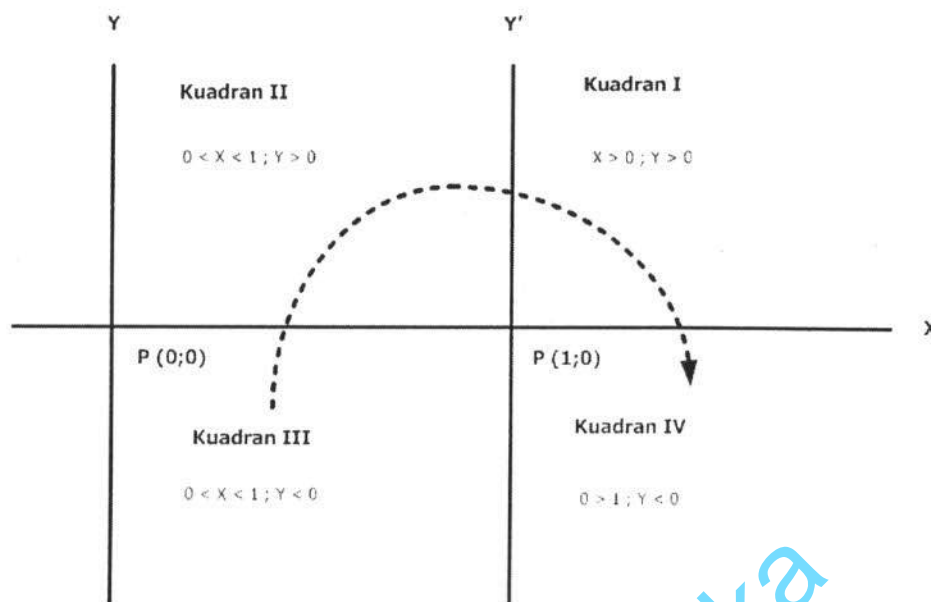
Klasifikasi daerah-daerah pernah dibuat Leo Klaassen (1981) dalam makalahnya berjudul "Regional Dynamics". Tipologi Klassen digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah, tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tipologi daerah terutama tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah (Kabupaten/Kota).

Model Tipologi Klassen adalah alat analisis klasifikasi daerah yang sangat sederhana dengan menggunakan sumbu-sumbu Kartesian (X, Y) dan peubah PDRB Perkapita. Model Tipologi Klassen menghasilkan absis (nilai-nilai pada sumbu X) dan ordinat (nilai-nilai sumbu Y) dari peubah-peubah sebagai berikut:

- X** : Adalah perbandingan antara PDRB Perkapita daerah i dan PDRB perkapita Total n atau secara agregat (nasional)
- Y** : Adalah selisih antara Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita daerah i dan laju pertumbuhan PDRB Perkapita Total n atau secara agregat (nasional)

Kedua peubah (variabel) tersebut atau (X;Y) dibentuk dalam sumbu X dan Y dengan titik pusat $P' (1;0)$ seperti yang dapat dilihat pada gambar(1) Dari hasil perhitungan X dan Y akan dapat diletakan pada 4 bidang kuadran yaitu:

1 Titik pusat $P' (1;0)$ dan bukan $P (0;0)$ karena nilai-nilai absis (X) dari hasil perbandingan PDRB Perkapita selalu lebih besar dari 0 (nol) atau $X > 0$



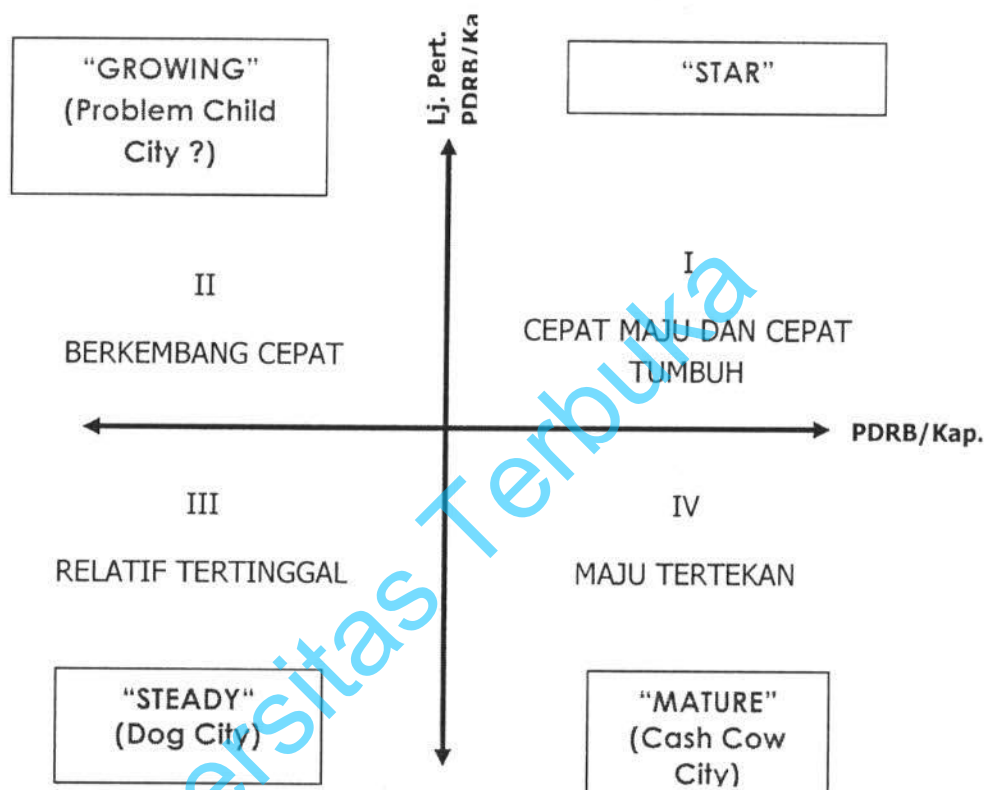
Gambar 3.1. Siklus Perkembangan (Hipotesis Klassen)

Berdasarkan 4 kuadran Tipologi juga memberikan makna adanya semacam siklus perkembangan yang disebut dengan Hipotesis Klassen, sebagai berikut:

Perkembangan daerah itu bermula dari daerah yang tidak berkembang (Kuadran III), kemudian mulai berkembang melalui peningkatan laju pertumbuhan (Kuadran II), terus melaju menjadi daerah yang berkembang pesat (Kuadran I) dan pada akhirnya terjadi perkembangan yang melemah (Kuadran IV). Bisa saja perkembangan ini menjadi suatu siklus di mana posisi daerah yang pertumbuhannya melemah di Kuadran IV kembali pada posisi Kuadran III. Begitu seterusnya.

Pada prinsipnya Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Perkembangan ekonomi Kabupaten/Kota diamati menggunakan besaran PDRB sebagai besaran yang mencerminkan kinerja ekonomi kota secara agregat. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati

dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*). (Syafriyal, 1997: 27-38; Kuncoro, 1993; Hil, 1989). (Lihat gambar 3.2)



Gambar 3.2. Kuadran dan Klasifikasi Kabupaten/Kota Menurut Tipologi Klassen

Dengan tipologi Klassen, kita dapat membagi kabupaten/kota di Indonesia menjadi 4 klasifikasi (lihat Gambar 3.2). Berdasarkan gambar 3.2 dapat diinterpretasikan Kategorisasi Kota-kota menurut kuadran Tipologi Klassen dengan kriteria sebagai berikut:

▪ **Kuadran I:**

Kabupaten/kota yang terletak di kuadran ini merupakan kota-kota yang laju pertumbuhan PDRB perkapitanya lebih tinggi daripada PDRB perkapita nasional. Artinya kota/kabupaten pada kuadran ini merupakan Kota/daerah *cepat-maju dan cepat tumbuh* (*rapid growth region*), karena daerah/kota ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Nasional. Selain itu kabupaten/kota ini mempunyai tingkat ekonomi (kesejahteraan) yang lebih tinggi daripada kota/kabupaten secara nasional. Kabupaten/kota yang termasuk ke dalam kuadran I ini kita sebut sebagai kota/kabupaten daerah *Cepat-Maju dan Cepat Tumbuh* atau "**Star**" (*Star City*). Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori 'Star' adalah kabupaten atau kota yang mandiri dan maju pesat dan akan sangat menarik bagi para investor swasta dan mempunyai potensi fiskal yang menjanjikan. Peluang kerja sama antara swasta dan pemerintah kota perlu dijalin baik untuk investasi publik.

▪ **Kuadran II**

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran ini merupakan kabupaten/kota yang laju pertumbuhan PDRB Perkapitanya lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDRB perkapita nasional. Tetapi kabupaten/kota di kuadran ini PDRB perkapitanya lebih rendah daripada rata-rata nasional. Artinya kabupaten/kota ini mempunyai produktivitas yang lebih tinggi secara nasional, namun tingkat ekonominya masih relatif rendah secara nasional. Kabupaten/kota ini memerlukan investasi publik dan promosi untuk lebih mempercepat produktivitasnya sehingga tingkat ekonominya lebih tinggi. Kategori kabupaten/Kota pada kuadran II kita sebut Kabupaten/Kota daerah "*Berkembang Cepat*" atau "**GrowingRegion**".



▪ Kuadran III

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran ini memiliki laju pertumbuhan PDRB perkapitanya lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota secara nasional dan tingkat ekonominya juga lebih rendah. Artinya kabupaten/kota ini selain tingkat produktivitasnya relatif rendah, juga tingkat kesejahteraan. Kabupaten/kota pada kuadran ini perlu mempercepat tingkat produktivitasnya dan tingkat ekonomi, agar dapat masuk ke kuadran II. Strateginya adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif & mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kabupaten /kota yang termasuk ke dalam kuadran ini disebut "*Relatif Tertinggal*" (*relatively backward region*) atau "*Steady*".

▪ Kuadran IV

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran ini memiliki laju pertumbuhan PDRB perkapitanya lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota secara nasional, tetapi mempunyai PDRB perkapita atau tingkat ekonomi yang lebih dari rata-rata kota-kota secara nasional. Tingkat ekonomi yang lebih tinggi ini karena sebelumnya kota ini mempunyai laju pertumbuhan PDRB perkapita yang lebih tinggi secara nasional. Artinya kabupaten/kota pada kuadran ini tingkat kesejahteraan tinggi tetapi tingkat produktivitasnya mulai menurun. Kabupaten/kota yang termasuk ke dalam kuadran ini disebut sebagai "*Daerah Maju tapi Tertekan*" (*retarded region*) atau "*Mature*".

Untuk mengukur pertumbuhan dan tingkat ekonomi Kabupaten/Kota digunakan data-data mengenai PDRB Perkapita yang diterbitkan BPS. Dengan segala kelemahan data PDRB Perkapita sebagai alat pengukur ekonomi, data tersebut tetap bermanfaat sepanjang output analisis dimaknakan secara agregat. Perhitungan dengan tipologi Klassen dapat dilihat dalam tabel di bawah ini



Tabel 3.1.
Klasifikasi Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Menurut Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan \ PDRB	$y_i > \bar{y}$	$y_i < \bar{y}$
$r_i > r$	Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
$r_i < r$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah Relatif Tertinggal

Sumber: Sjafrizal, 1997:30

dimana :

- r_i = laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan di daerah i Pulau Sumatera.
- y_i = PDRB per kapita atas dasar harga konstan di daerah i Pulau Sumatera
- r = laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan rata-rata Pulau Sumatera
- y = PDRB per kapita atas dasar harga konstan rata-rata Pulau Sumatera

III.2. Model Ketimpangan (Disparitas) Antarwilayah

III.2.1. Model Ketimpangan: Indeks Williamson

Analisis ketimpangan antardaerah dalam penelitian ini menggunakan model analisis Indeks Ketimpangan Regional Williamson. Nilai ketimpangan ini didapat dengan memakai Indeks Williamson (Sjafrizal, 1997:31) dengan formulasi sebagai berikut:

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}{\bar{y}}}$$

di mana;



- y_i : PDRB per kapita atas dasar harga konstan kabupaten/kota i
 di Pulau Sumatera
 \bar{y} : PDRB per kapita atas dasar harga konstan rata-rata seluruh
 kabupaten Pulau Sumatera
 f_i : Jumlah penduduk kabupaten/kota i di Pulau Sumatera
 n : Jumlah penduduk total Pulau Sumatera
 V_w : Nilai Indeks Ketimpangan Williamson

Nilai indeks ini antara 0 dan 1. Bila nilainya mendekati 1 berarti tingkat ketimpangan pendapatan antardaerah sangat tinggi dan bila mendekati 0 maka menunjukkan ketimpangan pendapatan antardaerah yang rendah.

III.2.2. Model Ketimpangan: *Indeks Entropi Theil*

Indeks entropi Theil (*Theil entropy index of inequality*) digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional. Konsep entropi Theil dari suatu distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur kesenjangan ekonomi dan tingkat konsentrasi. Indeks entropi Theil merupakan metode untuk menilai atau menggambarkan tingkat ketidakmerataan pembagian pendapatan penduduk suatu negara/daerah. Kedua metode tersebut pada dasarnya bertolak pada hal yang sama yaitu dapat dipecah-pecah (*decomposable*) menjadi komponen dalam grup dan komponen antar grup. Atas dasar perbandingan itulah dapat dibuat ukuran-ukuran pemerataan pembagian pendapatan. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan (Theil & Friedman, 1973), kesenjangan internasional (Theil, 1989), dan distribusi produk domestik bruto dunia (Theil & Chen, 1996).

Karakteristik yang paling signifikan dari indeks entropi adalah bahwa indeks ini dapat membedakan kesenjangan "antar daerah" (*between-region inequality*) dan kesenjangan "dalam satu daerah" (*within-region inequality*). Indeks Entropi Theil tersebut dibagi menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan



regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional (Ying, 2000). Indeks Theil dapat dipecah-pecah (decomposable). Sehingga dapat diketahui ukuran ketimpangan dalam kelompok Kabupaten/Kota dan kelompok antar Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Keunggulan utama indeks ini adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub-daerah dalam suatu negara. Tidak seperti indeks-indeks yang lain, indeks entropi memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan menyediakan secara rinci dalam sub-unit geografis yang lebih kecil. Yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan spasial, sebagai contoh kesenjangan antar daerah dalam suatu negara dan antar sub-unit daerah dalam suatu kawasan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa analisis dengan menggunakan indeks entropi telah terbukti amat berguna dalam analisis perubahan pola lokasi industri (Garrison & Paulson, 1973, Keeble, 1976: 26-9, Semple, 1973) dan suburbanisasi tenaga kerja di kawasan metropolitan (Carlino, 1998). Indeks Entropi Theil (*Theil Entropy Index of Inequality*) tersebut dapat dinyatakan dalam:

$$I(y) = \sum_{i=1}^N y_i \log \frac{y_i}{N} \quad (1)$$

di mana, $I(y)$ adalah indeks entropi keseluruhan atas kesenjangan spasial Indonesia, y_i adalah pangsa pendapatan perkapita kabupaten (kota) i dari propinsi i terhadap total pendapatan perkapita propinsi i , N adalah jumlah keseluruhan kabupaten yang ada di dalam suatu propinsi di Sumatera. Untuk mengukur kesenjangan spasial antar pulau di Indonesia, kita dapat memilah persamaan 1 ke dalam (Kuncoro, 2002: bab 4):



$$I(Y) = \sum_{r=1}^R Y_r \log \frac{Y_r}{N_r/N} + \sum_{r=1}^R Y_r \left[\sum_{i=1}^{N_r} \frac{1}{Y_r} \log \frac{v_i/Y_r}{N_r} \right] \quad (2)$$

di mana Y_r adalah pangsa seluruh kabupaten (kota) dalam pulau Sumatera; N_r adalah jumlah kabupaten (kota) dalam pulau Sumatera; dan R adalah jumlah keseluruhan propinsi di Sumatera. Bagian pertama dalam persamaan 2 mengukur derajat kesenjangan tenaga kerja menurut pangsa pulau di Indonesia, sedangkan bagian kedua mengukur derajat perbedaan dalam pangsa provinsi dalam masing-masing pulau, yang diberi bobot dengan pangsa keseluruhan pulau di Indonesia.

Nilai indeks entropi yang lebih rendah berarti menunjukkan adanya kesenjangan yang rendah, dan sebaliknya. Secara singkat Indeks Theil L dapat dilukiskan : $0 < T < 1$. Indeks Theil selalu lebih besar dari nol namun tidak pernah sama dengan (dan tidak pula lebih besar dari) satu. Dan besar kecilnya Indeks Theil tersebut itulah yang akan bisa menunjukkan pola distribusi pendapatan yang ada.





IV.1 Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Per Propinsi di Pulau Sumatera

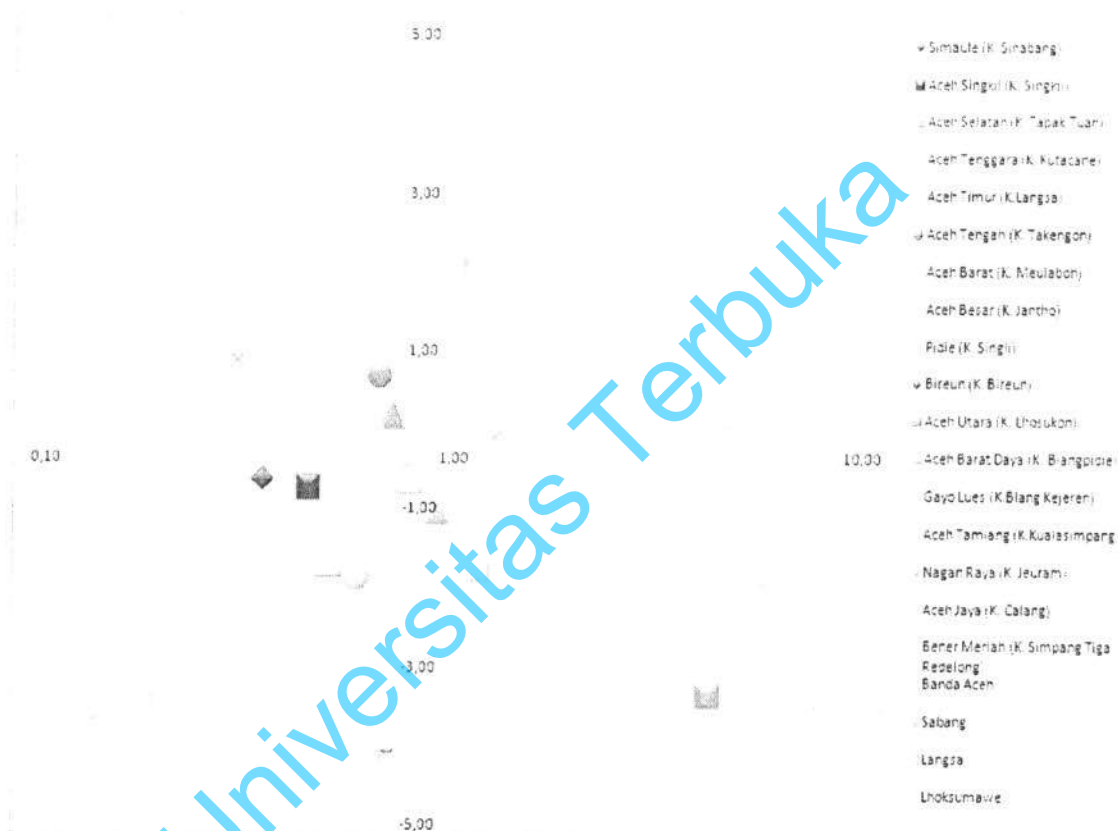
Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafriзал, 1997: 27-38; Kuncoro, 1993; Hil, 1989).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) *daerah cepat-maju dan cepa- tumbuh*, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Pulau Sumatera; (2) *daerah berkembang cepat* adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Pulau Sumatera. (3) *daerah maju tapi tertekan*, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Pulau Sumatera (4) *Daerah relatif tertinggal* adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding



rata-rata Pulau Sumatera. Disebut “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumatera; digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/ kota lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

IV.1.1. Analisis Tipologi Klassen Propinsi NAD



Gambar 4.1. Analisis Tipologi Klassen Propinsi NAD

Dengan Tipologi Klassen, dapat dibagi kabupaten/kota di Propinsi NAD menjadi 4 klasifikasi (lihat Gambar 4.1). Kabupaten Aceh Timur (Kabupaten Langsa) merupakan satu-satunya daerah yang termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh (kuadran I). Sedangkan 4 (empat) daerah lainnya yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat masing-masing berada pada kategori daerah berkembang cepat (kuadran II). Sementara itu terdapat 12 daerah yang berada

pada posisi daerah relatif tertinggal (kuadran III) yaitu Kabupaten Simaule, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kota Banda Aceh. Dan terdapat 4 (empat) daerah yang termasuk dalam kategori maju tertekan yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Kota Langsa dan Kota Lhoksumawe.

Sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh, Kabupaten Aceh Timur memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi sepanjang periode penelitian dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya DI Propinsi NAD keberadaan Kabupaten Aceh Timur pada klasifikasi tersebut, tidak terlepas dari sumber daya alam yang dimilikinya pada sektor pertambangan dan nilai investasi pada sektor industri yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi kotanya.

Sementara itu keberadaan 4 (empat) kabupaten daerah berkembang cepat merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi, namun pendapatan per kapitanya lebih rendah. Artinya sebagian besar kabupaten tersebut sedang menggeliat dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada rata-rata kabupaten/kota seluruh Pulau Sumatera. Tingginya pertumbuhan ekonomi 4 (empat) kabupaten yang berada pada klasifikasi ini, didorong oleh pertumbuhan subsektor pertambangan di luar migas.

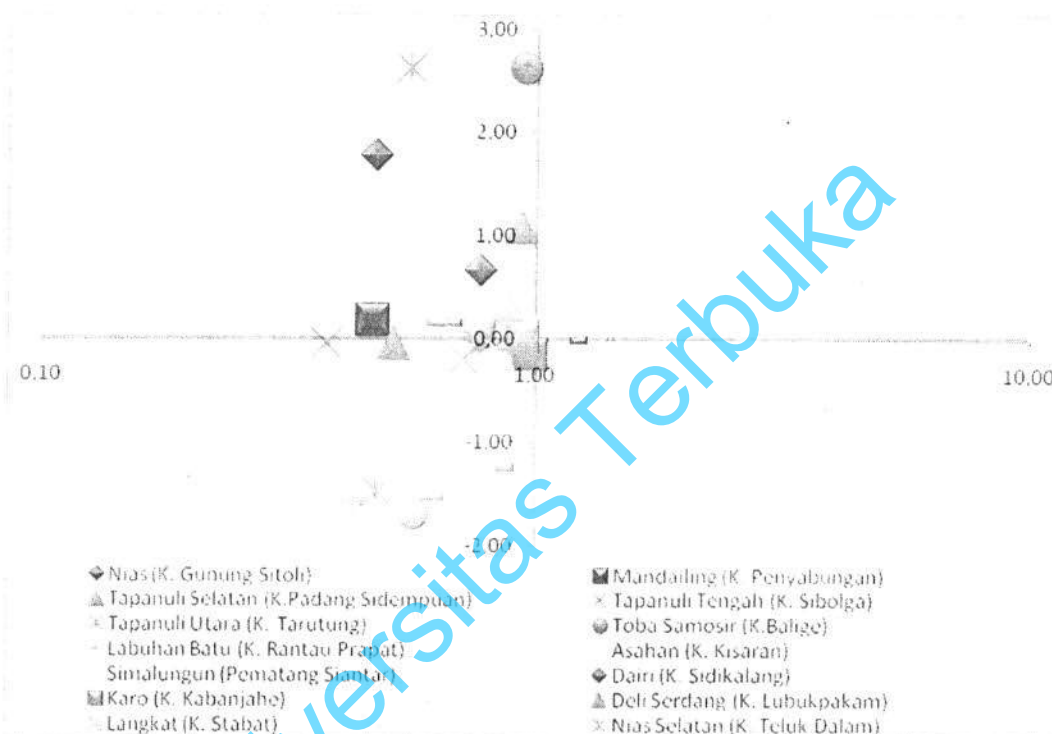
Terdapat 12 (dua belas) yang terdiri dari 11 kabupaten dan 1 kota yang termasuk ke dalam klasifikasi relatif tertinggal (kuadran III). Daerah tersebut sebagian besar merupakan daerah pertanian, perdagangan, bangunan dan jasa-jasa. Ini memberikan arti bahwa kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi relatif tertinggal mempunyai prospek tumbuh lebih baik lagi pada masa mendatang apabila proses investasi terus berlangsung dan iklim investasi tetap kondusif

Sedangkan 4 (empat) daerah yang termasuk dalam klasifikasi maju tertekan (kuadran IV), sebagian besar merupakan daerah perkotaan (Kota Sabang, Kota Langsa dan Kota Lhoksumawe) dan 1 (satu) kabupaten Aceh Utara. Dimana



sebagian besar kota-kota yang masuk dalam kuadran IV ini adalah kota yang mempunyai fungsi industri, pertambangan dan perdagangan. Kota-kota pada kuadran ini laju pertumbuhan ekonominya sedang menurun di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota seluruh Pulau Sumatera.

IV.1.2. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Sumatera Utara



Gambar 4.2. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Sumatera Utara

Analisis Tipologi Klassen untuk perekonomian Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan hanya Kota Medan yang termasuk dalam kriteria daerah cepat maju dan cepat tumbuh (Kuadran I). Beberapa hal yang menjadi keunggulan Kota Medan adalah ketersediaan sarana dan pra sarana penunjang, seperti transportasi, pendidikan, dan hiburan, yang lebih lengkap.

Sementara terdapat 8 kabupaten dan 5 kota di Propinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam kategori daerah berkembang cepat (kuadran II) yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Mandailing, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten



Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi dan Kota Binjai. Artinya sebagian besar kabupaten dan kota tersebut sedang menggeliat dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada rata-rata kabupaten/kota seluruh Pulau Sumatera. Tingginya pertumbuhan ekonomi ketigabelas kabupaten/kota yang berada pada klasifikasi ini, didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa-jasa. Sebagian besar kota di Propinsi Sumatera Utara berada pada kuadran ini.

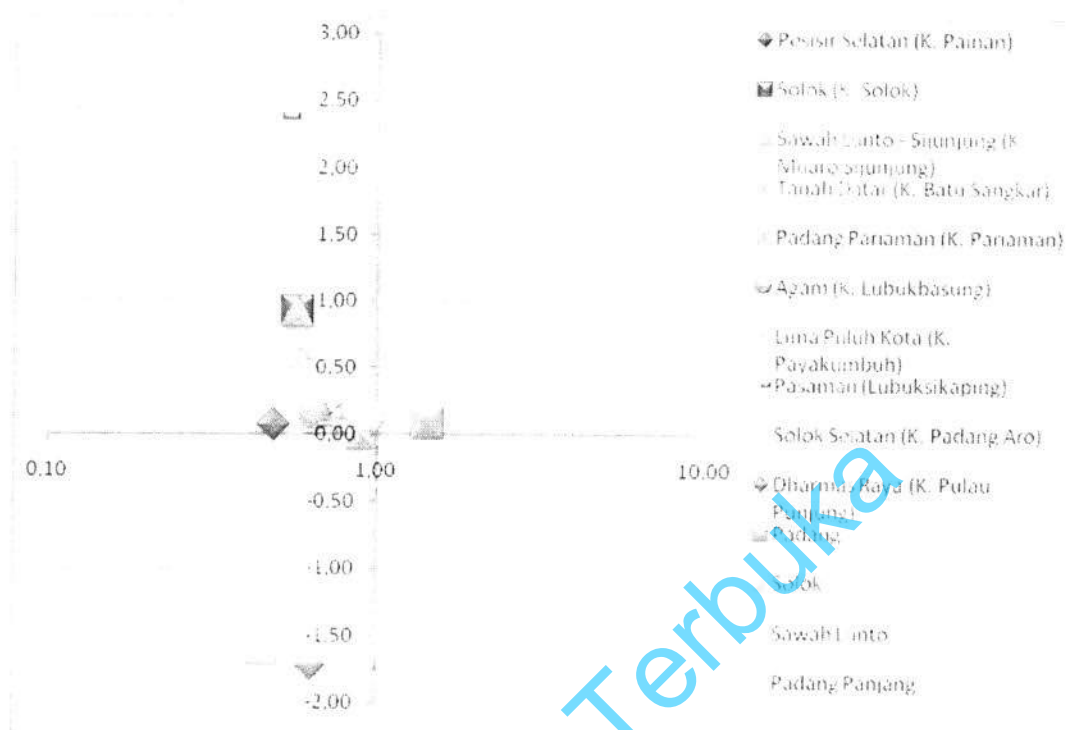
Di sisi lain, terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam kategori relatif tertinggal (kuadran III) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Begadai, dan Kota Padang Sidempuan. Daerah tersebut sebagian besar merupakan daerah pertanian, industri, perdagangan, dan jasa-jasa.

Sedangkan daerah yang masuk ke dalam kriteria maju tertekan (kuadran IV) hanya 1 (satu) yaitu Kabupaten Asahan. Daerah yang masuk dalam kuadran ini laju pertumbuhan ekonominya sedang menurun di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota seluruh Pulau Sumatera.

Berdasarkan Gambar 4.2 Kota Medan merupakan daerah yang secara umum menjadi daerah yang stabil dalam perkembangan pembangunan ekonominya dan daerah yang terbaik, karena dari tahun 2000-2004 mampu menjadi daerah yang maju dan tumbuh cepat. Kondisi ini dikarenakan rata-rata pendapatan per kapitanya jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota lainnya di propinsi Sumatera Utara dan laju pertumbuhan PDRB-nya juga melebihi dari laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota lainnya. Ada beberapa sektor yang selama ini mampu memberikan sumbangan (*share*) yang signifikan terhadap PDRB yaitu sektor perdagangan, transportasi dan industri.



IV.1.3. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Sumatera Barat



Gambar 4.3. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Gambar 4.3 hanya Kota Padang yang termasuk dalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh (Kuadran I), ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang cukup tinggi sebagai salah satu persyaratan penempatannya.

Sementara itu terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang berada pada kategori berkembang cepat (kuadran II) yaitu Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawah Lunto – Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi dan Kota Payakumbuh. Sebagian besar kota di Propinsi Sumatera Barat berada pada kuadran ini. Kabupaten/kota yang berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi, namun pendapatan per kapitanya lebih rendah. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah yang berada

pada klasifikasi ini, didorong oleh pertumbuhan subsektor perdagangan dan jasa-jasa. Kabupaten/kota dengan klasifikasi berkembang cepat tersebut merupakan daerah pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa.

Sedangkan kabupaten lainnya berada pada posisi daerah maju tertekan (kuadran IV) yaitu Kota Sawah Lunto. Selain itu terdapat 4 (empat) kabupaten yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal (kuadran III) yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Pasaman Barat (K. Simpang Empat), dan Kota Pariaman. Kabupaten/kota yang berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal merupakan daerah-daerah yang memiliki basis pertanian, yang pertumbuhannya tidak mampu mengangkat pertumbuhan PDRB secara keseluruhan.

IV.1.4. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Sumatera Selatan



Gambar 4.4. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Gambar 4.4. Propinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang secara umum menjadi daerah perkembangan pembangunan ekonominya



yang terbaik karena dari tahun 2000-2004 terdapat 4 (empat) kabupaten/kota termasuk dalam kategori daerah yang maju dan tumbuh cepat (kuadran I) yaitu, Kabupaten Baturaja (Oku), Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muba, dan Kota Palembang. Hal ini disebabkan rata-rata pendapatan per kapitanya jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan per kapita di kabupaten/kota lainnya. Kabupaten/kota yang berada pada klasifikasi yang maju dan tumbuh cepat merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah yang berada pada klasifikasi ini, didorong oleh pertumbuhan subsektor pertambangan, perdagangan dan pertanian.

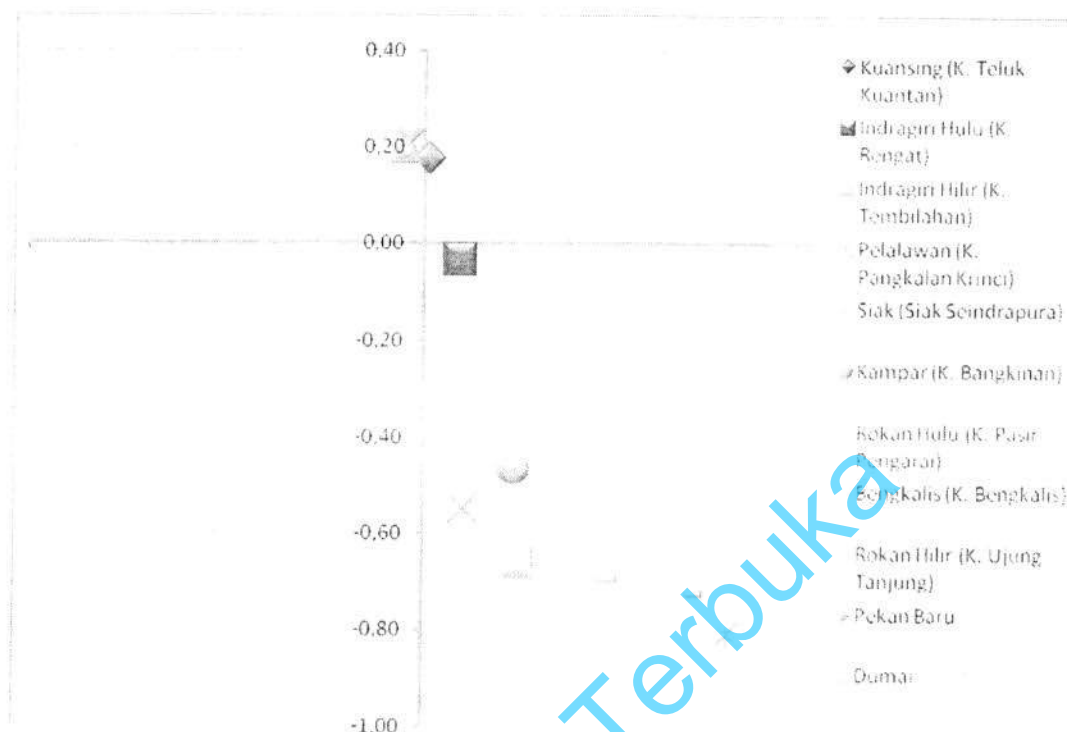
Selain itu di Propinsi Sumatera Selatan terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang berada pada klasifikasi berkembang cepat (kuadran II) yaitu Kabupaten OKI, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musirawas. Daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang memiliki basis pertambangan, perdagangan dan pertanian namun belum terlalu tinggi pendapatan per kapitanya.

Sementara itu terdapat 6 (enam) Kota di Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam kategori relatif tertinggal (kuadran III) yaitu Kabupaten Banyuasin (K. Pangkalan Balai), Kabupaten OKUS, Kabupaten OKUT, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Pagar Alam dan Kota Lubuk Linggau. Kabupaten/kota yang berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal merupakan daerah-daerah yang memiliki basis pertanian, perdagangan, industri dan jasa-jasa yang pertumbuhannya tidak mampu mengangkat pertumbuhan PDRB secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis tipologi Klaassen di Propinsi Sumatera Selatan hanya terdapat 1 (satu) kota yang masuk kategori maju tertekan (Kuadran IV) yaitu, Kota Prabumulih. Daerah yang masuk dalam kuadran ini laju pertumbuhan ekonominya sedang menurun di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota seluruh Pulau Sumatera.



IV.1.5. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Riau



Gambar 4.5. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Riau

Berdasarkan Gambar 4.5. Kabupaten Kuansing merupakan satu-satunya daerah termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh (kuadran I)., Tinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuansing karena dukungan perkembangan dari sektor Jasa-jasa, industri dan pertanian. Sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh Kabupaten Kuansing memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi sepanjang periode penelitian dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya

Di Propinsi Riau terdapat 2 (dua) daerah yang masuk dalam klasifikasi klasifikasi berkembang cepat (kuadran II), yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru. Dan hanya terdapat 1 (satu) daerah yang masuk dalam klasifikasi relatif tertinggal (kuadran III) yaitu Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan gambar 4.5 menunjukkan sebagian besar daerah di Propinsi Riau (7 (tujuh) daerah termasuk dalam kategori maju tertekan (kuadran IV) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten

Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Kabupaten dan kota tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomin yang cenderung menurun di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota seluruh Pulau Sumatera.

IV.1.6. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Kepulauan Riau



Gambar 4.6. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Kepulauan Riau

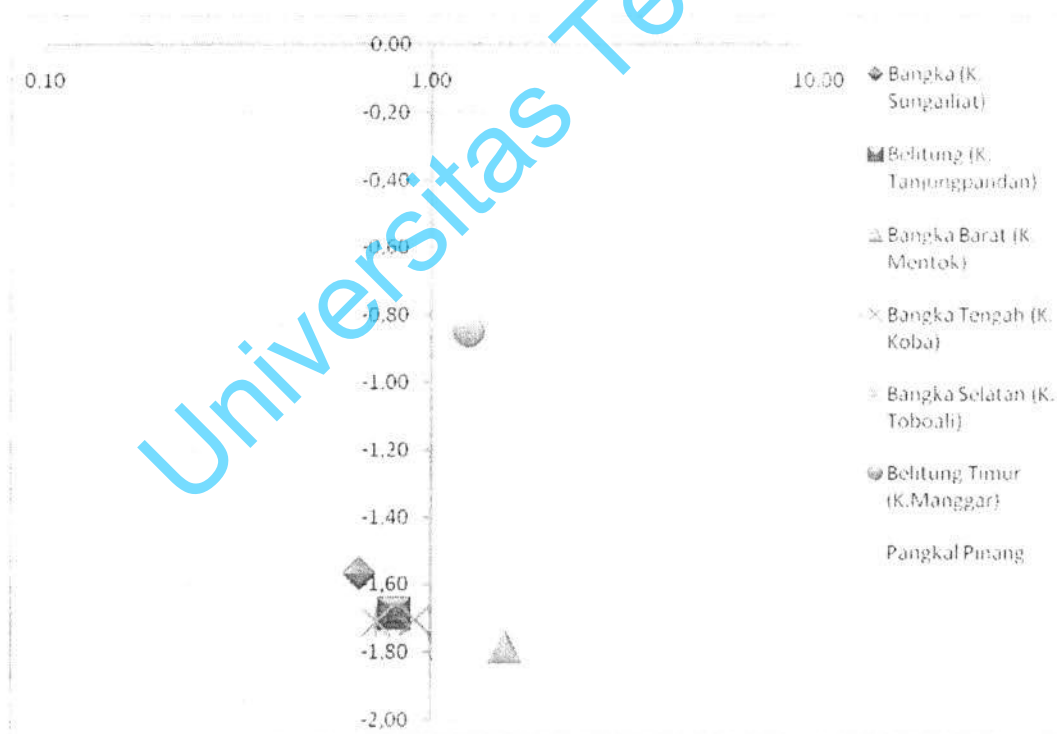
Berdasarkan Gambar 4.6. Kabupaten Tanjung Pinang merupakan satu-satunya daerah yang termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh (kuadran I). Pendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Pinang yaitu, industri, perdagangan dan pertambangan. Sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh Kabupaten Tanjung Pinang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi sepanjang periode penelitian dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya

Selain itu di Propinsi Kepulauan Riau terdapat 1 (satu) daerah masuk ke dalam kategori berkembang cepat yaitu Kabupaten Karimun. Kondisi ini

disebabkan kabupaten tersebut pertumbuhan ekonominya cukup tinggi yang didorong oleh pertumbuhan sektor industri, perdagangan dan jasa. Sementara daerah yang masuk dalam klasifikasi relatif tertinggal (kuadran III) di Propinsi Kepulauan Riau hanya 1 (satu) yaitu Kabupaten Lingga.

Di Propinsi Kepulauan Riau dari 6 kabupaten/kota yang, 3 (tiga) diantaranya berada pada klasifikasi daerah maju tertekan (kuadran IV) yaitu; Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Kabupaten/kota yang berada di kuadran ini adalah kabupaten/kota yang mempunyai fungsi industri, perdagangan dan jasa-jasa, namun laju pertumbuhan ekonominya sedang menurun di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota seluruh Pulau Sumatera.

IV.1.7. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Bangka Belitung



Gambar 4.7. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Bangka Belitung

Gambar 4.7 memperlihatkan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mampu menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi daerah yang baik dibandingkan



propinsi lainnya. Hal ini wajar karena propinsi ini masih relatif baru dan sebagian daerahnya baru mengalami pemekaran wilayah. Dengan Tipologi Klassen terlihat tidak ada satupun kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh, namun sebagian besar kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung masih dalam kategori relatif tertinggal (kuadran III) dan maju tertekan (kuadran IV).

Di Propinsi Bangka Belitung dari 7 (tujuh) Kabupaten/kota yang ada sekarang ini (termasuk hasil pemekaran wilayah), terdapat 5 (lima) daerah (4 kabupaten dan 1 kota) yang termasuk dalam klasifikasi relatif tertinggal (kuadran III) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang. Dan terdapat 2 (dua) kabupaten di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam klasifikasi maju tertekan yaitu Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur.

Sebagian besar daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah yang mengandalkan hasil pertambangan, industri dan pertanian, pada kurun waktu belakangan ini nasib pertambangan dan pertanian sangat terpuruk dengan harga-harga hasil produksinya yang terus mengalami deflasi. Pertumbuhan yang tinggi diperlukan untuk mendorong investor-investor lokal dan asing melakukan realokasi industrinya ke wilayah ini. Wilayah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang lebih banyak dan lebih lengkap untuk memacu pertumbuhan ekonominya.

IV.1.8. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Bengkulu



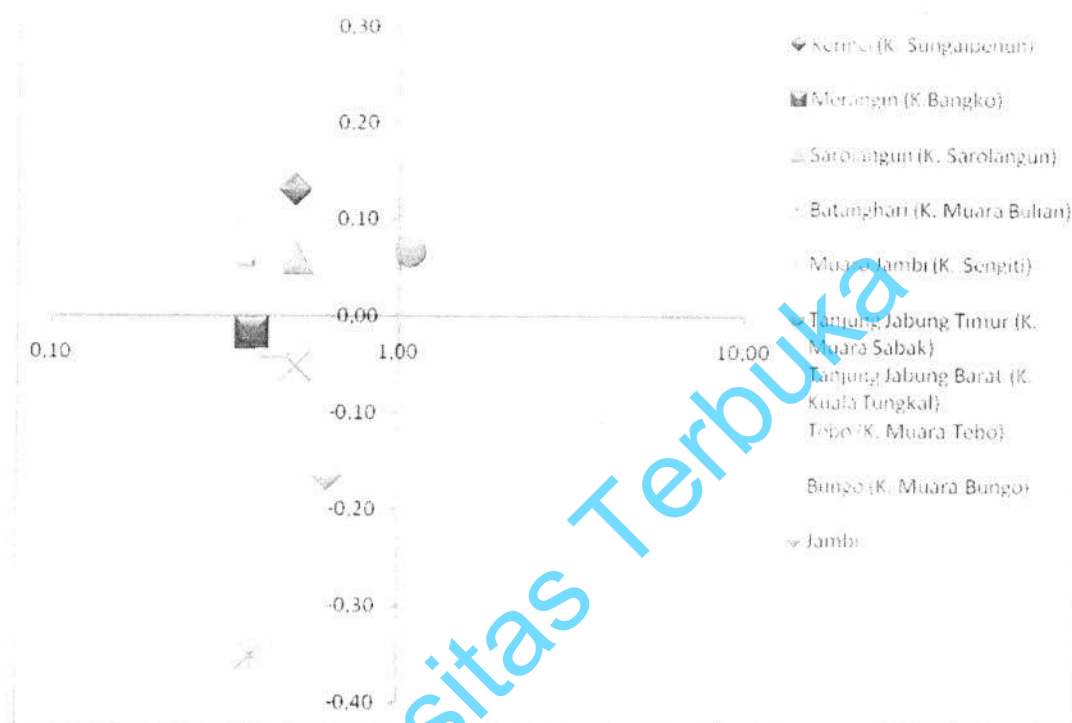
Gambar 4.8. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Bengkulu

Pada Gambar 4.8 terlihat di Propinsi Bengkulu sebagian besar kabupaten/kota berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat (kuadran II), ini merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi, namun pendapatan per kapitanya lebih rendah. Tingginya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang berada pada klasifikasi ini, didorong oleh pertumbuhan subsektor perdagangan dan kelautan. Ketujuh daerah dengan klasifikasi berkembang cepat yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Lebong *), Kabupaten Kepahiang *) dan Kota Bengkulu. Kabupaten dan kota merupakan daerah pertanian, perdagangan, pengangkutan dan jasa dengan nilai yang lebih besar dibandingkan kabupaten lain di Propinsi Bengkulu.

Sementara itu di Propinsi Bengkulu terdapat 2 (dua) daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal (kuadran III) yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kaur. Daerah tersebut memiliki basis pertanian, yang

pertumbuhannya tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

IV.1.9. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Jambi



Gambar 4.9. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Jambi

Pada tipologi Klassen, kita dapat membagi kabupaten/kota di Jambi menjadi 4 klasifikasi (lihat Gambar 4.9). Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satu-satunya daerah yang termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh (kuadran I). Selain itu terdapat 4 (empat) daerah lainnya yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Kuala Tungkal dan Kabupaten Muara Tebo, termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat (kuadran II). Keadaan tersebut menunjukkan mulai menggeliatnya pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten tersebut.

Sementara itu di Propinsi Jambi terdapat 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota masuk ke dalam kategori relatif tertinggal (kuadran III) yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten, Kabupaten Muaro Jambi,



Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Kota Jambi sendiri merupakan ibu kota Propinsi di Pulau Sumatera yang masuk dalam kategori relatif tertinggal sama seperti halnya dengan Kota Pangkal Pinang dan Kota Banda Aceh.

Sedangkan daerah yang termasuk dalam klasifikasi maju tertekan (kuadran IV) di Propinsi Jambi tidak ada, hal ini menunjukkan secara umum masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jambi sedang mengalami pertumbuhan ekonomi.

IV.1. 10. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Lampung



Gambar 4.10. Analisis Tipologi Klassen Propinsi Lampung

Berdasarkan Gambar 4.10 terlihat bahwa belum ada kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh. Sebagian besar Kabupaten/kota di Propinsi Lampung termasuk dalam klasifikasi berkembang cepat (kuadran II). Daerah yang termasuk dalam kuadran II tersebut adalah 1 (satu) kota yaitu Kota Bandar Lampung dan 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah,

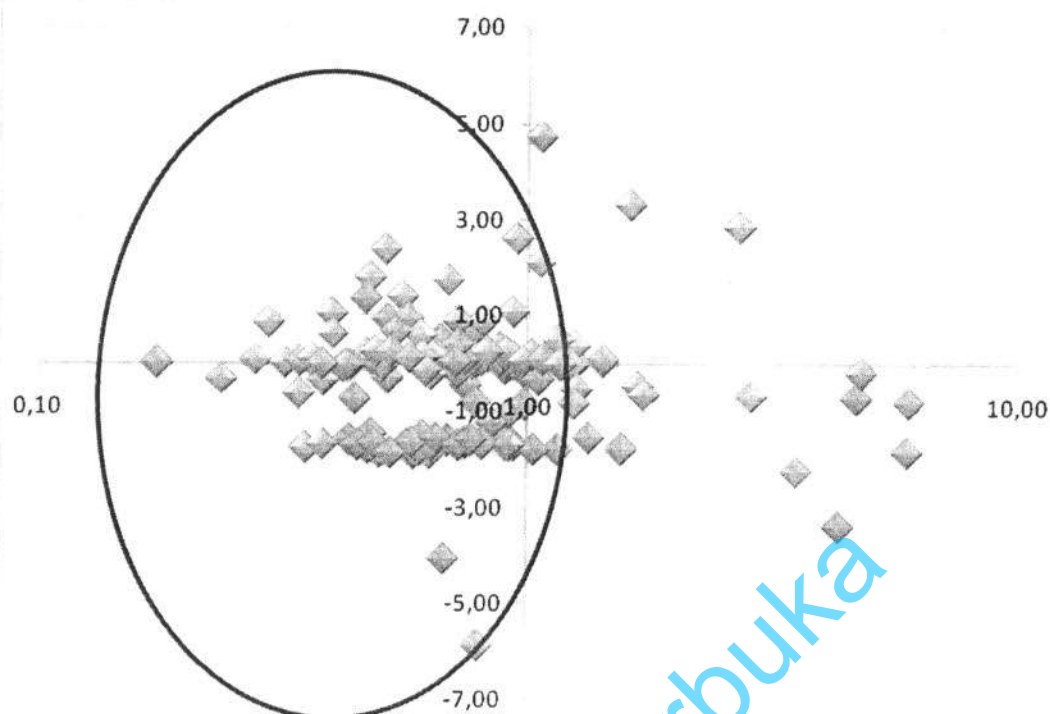
Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten/kota yang berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding rata-rata propinsi, namun pendapatan per kapitanya lebih rendah. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah yang berada pada klasifikasi ini, didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa-jasa.

Sedangkan kabupaten lainnya, 2 (dua) Kabupaten (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Selatan) dan 1 (satu) kota (Kota Metro) berada pada klasifikasi relatif tertinggal (kuadran III). Kabupaten/kota yang berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal merupakan daerah-daerah yang memiliki basis pertanian, yang penduduknya banyak bekerja di sektor ini. Sementara sisanya 1 (satu) Kabupaten masuk ke dalam kategori maju tertekan (Kuadran IV) yaitu Kabupaten Way Kanan.

IV.2. Pola Pertumbuhan Ekonomi Antar wilayah Di Pulau Sumatera

Pola pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Pulau Sumatera dapat dilihat pola sebaran secara keseluruhan (agregat) dari masing-masing kabupaten dan kota disetiap propinsi di Pulau Sumatera. Jika kita menggabungkan analisis tipologi klassen dari masing-masing propinsi, maka dapat dilihat pola sebaran pertumbuhan ekonomi antarwilayah, seperti terlihat pada gambar 4.11





Gambar 4.11. Pola Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Di Propinsi Sumatera

➤ Kuadran I

Dari 31 kota yang ada di Pulau Sumatera, hanya ada 3 kota yang masuk dalam Kuadran I atau *cepat-maju dan cepat tumbuh (rapid growth region)*. Dan dari 101 kabupaten yang ada di Pulau Sumatera terdapat 7 kabupaten yang masuk dalam kuadran I atau *cepat-maju dan cepat tumbuh (rapid growth region)*. Dari ke-3 kota tersebut dua diantaranya merupakan kota yang cukup besar yaitu Kota Medan dan Padang. Kedua kota tersebut merupakan kota yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan di Pulau Sumatera. Selain itu memperhatikan dari keberadaan kota dan kabupaten ini di Kuadran I ada hubungannya dengan kontribusi sektoral perekonomiannya dimana, kabupaten dan kota peranan sektor industri, pertambangan, perdagangan dan jasa cukup dominan.

➤ Kuadran II

Terdapat 14 kota dari 31 kota dan 41 kabupaten dari 101 kabupaten tersebar di kuadran ini. Jadi totalnya terdapat 53 kota dan kabupaten dari 132 kota dan kabupaten yang ada di Pulau Sumatera masuk dalam Kuadran II ini. Jumlah



tersebut relatif dominan, artinya sebagian besar kabupaten dan kota di Pulau Sumatera berada pada kuadran II ini. (lihat gambar 4.11). Kabupaten/kota ini disebut dengan daerah "*Berkembang Cepat*" (*growing region*). Ini memberikan arti bahwa kota di kuadran II ini mempunyai prospek tumbuh lebih baik lagi pada masa mendatang apabila proses investasi akan terus berlangsung dan iklim investasi tetap kondusif.

➤ Kuadran III

Kabupaten/kota yang terdapat di Kuadran III ini relatif cukup banyak yaitu 8 kota dari total 31 kota dan 41 kabupaten dari 101 kabupaten. Kabupaten dan kota yang terdapat di kuadran ini disebut dengan "*relatif tertinggal*" (*relatively backward region*) yaitu kabupaten dan kota yang tertinggal baik laju pertumbuhan maupun tingkat ekonomi perkapitanya.

➤ Kuadran IV

Terdapat 8 kota dari total 31 kota dan 12 kabupaten dari 101 kabupaten yang tersebar di Kuadran IV. Kabupaten dan kota yang terdapat di kuadran ini disebut dengan "*Daerah maju tapi tertekan*" (*retarded region*) yaitu kota yang tingkat ekonominya lebih maju tetapi laju pertumbuhannya sedang melambat.

Berdasarkan gambar 4.11 terlihat pola sebaran pertumbuhan antarwilayah di Pulau Sumatera yang cenderung mengumpul pada kuadran II dan Kuadran III. Sementara itu, daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi berada pada kuadran I dan cenderung menyebar terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat industri seperti Kota Medan dan Kota Padang dan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya mineral (pertambangan) seperti Kabupaten Baturaja (Oku), Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muba, dan Kota Palembang di Propinsi Sumatera Selatan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Perroux (1988) yaitu bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat



pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda seperti yang terpola pada gambar 4.11.

IV.3. Analisis Ketimpangan (Disparitas) Antar Wilayah Di Propinsi Sumatera

Tabel 4.1 menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB perkapita antarpropinsi di Pulau Sumatera selama periode tahun 2000-2004 dengan menggunakan indeks Williamson yaitu rata-rata sebesar 0,59 tahun 2000 dan rata-rata sebesar 0,56 tahun 2004. Selama periode angka ketimpangan cenderung menurun. Walaupun cenderung menurun angka indeks rata-rata tersebut masih relatif tinggi (kategori ketimpangan taraf tinggi yakni diatas 0,50). Kondisi tersebut menunjukkan PDRB per kapita di Propinsi di Pulau Sumatera relatif tidak merata. Gambar yang menunjukkan kecenderungan penurunan ketimpangan juga dapat dilihat pada gambar 4.12.

Tabel 4.1

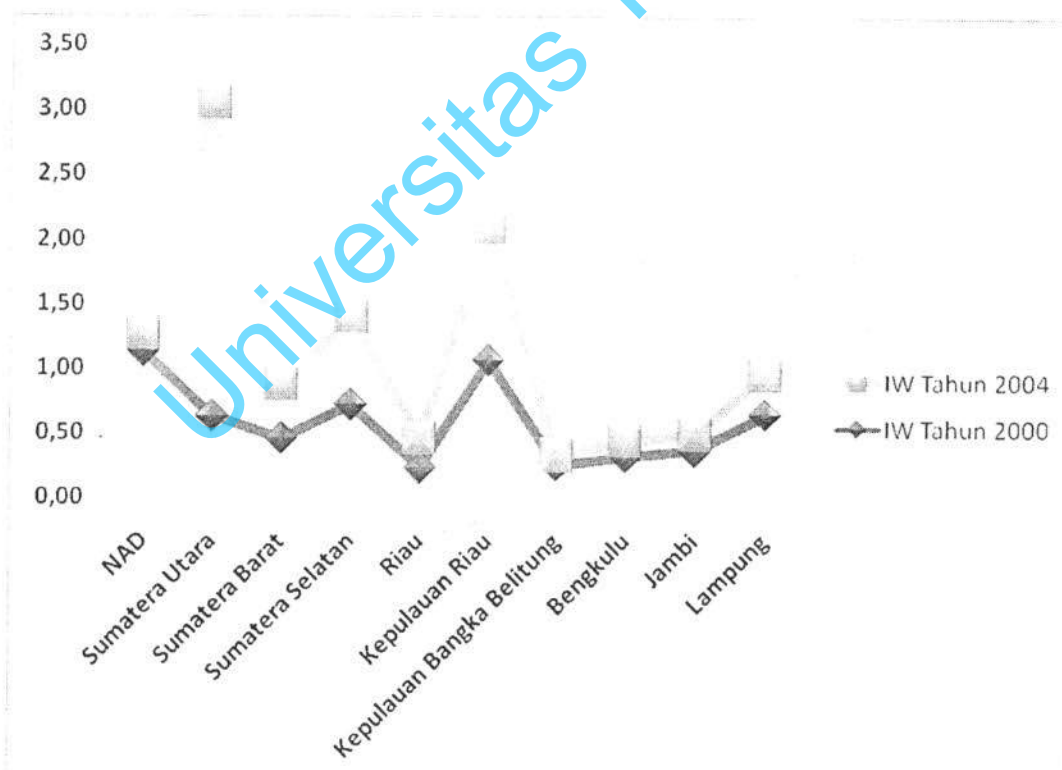
Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Wilayah
Berdasarkan Indeks Ketimpangan Wiliamson Tahun 2000-2004

No	Propinsi	Nilai IW	
		2000	2004
1	NAD	1,14	0,14
2	Sumatera Utara	0,63	2,42
3	Sumatera Barat	0,46	0,42
4	Sumatera Selatan	0,72	0,69
5	Riau	0,24	0,23
6	Kepulauan Riau	1,07	1,02
7	Kepulauan Bangka Belitung	0,26	0,08
8	Bengkulu	0,32	0,12
9	Jambi	0,37	0,13
10	Lampung	0,65	0,31
Rata-Rata Indeks Wiliamson P. Sumatera		0,59	0,56

Sumber: BPS, data diolah.



Selain ketimpangan pendapatan juga terjadi disetiap propinsi pada tahun 2000-2004. Hal itu dapat dilihat hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Wiliamson petahun 2000-2004 (lihat Tabel 4.1). Tabel 4.1 menunjukkan Propinsi NAD, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung dan Jambi masuk ke dalam kategori ketimpangan taraf rendah dibawah 0,35 dan Propinsi Sumatera barat masuk ke dalam kelas ketimpangan taraf sedang yakni berkisar 0,35 sampai dengan 0,50, sedangkan propinsi yang ketimpangannya sangat tinggi yakni Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Kepulauan Riau yakni lebih dari 0,50. Walaupun ketimpangan taraf tinggi pada masing-masing Propinsi di Sumatera, PDRB perkapita selalu meningkat selama kurun waktu tahun 2000-2004. Ini membuktikan bahwa bahwa Hipotesis U Terbalik yang dikembangkan oleh Kuznets dan dijelaskan oleh Williamson terbukti pada lingkup wilayah, yaitu pada saat pendapatan per kapita meningkat, akan terjadi peningkatan ketimpangan wilayah, lalu bertahan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menurun.



Gambar 4.12. Indeks Wiliamson Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2000-2004



Untuk mengetahui besarnya ketimpangan suatu daerah selain memakai indeks Williamson juga dapat menggunakan indeks entropi Theil. Hasil perhitungan indeks Theil (tabel 4.2) menunjukkan kecenderungan penurunan ketimpangan dari tahun 2000 nilai indeks entropi Theil sebesar 0,642 dan pada tahun 2004 menurun menjadi sebesar 0,061.

Indeks entropi Theil yang semakin membesar menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar. Demikian pula sebaliknya, bila indeksnya semakin kecil maka ketimpangan akan semakin rendah/kecil atau dengan kata lain merata. Indeks ketimpangan entropi Theil tidak memiliki batas atas atau batas bawah, hanya apabila semakin besar nilainya maka semakin timpang dan semakin kecil semakin merata. Hasil itu sejalan dengan indeks Williamson yang menunjukkan kecenderungan ketimpangan antarwilayah di Propinsi Sumatera cenderung menurun.

Tabel 4.2

Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Wilayah
Berdasarkan Indeks Entropi Theil

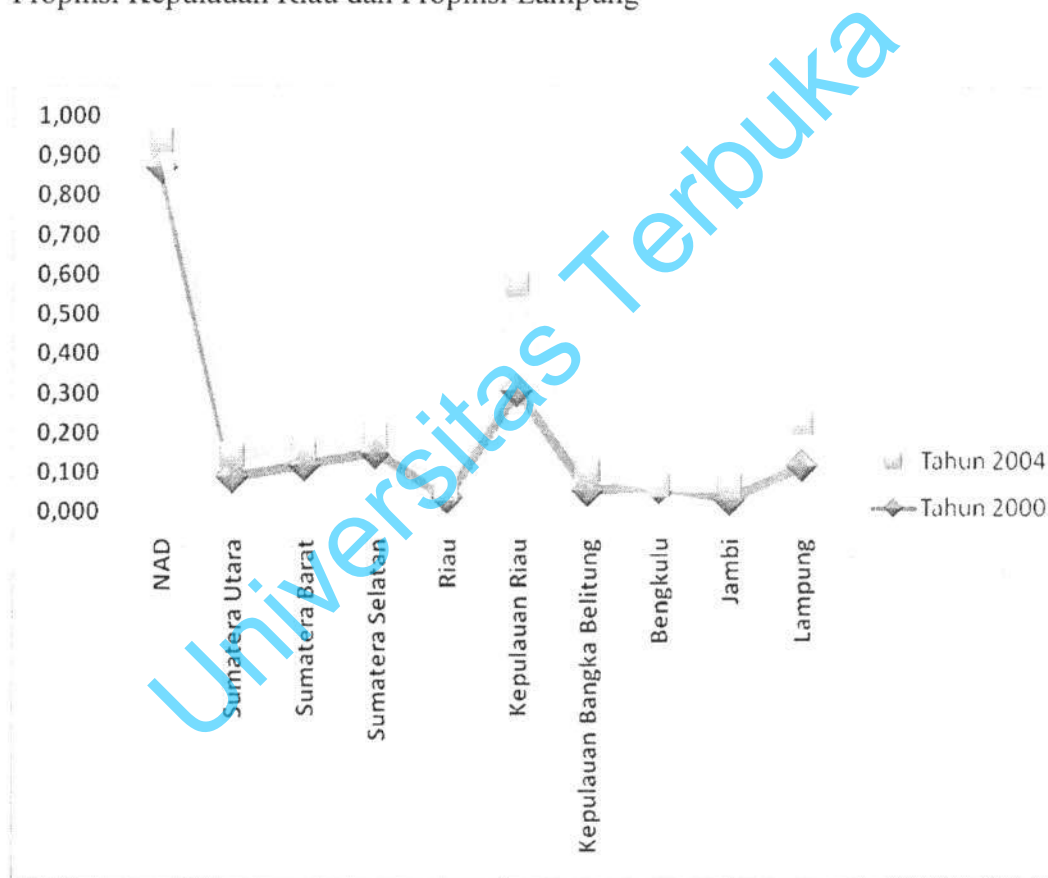
No	Propinsi	Nilai IT 2000	Nilai IT 2004
1	NAD	0,871	0,067
2	Sumatera Utara	0,087	0,055
3	Sumatera Barat	0,117	0,041
4	Sumatera Selatan	0,148	0,042
5	Riau	0,034	0,026
6	Kepulauan Riau	0,306	0,268
7	Kepulauan Bangka Belitung	0,053	0,048
8	Bengkulu	0,061	0,006
9	Jambi	0,030	0,032
10	Lampung	0,113	0,111
	Indeks Theil P. Sumatera	0,642	0,061

Sumber: BPS, data diolah.

Berdasarkan tabel indeks entropi Theil, dapat dilihat juga ketimpangan yang terjadi di setiap Propinsi di Pulau Sumatera. Hasil perhitungan dengan



menggunakan Indeks Theil pada tahun 2000-2004 (lihat Tabel 4.1), Propinsi Sumatera Utara, NAD, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi di bawah angka 0,35, sehingga menurut klasifikasi HT. Oshima termasuk dalam kelas ketimpangan taraf rendah. Sedangkan Propinsi Kepulauan Riau, dan Propinsi Lampung masuk ke dalam kategori ketimpangan taraf tinggi yakni diatas 0,50. Berbeda dengan hasil perhitungan Indeks Wiliamson dimana ketimpangan tertinggi terjadi di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Kepulauan Riau, naman dengan indeks entropi Theil menunjukkan daerah yang memiliki ketimpangan tinggi di Pulau Sumatera adalah Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Lampung



Gambar 4.13. Indeks Theil Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2000-2004





V.1. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen di Pulau Sumatera kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh kecenderungan berada di Kota Propinsi dan sebagian di Kabupaten/Kota yang memiliki sumber daya yang dimanfaatkan secara maksimal seperti, pertambangan dan perdagangan. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah yang berada pada klasifikasi ini, didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa-jasa. sedangkan kabupaten lainnya berada pada posisi daerah maju tertekan dan daerah relatif tertinggal, yang pendapatan per kapitanya lebih rendah, dan hanya mengandalkan hasil pertanian, yang penduduknya mayoritas bekerja di sektor pertanian.
2. Pola sebaran pertumbuhan antarwilayah di Pulau Sumatera yang cenderung mengumpul pada kuadran II dan Kuadran III. Sementara itu daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi berada pada kuadran I dan cenderung menyebar terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat industri seperti Kota Medan dan Kota Padang dan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya mineral (pertambangan) seperti Kabupaten Baturaja (Oku), Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muba, dan Kota Palembang di Propinsi Sumatera Selatan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Perroux (1988) yaitu bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya

terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

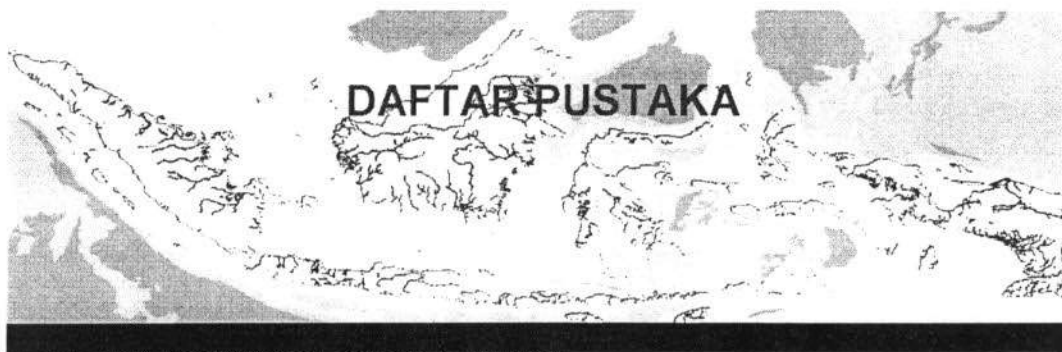
3. Indeks ketimpangan PDRB perkapita antarpropinsi di Pulau Sumatera selama periode tahun 2000-2004 dengan menggunakan indeks Williamson menunjukkan kecenderungan yang menurun yaitu rata-rata sebesar 0,59 tahun 2000 dan rata-rata sebesar 0,56 tahun 2004. Sementara itu hasil perhitungan indeks Theil menunjukkan hasil sama yaitu kecenderungan penurunan ketimpangan dari tahun 2000 nilai indeks entropi Theil sebesar 0,642 dan pada tahun 2004 menurun menjadi sebesar 0,061. Walaupun cenderung menurun angka indeks rata-rata ketimpangan Williamson tersebut masih relatif tinggi (kategori ketimpangan taraf tinggi yakni diatas 0,50). Kondisi tersebut menunjukkan PDRB per kapita di Propinsi di Pulau Sumatera relatif tidak merata.
4. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Indeks Theil pada tahun 2000-2004, Propinsi Sumatera Utara, NAD, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi di bawah angka 0,35, sehingga menurut klasifikasi HT. Oshima termasuk dalam kelas ketimpangan taraf rendah. Sedangkan kepulauan Riau, dan propinsi lampung masuk ke dalam kategori ketimpangan taraf tinggi yakni diatas 0,50. Berdasarkan Indeks Ketimpangan Wiliamson tahun 2000-2004 (lihat Tabel 4.1). Propinsi NAD, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung dan Jambi masuk ke dalam kategori ketimpangan taraf rendah dibawah 0,35 dan Propinsi Sumatera barat masuk ke dalam kelas ketimpangan taraf sedang yakni berkisar 0,35 sampai dengan 0,50, sedangkan propinsi yang ketimpangannya sangat tinggi yakni Propinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau yakni lebih dari 0,50.



V.2. Saran

1. Ketimpangan pendapatan antardaerah tidak akan dihilangkan sama sekali karena tiap daerah mempunyai potensi sumber daya dan keadaan sarana dan prasarana (jalan, transportasi darat, pelabuhan laut maupun udara, jaringan telekomunikasi dan lain-lain) yang berbeda-beda namun begitu nilainya sebaiknya terus ditekan agar suatu daerah mempunyai ketimpangan pendapatan taraf rendah karena ketimpangan pendapatan merupakan sumber pemicu dari disintegrasi suatu daerah maupun bangsa.
2. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tertentu yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antardaerah sebaiknya dikurangi seperti yang terjadi selama ini di mana konsentrasi kegiatan ekonomi berada di ibu kota Propinsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini karena ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.
3. Dengan adanya efek penyebaran (*spread effect*) seperti modal mengakibatkan adanya perubahan daerah lokasi investasi dan tenaga kerja. Hal ini harus diterima secara positif dengan didukung penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada, karena daerah ini akan mengalami perubahan pembangunan ekonomi secara sektoral. Keadaan ini menyebabkan masyarakat suatu daerah harus siap menghadapi transformasi struktur ekonomi agar saat proses ini terjadi masyarakat daerah ini dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan ini yang mungkin dapat memberikan dampak positif dan negatif.
4. Transformasi struktur ekonomi hendaknya dapat diwujudkan untuk merangsang perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah yang masih berkutat dengan sektor pertanian diharapkan bisa meraih dukungan dari sektor lain.





- Kadariah, 1982, *Ekonomi Perencanaan*, LPFE-UI, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga Jakarta.
- Nabuko, Nabuko dan H. Abu Achmadi, 1999, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, *Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah*, Biro Hukum Sekretariat Wilayah Propinsi Jateng, Semarang
- Sjafrizal, 1997, "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat," *Prisma*, No. 3, 27-38
- Supono, Prasetyo, 1993, "Analisis Shift-Share: Perkembangan dan Penerapan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. VIII, No. 1, BPFE-UGM, Yogyakarta, 43-54
- Tambunan, Tulus, 2001, *Transformasi Ekonomi di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta
- Tumenggung, Syafrudin A., 1997, "Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praktis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan," dalam Tjahjati dan. Kusbiantoro (Penyunting), *Bunga Rampai: Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Uppal, J.S. dan Budiono Sri Handoko, 1986, "Regional Income Disparity in Indonesia," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XXXIV, No. 3, 287-304
- Widodo, Hg. Suseno Triyanto, 1990, *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta



Widodo, Tri , 2006, "Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah), UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Ying, L., G. 2000, *China's Changing Regional Disparities during the Reform Period. Economic Geography*, XXIV (7), 59-70

Universitas Terbuka



REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Analisis Tingkat Pertumbuhan dan Kesenjangan dalam Distribusi Pendapatan Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.
2. Rekomendasi Pemanfaatan Hasil Penelitian untuk Pengayaan Bahan Ajar diberikan untuk:

Mata Kuliah	: Ekonomi Pembangunan I
Judul Modul	: Ekonomi Pembangunan II
SKS	: 3 SKS
Kode Modul	: ESPA 4213 dan ESPA4414

Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

- Dengan menggunakan Tipologi Klassen dapat menghitung dan menganalisis pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Pulau Sumatera berdasarkan karakteristik pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita.
- Dengan menggunakan Indeks Theil yang meliputi komponen dalam grup Kabupaten/Kota dan komponen antar grup Kabupaten/Kota dapat menghitung dan menganalisis tingkat ketimpangan regional dari distribusi pendapatan antarwilayah (Kota/Kabupaten) di Pulau Sumatera
- Mengetahui pola pertumbuhan dan pola ketimpangan regional antardaerah (Kota/Kabupaten) di Pulau Sumatera

Dari rekomendasi pengayaan bahan ajar, diharapkan penelitian ini dapat dimasukkan sebagai contoh kasus, terutama untuk penggunaan alat analisis kuantitatif yang berkaitan dengan Analisis Tingkat Pertumbuhan dan Kesenjangan dalam Distribusi Pendapatan pada matakuliah Ekonomi Pembangunan I dan Ekonomi Pembangunan II.



Universitas Terbuka



[illegible]

Lampiran 1

Lampiran I: Hasil Perhitungan Tipologi Klaassen

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000	PDRB IKAPITA (2000)		PDRB TAHUN 2004 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2004	PDRB IKAPITA (2004)		$(Y_i - \bar{Y})^2$		V_{2000}	$(Y_i - \bar{Y})^2$		V_{2004}	$f_{i,n}$	V_{2004}
			(1)	(2)	(3) = (1) / (2)	(4)	(5)	(6) = (4) / (5)	(7)	(8)	(9)	(10)								
													Yi	Yi						
		23 Mandailing (K. Penyabungan)	1.123.617,37	359.849,00	3,12	1.409.579,52	385.611	0,6756	20,90	0,0084	0,0228	0,11	0,0084	0,0009						
		24 Tapanuli Selatan (K. Padang Sidempuan)	1.927.815,06	734.188,00	2,63	2.500.236,83	619.223	1,1983	25,69	0,0171	0,0572	0,04	0,0135	0,0005						
		25 Tapanuli Tengah (K. Sibolga)	678.002,14	244.673,00	2,77	849.061,22	266.659	0,4069	24,24	0,0057	0,0180	0,35	0,0063	0,0022						
		26 Tapanuli Utara (K. Tarutung)	972.481,03	407.710,00	2,39	1.160.282,30	267.411	0,5561	28,19	0,0095	0,0348	0,20	0,0058	0,0012						
		27 Toba Samosir (K. Balige)	829.175,55	304.125,00	2,73	1.285.571,31	173.661	0,6161	24,68	0,0071	0,0228	0,15	0,0038	0,0006						
		28 Labuhan Batu (K. Ranau Prapat)	5.665.018,40	844.089,00	6,71	6.712.587,75	955.713	3,2171	0,97	0,0197	0,0025	4,90	0,0209	0,1020						
		29 Asahan (K. Kisaran)	1.962.296,26	935.653,00	8,51	9.484.024,52	1.028.472	4,5454	0,67	0,0218	0,0019	12,55	0,0224	0,2810						
		30 Simalungun (Pematang Siantar)	3.777.626,15	855.783,00	4,41	4.244.811,18	830.745	2,0344	10,76	0,0200	0,0279	1,06	0,0181	0,0192						
		31 Dairi (K. Sidikalang)	1.258.984,11	292.824,00	4,30	1.489.866,75	246.873	0,7140	11,53	0,0068	0,0102	0,08	0,0054	0,0004						
		32 Karo (K. Kabanjahe)	1.998.038,16	283.713,00	7,04	2.357.093,33	324.001	1,1297	0,42	0,0066	0,0004	0,02	0,0071	0,0001						
		33 Deli Serdang (K. Lubukpakam)	8.796.154,85	1.959.258,00	4,49	10.345.046,20	1.416.168	4,9580	10,27	0,0457	0,0610	15,64	0,0309	0,4823						
		34 Langkat (K. Sibak)	4.144.789,71	902.986,00	4,59	4.989.366,80	971.282	2,3912	9,64	0,0211	0,0264	1,93	0,0212	0,0408						
		35 Nias Selatan (K. Teluk Dalam)	769.535,58	120.201,30	6,40	1.032.980,57	276.463	0,4951	1,67	0,0028	0,0006	0,26	0,0060	0,0016						
		36 Humbang Hasundutan (K. Dolog Sanggul)	591.235,34	70.483,04	8,39	715.993,96	162.111	0,3432	0,48	0,0016	0,0001	0,44	0,0035	0,0015						
		37 Pakpak Barat (K. Sialak)	93.670,57	15.471,30	6,05	119.721,37	35.584	0,0574	2,69	0,0004	0,0001	0,89	0,0008	0,0007						
		38 Samosir (K. Pengururan)	554.227,12	54.410,87	10,19	623.407,76	125.145	0,3946	6,21	0,0013	0,0010	0,37	0,0027	0,0010						
		39 Serdang Begadai (K. Sei Rempat)	2.387.488,30	285.580,87	8,36	3.124.767,44	656.836	1,4976	0,44	0,0067	0,0004	0,24	0,0143	0,0035						
	Kota	40 Sibolga	449.017,75	81.699,00	5,50	539.968,80	89.627	0,2588	4,83	0,0019	0,0012	0,55	0,0020	0,0011						
		41 Tanjung Balai	884.853,52	132.385,00	6,68	1.097.489,12	149.745	0,5260	1,02	0,0031	0,0004	0,23	0,0033	0,0007						
		42 Pematang Siantar	1.335.834,84	241.480,00	5,53	1.561.947,58	229.011	0,7486	4,68	0,0056	0,0034	0,06	0,0050	0,0003						
		43 Tebing Tinggi	689.985,43	124.979,00	5,52	839.831,12	138.377	0,4024	4,72	0,0029	0,0018	0,36	0,0030	0,0011						
		44 Medan	18.956.579,54	1.904.273,00	9,95	23.600.002,95	2.122.579	11,3107	5,11	0,0444	0,0295	108,25	0,0463	4,9084						
		45 Binjai	1.112.564,85	213.725,00	5,21	1.360.506,32	227.478	0,6520	6,19	0,0050	0,0040	0,12	0,0050	0,0006						

Lampiran 1: Hasil Perhitungan Tipologi Klaassen

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000	PDRB /KAPITA (2000)		PDRB TAHUN 2004 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2004	PDRB /KAPITA (2004)		$(Y_t - \bar{Y})^2$		V_{t-2000}	$(Y_t - \bar{Y})^2$		V_{t-2004}
			(1)	(2)	(3) = (1) / (2)	Y _t	(4)	(5)	(6) = (4) / (5)	Y _t	(7)	(8)	(9)	(10)				
3	Sumatera Barat	Kabupaten																
							</											

Lampiran 1: Hasil Perhitungan Tipologi Klaassen

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDK TAHUN 2000	PDRB/KAPITA (2000)		PORB TAHUN 2004 (JUTA)	JML PDK TAHUN 2004	PDRB/KAPITA (2004)	(Y- \bar{y}) ²		(f,n)	V ₂₀₀₀ ($\sum (Y-\bar{y})^2 \cdot f(n)/y$)	(Y- \bar{y}) ²	(f,n)	V ₂₀₀₄ ($\sum (Y-\bar{y})^2 \cdot f(n)/y$)
			(1)	(2)		(3) = (1)/(2)	(4)				(7)	(8)					
			1,980,575.00	976,178.00	2.03	2.03	2,384,139.00	656,828	1.1426	32.10	0.0228	0.0950	0.02	0.0143	0.0003		
			3,234,809.00	717,741.00	4.51	4.51	3,798,041.00	641,204	1.8203	10.16	0.0167	0.0221	0.67	0.0140	0.0093		
			1,989,438.00	670,128.00	2.97	2.97	2,350,352.00	570,557	1.1264	22.33	0.0156	0.0454	0.02	0.0125	0.0002		
			1,373,520.00	641,836.00	2.14	2.14	1,678,737.00	477,598	0.8046	30.85	0.0150	0.0600	0.04	0.0104	0.0004		
			2,504,138.00	1,240,407.00	2.02	2.02	3,174,910.00	474,212	1.5216	32.21	0.0289	0.1211	0.27	0.0104	0.0028		
			2,281,153.09	296,125.22	7.70	7.70	3,602,704.83	681,088	1.7267	0.00	0.0069	0.0000	0.52	0.0149	0.0078		
			774,225.00	143,067.39	5.41	5.41	904,980.00	329,055	0.4337	5.21	0.0033	0.0023	0.32	0.0072	0.0023		
			1,385,689.00	244,430.00	5.68	5.68	1,678,262.00	562,189	0.8043	4.05	0.0057	0.0030	0.04	0.0123	0.0005		
			1,109,682.00	155,210.00	7.15	7.15	1,348,687.00	356,983	0.6464	0.30	0.0036	0.0001	0.13	0.0078	0.0010		
			8,041,520.00	1,455,419.00	5.54	5.54	10,143,275.00	1,357,866	4.8613	4.64	0.0339	0.0204	14.89	0.0296	0.4401		
			584,323.00	58,767.83	9.94	9.94	711,084.00	135,212	0.3408	5.04	0.0014	0.0009	0.44	0.0030	0.0013		
			426,455.00	50,986.09	8.36	8.36	478,991.00	117,268	0.2296	0.45	0.0012	0.0001	0.60	0.0026	0.0015		
			646,134.00	76,535.65	8.44	8.44	794,404.00	176,032	0.3807	0.56	0.0018	0.0001	0.39	0.0038	0.0015		
			1,978,035.86	7,882,518.17	5.22	5.22	6,798,189.00	1.19				0.721	0.03		0.685		
5	Riau	Kabupaten	1,479,177.19	216,732.00	6.82	6.82	1,844,515.67	243,772	0.9319	0.76	0.0051	0.0005	0.01	0.0053	0.0000		
			1,985,669.68	247,306.00	8.03	8.03	2,644,418.66	295,988	1.2655	0.11	0.0058	0.0001	0.07	0.0065	0.0004		
			3,274,494.71	555,701.00	5.89	5.89	4,335,963.66	624,359	2.0781	3.25	0.0130	0.0055	1.16	0.0136	0.0157		
			1,586,244.26	152,949.00	10.37	10.37	2,050,712.95	220,836	0.9828	7.16	0.0036	0.0033	0.00	0.0048	0.0000		
			1,887,883.77	238,786.00	7.91	7.91	2,478,750.37	292,144	1.1880	0.04	0.0056	0.0000	0.03	0.0064	0.0002		
			2,295,057.50	447,157.00	5.13	5.13	3,022,420.46	532,236	1.4485	6.56	0.0104	0.0099	0.20	0.0116	0.0023		
			1,169,726.26	265,686.00	4.40	4.40	1,535,724.27	340,701	0.7360	10.84	0.0082	0.0087	0.07	0.0074	0.0005		
			2,337,937.81	520,241.00	4.49	4.49	3,126,487.10	637,163	1.4984	10.24	0.0121	0.0162	0.25	0.0139	0.0034		
			1,970,734.87	352,299.00	5.59	5.59	2,625,138.50	440,904	1.2581	4.41	0.0082	0.0047	0.07	0.0096	0.0006		

Lampiran 1: Hasil Perhitungan Tipologi Klaassen

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000	PDRB /KAPITA (2000)		PDRB TAHUN 2004 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2004	PDRB /KAPITA (2004)		$(Y_i - \bar{Y})^2$		V_{2000}		$(Y_i - \bar{Y})^2$		V_{2004}		$(\bar{S}(Y_i - \bar{Y})^2 \cdot \ln(Y_i))$
			(1)	(2)		Y_i	(3) = (1) / (2)			Y_i	(6) = (4) / (5)	(7)	(8)	(9)	(10)					
		Kota																		
		89 Pekanbaru Baru	3.461.454.85	585.440.00	5.91	4.970.924.32	2.3824	702.717	2.3824	3.17	0.0137	0.0056	1.90	0.0153	0.0291					
		90 Dumai	947.166.36	173.188.00	5.47	1.271.000.33	215.761	6.0091	4.95	0.0040	0.0026	0.15	0.0047	0.0007						
			2.035.958.84	3.755.485.00	6.37			4.546.591.00	1.31			0.237			0.230					
6	Kepulauan Riau	Kabupaten	1.200.170.60	319.482.00	3.76	1.428.306.74	113.267	0.6845	15.51	0.0075	0.0150	0.10	0.0025	0.0002						
		92 Karimun (K. Tanjung B. Karimun)	1.133.876.52	164.770.00	6.88	1.432.777.90	187.457	0.6867	0.66	0.0038	0.0003	0.10	0.0041	0.0004						
		93 Natuna (K. Ranai)	431.507.15	78.081.00	5.53	550.360.81	87.354	0.2638	4.70	0.0018	0.0011	0.55	0.0019	0.0010						
		94 Lingga (K. Daik. Lingga)	324.713.73	33.512.17	9.69	411.388.65	77.078	0.1972	3.98	0.0008	0.0004	0.65	0.0017	0.0011						
		Kota	15.994.069.35	437.358.00	36.57	21.164.391.79	572.452	10.1434	833.79	0.0102	1.1057	83.55	0.0125	1.0411						
		96 Tanjung Pinang	1.287.526.28	69.964.35	18.40	1.683.899.07	160.918	0.8070	114.67	0.0016	0.0243	0.04	0.0035	0.0001						
			3.396.315.94	1.133.167.32	13.47		1.198.526	2.13			1.071			1.022						
7	Bangka Belitung	Kabupaten	916.537.89	101.041.35	9.07	1.182.197.12	232.356	0.5666	1.90	0.0024	0.0006	0.19	0.0051	0.0010						
		98 Belitung (K. Tanjungpandan)	704.519.23	59.326.52	11.88	859.329.69	136.451	0.4118	17.48	0.0014	0.0031	0.35	0.0030	0.0010						
		99 Bangka Barat (K. Mentok)	1.471.469.02	61.023.91	24.11	1.712.229.99	140.355	0.8206	269.57	0.0014	0.0499	0.03	0.0031	0.0001						
		100 Bangka Tengah (K. Kota)	768.135.94	56.527.39	13.59	928.236.22	130.013	0.4449	34.74	0.0013	0.0060	0.31	0.0028	0.0009						
		101 Bangka Selatan (K. Toboali)	699.027.58	64.857.83	10.78	842.801.37	149.173	0.4039	9.51	0.0015	0.0019	0.36	0.0033	0.0012						
		102 Belitung Timur (K. Manggar)	482.390.43	38.236.52	12.62	855.508.88	87.944	0.4100	24.22	0.0009	0.0028	0.35	0.0019	0.0007						
		Kota	666.987.30	61.723.04	10.81	847.519.96	141.983	0.4062	9.68	0.0014	0.0018	0.36	0.0031	0.0011						
			815.578.20	442.719.57	13.26		1.613.255.00	0.49			6.257			0.977						
8	Bengkulu	Kabupaten	718.017.00	370.678.00	1.94	422.647.35	136.398	0.2026	33.15	0.0086	0.0373	0.64	0.0030	0.0019						
		105 Rejang Lebong *) (K. Curup)	1.848.619.00	442.395.00	4.18	999.195.93	248.000	0.4789	12.36	0.0103	0.0166	0.27	0.0054	0.0015						
		106 Bengkulu Utara (K. Argamakmur)	1.068.152.00	469.259.00	2.28	860.109.94	345.455	0.4122	29.36	0.0109	0.0418	0.35	0.0075	0.0026						
		107 Kaur (K. Bintuhan)	87.447.96	0.00	0.00	191.831.50	103.834	0.0919	59.20	0.0000	0.0000	0.83	0.0023	0.0019						
		108 Seluma (K. Tals)	138.331.39	0.00	0.00	355.922.00	164.252	0.1706	59.20	0.0000	0.0000	0.69	0.0036	0.0025						

Lampiran 1: Hasil Perhitungan Tipologi Klaassen

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB /KAPITA (2000) Y1 (3) = (1) / (2)	PDRB TAHUN 2004 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2004	PDRB /KAPITA (2004) Y1 (6) = (4) / (5)	(Y ₁ -y ₂) ² (7)	(f ₁) ² (8)	V ₂₀₀₀ (1/Σ(Y ₁ -y ₂) ² · f ₁) / y ₂ (9)	(Y ₁ -y ₂) ² (10)	(f ₁) ² (11)	V ₂₀₀₄ (1/Σ(Y ₁ -y ₂) ² · f ₁) / y ₂ (12)
9	Jambi	Kabupaten	109 Muko-muko (K. Muko-Muko)	132,386.85	0.00	417,269.75	133,768	0.2000	59.20	0.0000	0.0000	0.64	0.0029	0.0019
			110 Lebong *) (K. Tubel)	166,646.84	0.00	579,420.70	91,725	0.2777	59.20	0.0000	0.0000	0.53	0.0020	0.0010
			111 Kepahiang *) (K. Kapahiang)	217,908.12	0.00	570,842.90	119,940	0.2736	59.20	0.0000	0.0000	0.53	0.0026	0.0014
			112 Bengkulu	1,234,825.00	279,753.00	1,499,177.00	266,898	0.7185	10.76	0.0065	0.0091	0.08	0.0058	0.0005
				623,592.68	1,562,085.00		1,610,270	0.31			0.324			0.123
			113 Kerinci (K. Sungaipenuh)	1,000,541.55	295,040.00	1,189,989.82	305,632	0.5703	18.52	0.0069	0.0166	0.19	0.0087	0.0012
			114 Merangin (K. Bangko)	690,389.00	254,203.00	809,361.09	275,096	0.3879	24.79	0.0059	0.0191	0.38	0.0080	0.0023
			115 Sarolangun (K. Sarolangun)	565,774.21	178,097.00	716,339.58	202,684	0.3433	19.41	0.0042	0.0105	0.43	0.0044	0.0019
			116 Batanghari (K. Muara Bulian)	637,928.27	190,636.00	797,491.98	217,858	0.3822	18.91	0.0044	0.0109	0.39	0.0048	0.0018
			117 Muaro Jambi (K. Sengit)	573,461.68	233,993.00	669,949.16	294,408	0.3211	27.50	0.0055	0.0195	0.46	0.0064	0.0030
10	Lampung	Kabupaten	Tanjung Jabung Timur (K. Muara Sabak)	667,998.84	191,556.00	809,533.91	204,142	0.3880	17.70	0.0045	0.0103	0.38	0.0045	0.0017
			Tanjung Jabung Barat (K. Kuala Tungkal)	1,115,908.08	206,730.00	1,356,846.32	232,847	0.6503	5.27	0.0048	0.0033	0.12	0.0051	0.0006
			120 Tebo (K. Muara Tebo)	533,591.43	222,232.00	632,347.43	236,344	0.3031	28.02	0.0052	0.0189	0.49	0.0052	0.0025
			121 Bungo (K. Muara Bungo)	684,065.19	217,172.00	814,044.04	240,637	0.3901	20.65	0.0051	0.0136	0.38	0.0053	0.0020
			122 Jambi	1,818,267.84	417,507.00	2,196,912.20	489,289	1.0529	11.15	0.0097	0.0141	0.00	0.0107	0.0000
				830,792.21	2,407,166.00		2,694,937	0.48			0.370			0.131
			123 Lampung Barat (K. Liwa)	1,124,367.25	366,484.00	1,302,385.53	397,877	0.6242	21.40	0.0085	0.0238	0.14	0.0087	0.0012
			124 Tanggamus (K. Kotaagung)	1,996,802.00	800,211.00	2,358,636.00	834,140	1.1304	27.03	0.0187	0.0656	0.02	0.0182	0.0003
			125 Lampung Selatan (K. Kalianda)	3,502,468.58	1,133,124.00	4,078,426.53	1,226,069	1.9547	21.19	0.0264	0.0728	0.91	0.0268	0.0242
			126 Lampung Timur (K. Sukadana)	2,417,003.54	869,428.00	2,833,716.00	927,642	1.3581	24.15	0.0203	0.0637	0.13	0.0202	0.0026
		Kota	127 Lampung Tengah (K. Gunung Sugih)	3,596,414.00	1,046,167.00	4,521,693.00	1,105,630	2.1671	18.12	0.0244	0.0575	1.36	0.0241	0.0326
			128 Lampung Utara (K. Kotabumi)	2,093,721.00	530,941.00	2,572,456.00	573,253	1.2329	14.07	0.0124	0.0226	0.05	0.0125	0.0007
			129 Way Kanen (K. Blambangan Umpu)	2,947,247.00	349,807.00	3,425,542.00	375,806	1.6418	0.53	0.0082	0.0006	0.41	0.0082	0.0033

Lampiran I: Hasil Perhitungan Tipologi Klaassen

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000	PDRB /KAPITA (2000)		PDRB TAHUN 2004 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2004	PDRB /KAPITA (2004)	$(Y_i - \bar{y})^2$		(f_i, n)	V_{2000}		$(Y_i - \bar{y})^2$		(f_i, n)	V_{2004}	
			(1)	(2)		Y_i	$(3) = (1) / (2)$				(4)	(5)		Y_i	$(6) = (4) / (5)$	(7)	(8)		(9)	(10)
		130 Tulang Bawang (K. Menggala)	863,575.00	691,822.00		1.25	1,039,381.00	758,395	0.4981	41.55	0.0161		0.0872	0.25	0.0166					
	Kota	131 Bandar Lampung	3,711,760.00	742,749.00		5.00	4,592,918.60	830,386	2.2012	7.27	0.0173		0.0164	1.44	0.0181				0.0042	
		132 Metro	325,158.00	118,448.00		2.75	392,766.00	132,563	0.1882	24.49	0.0028		0.0088	0.66	0.0029				0.0280	
			2,257,851.64	6,548,181.00		3.62		7,161,671	1.30										0.0019	
			1,682,168.77	42,864,244.59		2.69	2,086,517.80	45,815,086.00	1.00						0.647				0.311	

Lampiran 2: Hasil Perhitungan Indeks Williamson

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000		PDRB /KAPITA (2000)		PDRB TAHUN 2004 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2004		PDRB /KAPITA (2004)		$(Y_t - \bar{y})^2$		$V_{t=2000} \left(\frac{1}{N} \sum (Y_t - \bar{y})^2 \cdot f_{t(n)} / Y_t \right)$		$(Y_t - \bar{y})^2$		$V_{t=2004} \left(\frac{1}{N} \sum (Y_t - \bar{y})^2 \cdot f_{t(n)} / Y_t \right)$		$(Y_t - \bar{y})^2$		$V_{t=2004} \left(\frac{1}{N} \sum (Y_t - \bar{y})^2 \cdot f_{t(n)} / Y_t \right)$	
			(1)	(2)	(3) = (1) / (2)	(4)	(5)	(6) = (4) / (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	DI Aceh	Kabupaten	161.563.67	51.109.00	3.16	183.683.33	69.031	0.0880	20.55	0.0012	0.0032	0.84	0.0015	0.0013												
		1 Simaule (K. Sinabang)	429.201.32	99.231.00	4.30	473.296.32	137.236	0.2268	11.56	0.0023	0.0035	0.60	0.0030	0.0018												
		2 Aceh Singkil (K. Singkil)	840.171.98	176.796.00	4.75	1.016.790.52	183.785	0.4873	8.66	0.0041	0.0046	0.27	0.0040	0.0011												
		3 Aceh Selatan (K. Tapak Tuan)	305.254.12	199.822.00	1.53	374.787.29	162.784	0.1796	38.03	0.0047	0.0230	0.88	0.0036	0.0024												
		4 Aceh Tenggara (K. Kulacane)	1.411.377.29	525.226.00	2.69	1.877.644.39	298.218	0.8999	25.07	0.0123	0.0399	0.01	0.0065	0.0001												
		5 Aceh Timur (K. Langsa)	720.013.31	182.735.00	3.94	788.172.65	153.007	0.3777	14.09	0.0043	0.0078	0.39	0.0033	0.0013												
		6 Aceh Tengah (K. Takengon)	715.621.28	178.899.00	4.00	819.413.79	157.452	0.3927	13.65	0.0042	0.0074	0.37	0.0034	0.0013												
		7 Aceh Barat (K. Meulaboh)	1.427.268.63	38.376.00	37.19	1.568.244.73	287.792	0.7516	870.12	0.0009	0.1012	0.06	0.0065	0.0004												
		8 Aceh Besar (K. Jantho)	1.587.626.12	199.423.91	7.96	1.780.320.32	458.675	0.8532	0.07	0.0047	0.0000	0.02	0.0100	0.0002												
		9 Pidie (K. Singli)	1.871.823.67	10.830.00	173.00	2.112.928.25	341.373	1.0127	27.324.84	0.0003	0.8964	0.00	0.0075	0.0000												
		10 Bireun (K. Bireun)	2.756.572.81	93.477.00	29.49	2.867.821.60	444.861	1.3745	475.02	0.0022	0.1346	0.14	0.0097	0.0013												
		11 Aceh Utara (K. Lhosokun)	481.621.96	47.478.70	10.14	778.845.89	109.201	0.3733	6.00	0.0011	0.0009	0.40	0.0024	0.0009												
		12 Aceh Barat Daya (K. Blangpidie)	301.667.47	29.569.57	10.20	335.337.17	68.010	0.1607	6.29	0.0007	0.0006	0.71	0.0015	0.0010												
		13 Gayo Lues (K. Blang Kejeran)	1.059.410.99	97.799.13	10.83	1.185.825.67	224.938	0.5683	9.85	0.0023	0.0029	0.19	0.0048	0.0009												
		14 Aceh Tamiang (K. Kuala Simpang)	446.687.84	47.492.17	9.41	488.711.16	109.232	0.2381	2.93	0.0011	0.0004	0.58	0.0024	0.0014												
		15 Nagan Raya (K. Jeuram)	281.303.34	30.179.57	9.32	324.658.23	69.413	0.1556	2.65	0.0007	0.0002	0.72	0.0015	0.0011												
		16 Aceh Jaya (K. Calang)	555.814.85	86.799.07	6.40	540.275.84	92.875	0.2589	1.67	0.0020	0.0004	0.55	0.0020	0.0011												
		17 Bener Meriah (K. Simpang Tiga Redelong)	1.201.596.38	154.767.00	7.76	1.406.307.33	230.774	0.6740	0.00	0.0036	0.0000	0.11	0.0050	0.0005												
		18 Banda Aceh	210.985.65	23.464.00	8.99	259.966.64	28.528	0.1246	1.68	0.0005	0.0001	0.77	0.0006	0.0004												
		19 Sabang	974.868.48	54.489.57	17.89	1.127.576.64	125.326	0.5404	103.97	0.0013	0.0172	0.21	0.0027	0.0006												
		20 Langsa	1.418.145.88	80.338.70	23.50	1.599.685.56	138.779	0.7667	249.92	0.0014	0.0457	0.06	0.0030	0.0002												
		21 Lhoksumawe	912.173.67	2.388.292.37	18.40	3.859.290.00	0.50	0.50			1.136			0.139												
		22 Nias (K. Gunung Siliti)	1.225.995.93	683.416.00	1.79	1.610.722.31	433.688	0.7720	34.82	0.0159	0.0721	0.05	0.0095	0.0005												
2	Sumatera Utara	Kabupaten																								

Lampiran 1

Lampiran 2: Hasil Perhitungan Indeks Williamson

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000		PDRB /KAPITA (2000)		PDRB TAHUN 2004 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2004		PDRB /KAPITA (2004)		$(Y_t - \bar{Y})^2$		$V_{2000} = \frac{1}{n} \sum (Y_t - \bar{Y})^2$		$(Y_t - \bar{Y})^2$		$V_{2004} = \frac{1}{n} \sum (Y_t - \bar{Y})^2$		$(f_{2004} - \bar{f}_{2004})^2$		$V_{2004} = \frac{1}{n} \sum (f_{2004} - \bar{f}_{2004})^2$	
			(1)	(2)	(3) = (1) / (2)	(4)	(5)	Y _t	(6) = (4) / (5)	Y _t	(7)	(8)	Y _t	(9)	$\frac{1}{n} \sum (Y_t - \bar{Y})^2$	$\frac{1}{n} \sum (f_{2004} - \bar{f}_{2004})^2$										
		23 Mandailing (K. Penyabungan)	1.123.617,37	359.849,00	3,12	1.406.579,52	385,611	0,6756	20,90	0,0084	0,11	0,0084	0,0009													
		24 Tapanuli Selatan (K. Padang Sidempuan)	1.927.815,06	734.188,00	2,63	2.500.236,83	619,223	1,1983	25,69	0,0171	0,04	0,0135	0,0005													
		25 Tapanuli Tengah (K. Sibolga)	678.002,14	244.673,00	2,77	849.061,22	286,659	0,4069	24,24	0,0057	0,0180	0,35	0,0063	0,0022												
		26 Tapanuli Utara (K. Tarutung)	972.481,03	407.710,00	2,39	1.160.282,30	267,411	0,5561	28,19	0,0095	0,0348	0,20	0,0058	0,0012												
		27 Toba Samosir (K. Balige)	829.175,55	304.125,00	2,73	1.285.571,31	173,661	0,6161	24,68	0,0071	0,0228	0,15	0,0038	0,0006												
		28 Labuhan Batu (K. Rantau Prapat)	5.665.018,40	844.089,00	6,71	6.712.587,75	955,713	3,2171	0,97	0,0197	0,0025	4,90	0,0209	0,1020												
		29 Asahan (K. Kisaran)	7.952.266,26	935.653,00	8,51	9.484.024,52	1.028,472	4,5454	0,67	0,0218	0,0019	12,55	0,0224	0,2810												
		30 Simalungun (Pematang Siantar)	3.777.638,15	855.783,00	4,41	4.244.811,16	830,745	2,0344	10,76	0,0200	0,0279	1,06	0,0181	0,0192												
		31 Dairi (K. Sidikalang)	1.258.984,11	292.824,00	4,30	1.489.866,75	246,873	0,7140	11,53	0,0068	0,0102	0,08	0,0054	0,0004												
		32 Karo (K. Kabanjahe)	1.998.038,16	283.713,00	7,04	2.357.093,33	324,001	1,1297	0,42	0,0066	0,0004	0,02	0,0071	0,0001												
		33 Deli Serdang (K. Lubukpakam)	8.796.154,85	1.959.258,00	4,49	10.345.046,20	1.416,168	4,9580	10,27	0,0457	0,0610	15,64	0,0309	0,4823												
		34 Langkat (K. Subat)	4.144.789,71	902.896,00	4,59	4.989.366,80	971,282	2,3912	9,64	0,0211	0,0264	1,93	0,0212	0,0408												
		35 Nias Selatan (K. Teluk Dalam)	769.535,58	120.201,30	6,40	1.032.960,57	276,463	0,4951	1,87	0,0028	0,0006	0,26	0,0060	0,0016												
		36 Humbang Hasundutan (K. Dolog Sanggul)	591.235,34	70.483,04	8,39	715.993,96	162,111	0,3432	0,48	0,0016	0,0001	0,44	0,0035	0,0015												
		37 Pakpak Barat (K. Salak)	93.670,57	15.471,30	6,05	116.721,37	35,584	0,0574	2,69	0,0004	0,0001	0,89	0,0008	0,0007												
		38 Samosir (K. Pengururan)	554.227,12	54.410,87	10,19	823.407,76	125,145	0,3946	6,21	0,0013	0,0010	0,37	0,0027	0,0010												
		39 Serdang Begadai (K. Sei Rempah)	2.387.488,30	285.580,87	8,36	3.124.767,44	656,936	1,4976	0,44	0,0067	0,0004	0,24	0,0143	0,0035												
	Kota	40 Sibolga	449.017,75	81.699,00	5,50	539.968,80	89,627	0,2588	4,83	0,0019	0,0012	0,55	0,0020	0,0011												
		41 Tanjung Balai	884.853,52	132.385,00	6,68	1.097.489,12	146,143	0,5260	1,02	0,0031	0,0004	0,23	0,0033	0,0007												
		42 Pematang Siantar	1.335.834,84	241.480,00	5,53	1.561.947,58	229,011	0,7486	4,68	0,0056	0,0034	0,06	0,0050	0,0003												
		43 Tebing Tinggi	689.985,43	124.979,00	5,52	839.631,12	138,377	0,4024	4,72	0,0029	0,0018	0,36	0,0030	0,0011												
		44 Medan	18.956.579,54	1.904.273,00	9,95	23.600.002,95	2.122,579	11,3107	5,11	0,0444	0,0295	106,25	0,0463	4,9094												
		45 Binjai	1.112.564,85	213.725,00	5,21	1.360.506,32	227,478	0,6520	6,19	0,0050	0,0040	0,12	0,0050	0,0006												

Lampiran 2

Lampiran 2: Hasil Perhitungan Indeks Williamson

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000		PDRB /KAPITA (2000)		PDRB TAHUN 2004 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2004		PDRB /KAPITA (2004)		$(Y_t - \bar{Y})^2$		$V_{2000} = \frac{1}{n} \sum (Y_t - \bar{Y})^2$		$(f_t - \bar{f})^2$		$V_{2004} = \frac{1}{n} \sum (f_t - \bar{f})^2$	
			(1)	(2)	(3) = (1) / (2)	(4)	(5)	(6) = (4) / (5)	(7)	(8)	(9)	(10)										
3	Sumatera Barat	Kabupaten	46	Padang Sidiempuan	570.476.12	79.178.70	7.20	669.503.30	182.111	0.3209	0.0018	0.0001	0.46	0.0040	0.0018	2.420						
			47	Kepulauan Mentawai (K. Tua Pejat)	2.750.217.34	12.132.134.09	5.62	414.890.96	66.076	0.1988	4.35	0.0014	0.0008	0.65	0.0014	0.0009						
			48	Pesisir Selatan (K. Paman)	1.314.787.23	391.347.00	3.36	1.546.853.85	411.249	0.7414	18.79	0.0091	0.0223	0.07	0.0090	0.0006						
			49	Solok (K. Solok)	1.267.474.34	438.975.00	2.89	1.518.886.03	341.702	0.7280	23.11	0.0102	0.0308	0.08	0.0075	0.0006						
			50	Sawah Lunto - Sijunjung (K. Muaro Sijunjung)	806.120.06	307.810.00	2.62	971.540.46	181.047	0.4656	25.76	0.0072	0.0240	0.29	0.0040	0.0011						
			51	Tanah Datar (K. Batu Sangkar)	1.565.606.18	327.114.00	4.79	1.863.489.97	341.863	0.8931	8.46	0.0076	0.0084	0.01	0.0075	0.0001						
			52	Padang Pariaman (K. Pariaman)	1.496.702.06	432.790.00	3.46	1.794.952.82	380.683	0.8603	17.94	0.0101	0.0235	0.02	0.0083	0.0002						
			53	Agam (K. Lubukbasung)	1.800.687.85	414.972.00	4.34	2.190.890.17	437.831	1.0500	11.26	0.0097	0.0142	0.00	0.0096	0.0000						
			54	Lima Puluh Kota (K. Payakumbuh)	1.668.525.43	314.773.00	5.35	2.009.422.02	329.337	0.9631	5.49	0.0073	0.0052	0.00	0.0072	0.0000						
			55	Pasaman (Lubuksikaping)	813.424.97	513.674.00	1.58	968.005.45	242.789	0.4639	37.34	0.0120	0.0582	0.29	0.0053	0.0015						
4	Sumatera Selatan	Kabupaten	56	Solok Selatan (K. Padang Aro)	380.146.40	57.097.39	6.66	460.185.49	131.324	0.2206	1.07	0.0013	0.0002	0.61	0.0029	0.0017						
			57	Dharmas Raya (K. Pulau Punjung)	666.410.85	70.285.22	9.48	799.311.30	161.656	0.3831	3.19	0.0016	0.0007	0.38	0.0035	0.0014						
			58	Pasaman Barat (K. Simpang Empat)	1.499.901.59	139.373.48	10.76	1.857.612.80	320.559	0.8903	9.41	0.0033	0.0040	0.01	0.0070	0.0001						
			59	Padang	7.065.516.84	713.242.00	9.91	8.653.176.04	774.748	4.1472	4.89	0.0166	0.0106	9.89	0.0169	0.1668						
			60	Solok	311.055.34	48.120.00	6.46	372.384.61	52.776	0.1785	1.51	0.0011	0.0002	0.68	0.0012	0.0008						
			61	Sawah Lunto	438.290.11	50.868.00	8.62	436.708.12	53.215	0.2093	0.85	0.0012	0.0001	0.63	0.0012	0.0007						
			62	Padang Panjang	245.888.38	40.139.00	6.13	294.282.03	43.127	0.1410	2.46	0.0009	0.0003	0.74	0.0009	0.0007						
			63	Bukit Tinggi	590.581.31	91.983.00	6.42	719.853.35	96.185	0.3450	1.62	0.0021	0.0005	0.43	0.0021	0.0009						
			64	Payakumbuh	504.499.12	97.901.00	5.15	609.222.96	105.005	0.2920	6.46	0.0023	0.0019	0.51	0.0023	0.0012						
			65	Pariaman	444.014.23	33.134.78	13.40	536.603.87	76.210	0.2572	32.56	0.0008	0.0033	0.56	0.0017	0.0009						
			66	OKU (K. Baturaja)	1.222.171.34	4.541.495.87	6.16	1.602.944.00	262.097	0.71	42.56	0.0271	0.1496	0.05	0.0057	0.0003						

Lampiran 2: Hasil Perhitungan Indeks Williamson

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000		PDRB /KAPITA (2000)		PDRB TAHUN 2004 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2004		PDRB /KAPITA (2004)		$(Y_t - \bar{Y})^2$		V_{2000}		$(Y_t - \bar{Y})^2 \cdot f_{t,n}$		V_{2004}	
			(1)	(2)	(3) = (1) / (2)	(4)	(5)	(6) = (4) / (5)	(7)	(8)	(9)	(10)										
		67 OKI (K. Kayuagung)	1,980,575.00	976,176.00	2.03	2,384,139.00	656,828	1.1426	32.10	0.0228	0.0950	0.02	0.0143	0.0003								
		68 Muara Enim (K. Muara Enim)	3,234,809.00	717,741.00	4.51	3,798,041.00	641,204	1.8203	10.16	0.0167	0.0221	0.67	0.0140	0.0093								
		69 Lahat (K. Lahat)	1,989,438.00	670,128.00	2.97	2,350,352.00	570,557	1.1264	22.33	0.0156	0.0454	0.02	0.0125	0.0002								
		70 Musi Rawas (K. Lubuk Linggau)	1,373,520.00	641,836.00	2.14	1,678,737.00	477,598	0.8046	30.85	0.0150	0.0600	0.04	0.0104	0.0004								
		71 Muba (K. Sekayu)	2,504,138.00	1,240,407.00	2.02	3,174,910.00	474,212	1.5216	32.21	0.0289	0.1211	0.27	0.0104	0.0028								
		72 Banyuwasin (K. Pangkalan Balai)	2,281,153.09	296,125.22	7.70	3,602,704.83	681,088	1.7267	0.00	0.0069	0.0000	0.52	0.0149	0.0078								
		73 OKUS (K. Muaradua)	774,225.00	143,067.39	5.41	904,980.00	329,055	0.4337	5.21	0.0033	0.0023	0.32	0.0072	0.0023								
		74 OKUT (K. Mantapura)	1,388,669.00	244,430.00	5.68	1,678,262.00	562,189	0.8043	4.05	0.0057	0.0030	0.04	0.0123	0.0005								
		75 Ogan Ilir (K. Indralaya)	1,109,682.00	155,210.00	7.15	1,348,667.00	356,983	0.6464	0.30	0.0036	0.0001	0.13	0.0078	0.0010								
	Kota	76 Palembang	8,041,520.00	1,451,419.00	5.54	10,143,275.00	1,357,866	4.8613	4.64	0.0339	0.0204	14.89	0.0296	0.4401								
		77 Prabumulih	584,323.00	58,767.83	9.94	711,084.00	135,212	0.3408	5.04	0.0014	0.0009	0.44	0.0030	0.0013								
		78 Pagar Alam	426,455.00	50,986.09	8.36	478,991.00	117,268	0.2296	0.45	0.0012	0.0001	0.60	0.0026	0.0015								
		79 Lubuk Linggau	646,134.00	76,535.65	8.44	794,404.00	176,032	0.3807	0.56	0.0018	0.0001	0.39	0.0038	0.0015								
			1,978,035.86	7,882,518.17	5.22		6,798,189.00	1.19			0.721	0.03		0.685								
5	Riau	Kabupaten	1,479,177.19	216,732.00	6.82	1,944,575.67	243,772	0.9319	0.76	0.0051	0.0005	0.01	0.0053	0.0000								
		81 Indragiri Hulu (K. Rengat)	1,885,669.68	247,306.00	8.03	2,640,118.96	295,998	1.2655	0.11	0.0058	0.0001	0.07	0.0065	0.0004								
		82 Indragiri Hilir (K. Tembilahan)	3,274,494.71	555,701.00	5.89	4,335,963.66	624,359	2.0761	3.25	0.0130	0.0055	1.16	0.0136	0.0157								
		83 Pelalawan (K. Pangkalan Kincir)	1,586,244.28	152,949.00	10.37	2,050,712.95	270,836	0.9828	7.16	0.0036	0.0033	0.00	0.0048	0.0000								
		84 Siak (Siak Seindrapura)	1,887,883.77	238,786.00	7.91	2,478,750.37	292,144	1.1880	0.04	0.0056	0.0000	0.03	0.0064	0.0002								
		85 Kampar (K. Bangkinan)	2,295,057.50	447,157.00	5.13	3,022,420.46	532,236	1.4485	6.56	0.0104	0.0089	0.20	0.0116	0.0023								
		86 Rokan Hulu (K. Pasir Pengara)	1,169,726.26	265,686.00	4.40	1,535,724.27	340,701	0.7360	10.84	0.0062	0.0087	0.07	0.0074	0.0005								
		87 Bengkalis (K. Bengkalis)	2,337,937.81	520,241.00	4.49	3,126,467.10	637,163	1.4984	10.24	0.0121	0.0162	0.25	0.0139	0.0034								
		88 Rokan Hilir (K. Ujung Tanjung)	1,970,734.87	352,299.00	5.59	2,625,136.50	440,904	1.2581	4.41	0.0082	0.0047	0.07	0.0096	0.0006								

Lampiran 2: Hasil Perhitungan Indeks Williamson

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000	PDRB /KAPITA (2000)		PDRB TAHUN 2004 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2004	PDRB /KAPITA (2004)		$(Y_t - \bar{Y})^2$		$V_{t=2000}$	$(Y_t - \bar{Y})^2$		$V_{t=2004}$	$f_{t,n}$		$V_{t=2004}$
			(1)	(2)	(3) = (1) / (2)	Y _t	(4)	(5)	(6) = (4) / (5)	(7)	(8)	(9)	(10)								
6	Kepulauan Riau	Kota	3.461.454,85	585.440,00	5,91	4.970.924,32	702.717	2.3824	3,17	0,0137	0,0056	1,90	0,0153	0,0291							
			947.166,36	173.188,00	5,47	1.271.000,33	215.761	0,6091	4,95	0,0040	0,0026	0,15	0,0047	0,0007							
			2.035.958,84	3.755.485,00	6,37		4.546.591,00	1,31			0,237		0,230								
			1.200.170,60	319.482,00	3,76	1.428.306,74	113.267	0,6845	15,51	0,0075	0,0150	0,10	0,0025	0,0002							
		Kabupaten	1.133.878,52	164.770,00	6,88	1.432.777,90	187.457	0,6867	0,66	0,0038	0,0003	0,10	0,0041	0,0004							
			431.507,15	78.081,00	5,53	550.360,81	87.354	0,2638	4,70	0,0018	0,0011	0,55	0,0019	0,0010							
			324.713,73	33.512,17	9,69	411.388,65	77.078	0,1972	3,98	0,0008	0,0004	0,65	0,0017	0,0011							
			15.994.099,35	437.358,00	36,57	21.184.391,79	572.452	10,1434	833,79	0,0102	1,1057	83,55	0,0125	1,0411							
	Kota	Kabupaten	1.287.526,28	59.964,35	18,40	1.683.899,07	160.918	0,8070	114,67	0,0016	0,0243	0,04	0,0035	0,0001							
			3.395.315,94	1.103.167,52	13,47		1.198.626	2,13			1,071		1,022								
			916.537,89	101.024,35	9,07	1.182.197,12	232.356	0,5666	1,90	0,0024	0,0006	0,19	0,0051	0,0010							
			704.519,23	59.326,52	11,88	859.329,69	136.451	0,4118	17,48	0,0014	0,0031	0,35	0,0030	0,0010							
		Kabupaten	1.471.469,02	61.023,91	24,11	1.712.229,98	140.355	0,8206	269,57	0,0014	0,0499	0,03	0,0031	0,0001							
			768.135,94	56.527,39	13,59	928.236,22	130.013	0,4449	34,74	0,0013	0,0060	0,31	0,0028	0,0009							
			699.027,58	64.857,83	10,78	942.901,37	149.173	0,4039	9,51	0,0015	0,0019	0,36	0,0033	0,0012							
			482.390,43	38.236,52	12,62	855.508,89	87.944	0,4100	24,22	0,0009	0,0028	0,35	0,0019	0,0007							
	Kota	Kabupaten	666.967,30	61.723,04	10,81	847.519,96	141.963	0,4062	9,68	0,0014	0,0018	0,36	0,0031	0,0011							
			816.578,20	442.719,57	13,26		1.018.255,00	0,49			0,257		0,077								
			718.017,00	370.678,00	1,94	422.647,35	136.399	0,2026	33,15	0,0086	0,0373	0,64	0,0030	0,0019							
			1.848.619,00	442.395,00	4,18	999.195,93	248.000	0,4789	12,36	0,0103	0,0168	0,27	0,0054	0,0015							
		Kabupaten	1.068.152,00	469.259,00	2,28	860.109,94	345.455	0,4122	29,36	0,0109	0,0418	0,35	0,0075	0,0026							
			87.447,96	0,00	0,00	191.831,50	103.834	0,0919	59,20	0,0000	0,0000	0,83	0,0023	0,0019							
			138.331,39	0,00	0,00	355.922,00	164.252	0,1706	59,20	0,0000	0,0000	0,69	0,0036	0,0025							

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PORB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000	PORB /KAPITA (2000)		PORB TAHUN 2004 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2004	PDRB /KAPITA (2004)	$(Y_t - \bar{y})^2$	$(f_{t,n})$	V_{2000}	$(Y_t - \bar{y})^2$	$(f_{t,n})$	V_{2004}	$(\sum(Y_t - \bar{y})^2 \cdot f_{t,n})$	$(\sum(Y_t - \bar{y})^2 \cdot f_{t,n})$
			(1)	(2)		(3) = (1) / (2)	(4)											
9	Jambi	Kabupaten	109	Muko-muko (K. Muko-Muko)	132,386.85	0.00	0.00	417,269.75	133,768	0.2000	59.20	0.0000	0.0000	0.64	0.0029	0.0019		
			110	Leborg *) (K. Tubei)	166,646.84	0.00	0.00	579,420.70	91,725	0.2777	59.20	0.0000	0.0000	0.53	0.0020	0.0010		
			111	Kepahiang *) (K. Kapahiang)	217,908.12	0.00	0.00	570,842.90	119,940	0.2736	59.20	0.0000	0.0000	0.53	0.0026	0.0014		
			112	Bengkulu	1,234,825.00	279,753.00	4.41	1,459,177.00	266,898	0.7185	10.76	0.0065	0.0091	0.06	0.0058	0.0005		
					633,592.68	1,662,085.00	1.42		1,610,270	0.31			0.324					0.123
			113	Kerinci (K. Sungaipenuh)	1,900,541.55	285,040.00	3.39	1,189,988.82	305,632	0.5703	18.52	0.0069	0.0166	0.19	0.0067	0.0012		
			114	Merangin (K. Bangko)	530,369.00	254,203.00	2.72	809,361.09	275,096	0.3879	24.79	0.0059	0.0191	0.36	0.0060	0.0023		
			115	Sarolangun (K. Sarolangun)	585,714.21	178,097.00	3.29	716,339.58	202,984	0.3433	19.41	0.0042	0.0105	0.43	0.0044	0.0019		
			116	Balinghari (K. Muara Bulian)	637,928.27	190,336.00	3.35	797,491.98	217,858	0.3822	18.91	0.0044	0.0109	0.39	0.0048	0.0018		
			117	Muaro Jambi (K. Sengit)	573,461.68	233,993.00	2.45	669,949.16	294,408	0.3211	27.50	0.0055	0.0195	0.46	0.0084	0.0030		
			118	Tanjung Jabung Timur (K. Muara Sabak)	687,998.84	191,556.00	3.49	809,533.91	204,142	0.3680	17.70	0.0045	0.0103	0.38	0.0045	0.0017		
			119	Tanjung Jabung Barat (K. Kuala Tungkal)	1,115,906.08	206,750.00	5.40	1,356,846.32	232,847	0.6503	5.27	0.0048	0.0033	0.12	0.0051	0.0006		
10	Lampung	Kabupaten	120	Tebo (K. Muara Tebo)	533,591.43	222,232.00	2.40	632,347.43	236,344	0.3031	28.02	0.0052	0.0189	0.49	0.0052	0.0025		
			121	Bungo (K. Muara Bungo)	684,085.19	217,172.00	3.15	814,044.04	240,637	0.3901	20.65	0.0051	0.0136	0.38	0.0053	0.0020		
			122	Jambi	1,818,267.84	417,507.00	4.36	2,196,912.20	489,289	1.0529	11.15	0.0097	0.0141	0.00	0.0107	0.0000		
					830,792.21	2,407,166.00	3.40		2,698,937	0.48			0.370				0.131	
			123	Lampung Barat (K. Lwa)	1,124,367.25	366,484.00	3.07	1,302,388.53	397,877	0.8242	21.40	0.0085	0.0238	0.14	0.0387	0.0012		
			124	Tanggamus (K. Kotagagung)	1,996,802.00	800,211.00	2.50	2,358,636.00	634,110	1.1304	27.03	0.0187	0.0656	0.02	0.0182	0.0003		
			125	Lampung Selatan (K. Kallanda)	3,502,468.58	1,133,124.00	3.09	4,078,426.53	1,226,009	1.9547	21.19	0.0264	0.0728	0.91	0.0268	0.0242		
			126	Lampung Timur (K. Sukadana)	2,417,003.54	869,428.00	2.78	2,833,716.00	927,642	1.3581	24.15	0.0203	0.0637	0.13	0.0202	0.0026		
			127	Lampung Tengah (K. Gunung Sugih)	3,596,414.00	1,046,167.00	3.44	4,521,693.00	1,105,630	2.1671	18.12	0.0244	0.0575	1.36	0.0241	0.0326		
			128	Lampung Utara (K. Kotabumi)	2,093,721.00	530,941.00	3.94	2,572,456.00	573,253	1.2329	14.07	0.0124	0.0226	0.05	0.0125	0.0007		
			129	Way Kanan (K. Blambangan Umpu)	2,947,247.00	349,807.00	8.43	3,435,542.00	375,806	1.6418	0.53	0.0082	0.0006	0.41	0.0082	0.0033		

Lampiran 2: Hasil Perhitungan Indeks Williamson

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	PDRB TAHUN 2000 (JUTA)		JML PDDK TAHUN 2000		PDRB /KAPITA (2000)		PDRB TAHUN 2004 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2004	PDRB /KAPITA (2004)		$(Y_i - \bar{y})^2$	$(f_{i,n})$	$V_{n,2000}$	$(Y_i - \bar{y})^2$	$(f_{i,n})$	$V_{n,2004}$
			(1)	(2)	(3) = (1) / (2)	Yi	(4) = (3) / (5)	(5)			(6) = (4) / (5)	(7)						
		130 Tulang Bawang (K. Menggala)	863,575.00	691,822.00	1.25	1,039,361.00	758,365	0.4981	41.55	0.0161	0.0872	0.25	0.0166					
	Kota	131 Bandar Lampung	3,711,760.00	742,749.00	5.00	4,592,918.60	830,366	2.2012	7.27	0.0173	0.0164	1.44	0.0181					0.0260
		132 Metro	325,158.00	118,448.00	2.75	392,766.00	132,563	0.1882	24.49	0.0028	0.0088	0.66	0.0029					0.0019
			2,257,851.64	6,649,181.00	3.62		7,161,671	1.30										0.311
			1,682,168.77	42,864,244.59	7.69	2,086,517.80	45,815,086.00	1.00										

Lampiran 3: Hasil Perhitungan Indeks entropi Theil Tahun 2000

No	Propinsi	Kabupaten/Kota		PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (YJ)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung	
				(1)	(2)					
1	DI Aceh	Kabupaten	1	Simaule (K. Sinabang)	161,563.67	51,109.00	3.16	-0.303	-0.366	1
			2	Aceh Singkil (K. Singkil)	426,201.32	99,231.00	4.30	-0.340	-0.331	1
			3	Aceh Selatan (K. Tapak Tuan)	840,171.98	176,796.00	4.75	-0.350	-0.305	1
			4	Aceh Tenggara (K. Kutacane)	305,254.12	199,822.00	1.53	-0.207	-0.318	1
			5	Aceh Timur (K. Langsa)	1,411,377.29	525,226.00	2.69	-0.281	-0.367	1
			6	Aceh Tengah (K. Takengon)	720,013.31	182,735.00	3.94	-0.330	-0.346	1
			7	Aceh Barat (K. Meulaboh)	715,621.28	178,899.00	4.00	-0.332	-0.344	1
			8	Aceh Besar (K. Jantho)	1,427,288.63	38,376.00	37.19	1.422	7.336	1
			9	Pidie (K. Singli)	1,587,626.12	199,423.91	7.96	-0.362	0.011	1
			10	Bireun (K. Bireun)	1,871,823.67	10,820.00	173.00	21.084	67.903	1
			11	Aceh Utara (K. Lhosukon)	2,756,572.81	93,477.00	29.49	0.756	4.947	1
			12	Aceh Barat Daya (K. Blangpidie)	481,621.96	47,478.70	10.14	-0.328	0.327	1
			13	Gayo Lues (K. Blang Kejeren)	301,697.47	29,569.57	10.20	-0.327	0.336	1
			14	Aceh Tamiang (K. Kualasimpang)	1,059,410.99	97,799.13	10.83	-0.312	0.439	1
			15	Nagan Raya (K. Jeuram)	446,687.84	47,492.17	9.41	-0.343	0.213	1
			16	Aceh Jaya (K. Caiang)	281,303.34	30,179.57	9.32	-0.345	0.200	1
			17	Bener Meriah (K. Simpang Tiga Redelong)	555,814.85	86,799.07	6.40	-0.367	-0.168	1
		Kota	18	Banda Aceh	1,201,596.38	154,767.00	7.76	-0.364	-0.014	1
			19	Sabang	210,985.65	23,464.00	8.99	-0.350	0.152	1
			20	Langsa	974,868.48	54,489.57	17.89	-0.027	1.866	1
			21	Lhoksumawe	1,418,145.88	60,338.70	23.50	0.312	3.266	1
					912,173.67	113,728.21	18.40	0.871		0
					19,155,647.01	2,388,292.37				0
2	Sumatera Utara	Kabupaten	22	Nias (K. Gunung Sitoli)	1,225,995.83	683,416.00	1.79	-0.365	-0.337	1
			23	Mandailing (K. Penyabungan)	1,123,617.37	359,849.00	3.12	-0.326	-0.367	1
			24	Tapanuli Selatan (K. Padang Sidempuan)	1,927,815.06	734,188.00	2.63	-0.356	-0.366	1
			25	Tapanuli Tengah (K. Sibolga)	678,002.14	244,673.00	2.77	-0.349	-0.368	1
			26	Tapanuli Utara (K. Tarutung)	972,481.03	407,710.00	2.39	-0.364	-0.362	1
			27	Toba Samosir (K. Balige)	829,175.55	304,125.00	2.73	-0.351	-0.367	1
			28	Labuhan Batu (K. Rantau Prapat)	5,665,018.40	844,089.00	6.71	0.212	-0.136	1
			29	Asahan (K. Kisaran)	7,962,266.28	935,653.00	8.51	0.629	0.084	1
			30	Simalungun (Pematang Siantar)	3,777,626.15	855,783.00	4.41	-0.190	-0.324	1

Lampiran 3: Hasil Perhitungan Indeks entropi Theil Tahun 2000

No	Propinsi	Kabupaten/Kota		PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (Y)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung	
				(1)	(2)					
		31	Dairi (K. Sidikalang)	1,258,984.11	292,824.00	4.30	-0.205	-0.330	1	
		32	Karo (K. Kabanjahe)	1,998,038.16	283,713.00	7.04	0.283	-0.100	1	
		33	Deli Serdang (K. Lubukpakam)	8,796,154.85	1,959,258.00	4.49	-0.179	-0.320	1	
		34	Langkat (K. Stabat)	4,144,789.71	902,986.00	4.59	-0.165	-0.315	1	
		35	Nias Selatan (K. Teluk Dalam)	769,535.58	120,201.30	6.40	0.149	-0.168	1	
		36	Humbang Hasundutan (K. Dolog Sanggul)	591,235.34	70,483.04	8.39	0.598	0.068	1	
		37	Pakpak Barat (K. Salak)	93,670.57	15,471.30	6.05	0.080	-0.202	1	
		38	Samosir (K. Pengururan)	554,227.12	54,410.87	10.19	1.078	0.333	1	
		39	Serdang Begadai (K. Sei Rempah)	2,387,488.30	285,580.87	8.36	0.591	0.064	1	
	Kota	40	Sibolga	449,017.75	81,699.00	5.50	-0.022	-0.251	1	
		41	Tanjung Balai	884,853.52	132,385.00	6.68	0.206	-0.139	1	
		42	Pematang Siantar	1,335,834.84	241,480.00	5.53	-0.015	-0.248	1	
		43	Tebing Tinggi	689,985.43	124,979.00	5.52	-0.017	-0.249	1	
		44	Medan	18,956,579.54	1,904,273.00	9.95	1.013	0.297	1	
		45	Binjai	1,112,564.85	213,725.00	5.21	-0.071	-0.274	1	
		46	Padang Sidempuan	570,476.12	79,178.70	7.20	0.319	-0.081	1	
	Rata-Rata			2,750,217.34	485,285.36	5.62	0.087		0	
				68,755,433.59	12,132,134.09				0	
3	Sumatera Barat	Kabupaten	47	Kepulauan Mentawai (K. Tua Pejat)	341,623.23	60,897.00	5.61	-0.085	-0.241	1
			48	Pesisir Selatan (K. Painan)	1,314,787.23	391,347.00	3.36	-0.331	-0.363	1
			49	Solok (K. Solok)	1,267,474.34	438,975.00	2.89	-0.355	-0.368	1
			50	Sawah Lunto - Sijunjung (K. Muaro Sijunjung)	806,120.06	307,810.00	2.62	-0.364	-0.366	1
			51	Tanah Datar (K. Batu Sangkar)	1,565,606.18	327,114.00	4.79	-0.196	-0.303	1
			52	Padang Pariaman (K. Pariaman)	1,496,702.06	432,790.00	3.46	-0.324	-0.361	1
			53	Agam (K. Lubukbasung)	1,800,687.86	414,972.00	4.34	-0.247	-0.328	1
			54	Lima Puluh Kota (K. Payakumbuh)	1,668,525.43	311,773.00	5.35	-0.122	-0.262	1
			55	Pasaman (Lubuksikaping)	813,424.97	513,674.00	1.58	-0.349	-0.323	1
			56	Solok Selatan (K. Padang Aro)	380,146.40	57,097.39	6.66	0.085	-0.142	1
			57	Dharmas Raya (K. Pulau Punjung)	666,410.85	70,285.22	9.48	0.665	0.224	1
			58	Pasaman Barat (K. Simpang Empat)	1,499,901.59	139,373.48	10.76	0.976	0.427	1
	Kota	59	Padang	7,065,516.84	713,242.00	9.91	0.765	0.289	1	
		60	Solok	311,055.34	48,120.00	6.46	0.051	-0.162	1	

Lampiran 3: Hasil Perhitungan Indeks entropi Theil Tahun 2000

No	Propinsi	Kabupaten/Kota		PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (Yj)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung	
				(1)	(2)					
		61	Sawah Lunto	438.290.11	50.868.00	8.62	0.470	0.099	1	
		62	Padang Panjang	245.888.38	40.139.00	6.13	-0.005	-0.195	1	
		63	Bukit Tinggi	590.581.31	91.983.00	6.42	0.044	-0.166	1	
		64	Payakumbuh	504.499.12	97.901.00	5.15	-0.149	-0.277	1	
		65	Panaman	444.014.23	33.134.78	13.40	1.693	0.905	1	
				1,222,171.34	239,026.10	6.16	0.117		0	
				23,221,255.53	4,541,495.87				0	
4	Sumatera Selatan	Kabupaten	66	OKU (K. Baturaja)	1,357.841.00	1,159.667.00	1.17	-0.335	-0.283	1
			67	OKI (K. Kayuagung)	1,980.575.00	976.178.00	2.03	-0.367	-0.349	1
			68	Muara Enim (K. Muara Enim)	3,234.809.00	717.741.00	4.51	-0.127	-0.319	1
			69	Lahat (K. Lahat)	1,989.438.00	670.128.00	2.97	-0.321	-0.368	1
			70	Musi Rawas (K. Lubuk Linggau)	1,373.520.00	641.836.00	2.14	-0.366	-0.354	1
			71	Muba (K. Sekayu)	2,504.138.00	1,240.407.00	2.02	-0.367	-0.349	1
			72	Banyuasin (K. Pangkalan Balai)	2,281.153.09	296.125.22	7.70	0.575	-0.021	1
			73	OKUS (K. Muaradua)	774.225.00	143.067.39	5.41	0.038	-0.258	1
			74	OKUT (K. Martapura)	1,388.689.00	244.430.00	5.68	0.092	-0.235	1
			75	Ogan Ilir (K. Indralaya)	1,109.682.00	155.210.00	7.15	0.431	-0.087	1
		Kota	76	Palembang	8,041.520.00	1,451.419.00	5.54	0.063	-0.247	1
			77	Prabumulih	584.323.00	58.787.83	9.94	1.227	0.294	1
			78	Pagar Alam	426.455.00	50.986.09	8.36	0.756	0.064	1
			79	Lubuk Linggau	646.134.00	76.535.65	8.44	0.778	0.075	1
				1,978,035.86	563,037.01	5.22	0.148		0	
				27,692,502.09	7,882,518.17				0	
5	Riau	Kabupaten	80	Kuansing (K. Teluk Kuantan)	1,479.177.19	216.732.00	6.82	0.075	-0.124	1
			81	Indragiri Hulu (K. Rengat)	1,985.669.68	247.306.00	8.03	0.293	0.020	1
			82	Indragiri Hilir (K. Tembilahan)	3,274.494.71	555.701.00	5.89	-0.072	-0.217	1
			83	Pelalawan (K. Pangkalan Kincir)	1,586.244.28	152.949.00	10.37	0.795	0.363	1
			84	Siak (Siak Seindrapura)	1,887.883.77	238.786.00	7.91	0.269	0.004	1
			85	Kampar (K. Bangkinan)	2,295.057.50	447.157.00	5.13	-0.174	-0.279	1
			86	Rokan Hulu (K. Pasir Pengarai)	1,169.726.26	265.686.00	4.40	-0.255	-0.325	1
			87	Bengkalis (K. Bengkalis)	2,337.937.81	520.241.00	4.49	-0.246	-0.320	1
			88	Rokan Hilir (K. Ujung Tanjung)	1,970.734.87	352.299.00	5.59	-0.114	-0.243	1

Lampiran 3: Hasil Perhitungan Indeks entropi Theil Tahun 2000

No	Propinsi	Kabupaten/Kota			PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (Y)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung
					(1)	(2)				
		Kota	89	Pekan Baru	3,461,454.85	585,440.00	5.91	-0.069	-0.215	1
			90	Dumai	947,166.36	173,188.00	5.47	-0.131	-0.253	1
					2,035,958.84	341,407.73	6.37	0.034		0
					22,395,547.27	3,755,485.00				0
6	Kepulauan Riau	Kabupaten	91	Kepri (K. Tanjungpinang)	1,200,170.80	319,482.00	3.76	-0.356	-0.353	1
			92	Karimun (K. Tanjung B. Karimun)	1,133,878.52	164,770.00	6.88	-0.343	-0.118	1
			93	Natuna (K. Ranai)	431,507.15	78,081.00	5.53	-0.366	-0.248	1
			94	Lingga (K. Daik Lingga)	324,713.73	33,512.17	9.69	-0.237	0.256	1
		Kota	95	Batam	15,994,099.35	437,358.00	36.57	2.711	7.135	1
			96	Tanjung Pinang	1,287,526.28	69,964.35	18.40	0.426	1.985	1
					3,395,315.94	183,861.25	13.47	0.306		0
					20,371,895.63	1,103,167.52				0
7	Bangka Belitung	Kabupaten	97	Bangka (K. Sungailiat)	916,537.89	101,024.35	9.07	-0.260	0.164	1
			98	Belitung (K. Tanjungpandan)	704,519.23	59,326.52	11.88	-0.099	0.620	1
			99	Bangka Barat (K. Mentok)	1,471,489.02	61,023.91	24.11	1.087	3.429	1
			100	Bangka Tengah (K. Koba)	768,135.94	56,527.39	13.59	0.025	0.942	1
			101	Bangka Selatan (K. Tobali)	699,027.58	64,857.83	10.78	-0.169	0.430	1
			102	Belitung Timur (K. Manggar)	482,390.43	38,236.52	12.62	-0.048	0.756	1
		Kota	103	Pangkal Pinang	666,967.30	61,723.04	10.81	-0.167	0.435	1
					815,578.20	63,245.65	13.26	0.053		0
					5,709,047.38	442,719.57				0
8	Bengkulu	Kabupaten	104	Bengkulu Selatan (K. Manna)	718,017.00	370,678.00	1.94	-0.304	-0.345	1
			105	Rejang Lebong *) (K. Curup)	1,848,619.00	442,395.00	4.18	0.348	-0.336	1
			106	Bengkulu Utara (K. Argamakmur)	1,068,152.00	469,259.00	2.28	-0.243	-0.359	1
			107	Kaur (K. Bintuhan)	87,447.96	0.00	#DIV/0!			0
			108	Seluma (K. Tais)	138,331.39	0.00	#DIV/0!			0
			109	Muko-muko (K. Muko-Muko)	132,386.85	0.00	#DIV/0!			0
			110	Lebong *) (K. Tubei)	166,646.84	0.00	#DIV/0!			0
			111	Kepahiang *) (K. Kapahiang)	217,908.12	0.00	#DIV/0!			0
		Kota	112	Bengkulu	1,234,825.00	279,753.00	4.41	0.443	-0.324	1
					1,217,403.25	390,521.25	3.20	0.061		0
					5,612,334.16	1,562,085.00				0

Lampiran 3: Hasil Perhitungan Indeks entropi Theil Tahun 2000

No	Propinsi	Kabupaten/Kota			PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (Y)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung
					(1)	(2)				
9	Jambi	Kabupaten	113	Kerinci (K. Sungaipenuh)	1,000.541.55	295.040.00	3.39	-0.002	-0.363	1
			114	Merangin (K. Bangko)	690.389.00	254.203.00	2.72	-0.179	-0.367	1
			115	Sarolangun (K. Sarolangun)	585.774.21	178.097.00	3.29	-0.032	-0.365	1
			116	Batanghari (K. Muara Bulian)	637.928.27	190.636.00	3.35	-0.015	-0.364	1
			117	Muaro Jambi (K. Sengit)	573.461.68	233.993.00	2.45	-0.236	-0.363	1
			118	Tanjung Jabung Timur (K. Muara Sabak)	667.996.84	191.556.00	3.49	0.026	-0.361	1
			119	Tanjung Jabung Barat (K. Kuala Tungkal)	1.115.906.08	206.730.00	5.40	0.735	-0.259	1
			120	Tebo (K. Muara Tebo)	533.591.43	222.232.00	2.40	-0.245	-0.362	1
			121	Bungo (K. Muara Bungo)	684.065.19	217.172.00	3.15	-0.070	-0.367	1
		Kota	122	Jambi	1.818.267.84	417.507.00	4.36	0.318	-0.328	1
					830,792.21	240,716.60	3.40	0.030		0
					8,307,922.09	2,407,166.00				0
10	Lampung	Kabupaten	123	Lampung Barat (K. Liwa)	1,124.367.25	366.484.00	3.07	-0.141	-0.367	1
			124	Tanggaman (K. Kotaagung)	1.996.802.00	800.211.00	2.50	-0.257	-0.364	1
			125	Lampung Selatan (K. Kalianda)	3.502.468.58	1,133.124.00	3.09	-0.136	-0.367	1
			126	Lampung Timur (K. Sukadana)	2,417.003.54	869.428.00	2.78	-0.203	-0.368	1
			127	Lampung Tengah (K. Gunung Sugih)	3.596.414.00	1,046.167.00	3.44	-0.050	-0.362	1
			128	Lampung Utara (K. Kotabumi)	2,093.721.00	530.941.00	3.94	0.092	-0.346	1
			129	Way Kanan (K. Blambangan Umpu)	2,947.247.00	349,807.00	8.43	1.962	0.073	1
			130	Tulang Bawang (K. Menggala)	863.575.00	691.822.00	1.25	-0.367	-0.292	1
		Kota	131	Bandar Lampung	3,711.760.00	742,749.00	5.00	0.444	-0.288	1
			132	Metro	325.158.00	118,448.00	2.75	-0.210	-0.367	1
					2,257,851.64	664,918.10	3.62	0.113		
					22,578,516.37	6,649,181.00				
					223,800,101.13	42,864,244.59	7.87		0.642	127
					22,380,010.11	4,286,424.46				

Lampiran 4: Hasil Perhitungan Indeks entropi Theil Tahun 2004

No	Propinsi	Kabupaten/Kota		PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (Yj)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung	
				(1)	(2)					
1	DI Aceh	Kabupaten	1	Simaule (K. Sinabang)	183.683.33	69.031	2.661	-0.357	-0.362	1
			2	Aceh Singkil (K. Singkil)	473.296.32	137.236	3.449	-0.308	-0.323	1
			3	Aceh Selatan (K. Tapak Tuan)	1.016.790.52	183.785	5.533	-0.040	-0.090	1
			4	Aceh Tenggara (K. Kutacane)	374.787.29	162.784	2.302	-0.367	-0.368	1
			5	Aceh Timur (K. Langsa)	1.877.644.39	298.218	6.296	0.095	0.031	1
			6	Aceh Tengah (K. Takengon)	788.172.65	153.007	5.151	-0.101	-0.144	1
			7	Aceh Barat (K. Meulaboh)	819.413.79	157.452	5.204	-0.093	-0.136	1
			8	Aceh Besar (K. Jantho)	1.568.244.73	297.792	5.266	-0.083	-0.128	1
			9	Pidie (K. Singli)	1.780.320.32	458.675	3.881	-0.267	-0.288	1
			10	Bireun (K. Bireun)	2.112.928.25	341.373	6.190	0.075	0.014	1
			11	Aceh Utara (K. Lhosukon)	2,867,821.60	444.861	6.447	0.124	0.057	1
			12	Aceh Barat Daya (K. Blangpidie)	778.845.89	109.201	7.132	0.262	0.181	1
			13	Gayo Lues (K. Blang Kajejen)	335.337.17	68.010	4.931	-0.134	-0.173	1
			14	Aceh Tamiang (K. Kualasimpang)	1,185,825.67	224.938	5.272	-0.083	-0.127	1
			15	Nagan Raya (K. Jeuram)	496.711.16	109.232	4.547	-0.188	-0.220	1
			16	Aceh Jaya (K. Calang)	324.658.22	69.413	4.677	-0.170	-0.204	1
			17	Bener Meriah (K. Simpang Tiga Redelong)	540.275.84	92.875	5.817	0.008	-0.046	1
		Kota	18	Banda Aceh	1.406.307.33	230.774	6.094	0.058	-0.002	1
			19	Sabang	259.966.64	26.528	9.800	0.900	0.759	1
			20	Langsa	1.127.576.64	125.326	8.997	0.693	0.571	1
			21	Lhoksumawe	1,599,685.56	138.779	11.527	1.382	1.199	1
					1,043,728.25	185,680.48	5.770	0.067		0
					21,918,293.30	3,899,290.00				0
2	Sumatera Utara	Kabupaten	22	Nias (K. Gunung Sitoli)	1.610.722.31	433.688	3.714	-0.281	-0.302	1
			23	Mandailing (K. Penyabungan)	1.409.579.52	385.611	3.655	-0.286	-0.307	1
			24	Tapanuli Selatan (K. Padang Sidempuan)	2.500.236.83	619.223	4.038	-0.246	-0.274	1
			25	Tapanuli Tengah (K. Sibolga)	849.061.22	286.659	2.962	-0.341	-0.351	1
			26	Tapanuli Utara (K. Tarutung)	1.160.282.30	267.411	4.339	-0.210	-0.243	1
			27	Toba Samosir (K. Balige)	1.285.571.31	173.661	7.403	0.332	0.233	1

Lampiran 4: Hasil Perhitungan Indeks entropi Theil Tahun 2004

No	Propinsi	Kabupaten/Kota		PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (YJ)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung	
				(1)	(2)					
			28	Labuhan Batu (K. Rantau Prapat)	6,712,587.75	955,713	7,024	0.251	0.161	1
			29	Asahan (K. Kisaran)	9,484,024.52	1,028,472	9,221	0.768	0.622	1
			30	Simalungun (Pematang Siantar)	4,244,811.18	830,745	5,110	-0.101	-0.149	
			31	Dairi (K. Sidikalang)	1,489,866.75	246,873	6,035	0.056	-0.012	1
			32	Karo (K. Kabanjahe)	2,357,093.33	324,001	7,275	0.305	0.208	1
			33	Deli Serdang (K. Lubukpakam)	10,345,046.20	1,416,168	7,305	0.311	0.214	1
			34	Langkat (K. Stabat)	4,989,366.80	971,282	5,137	-0.097	-0.146	1
			35	Nias Selatan (K. Teluk Dalam)	1,032,980.57	276,463	3,736	-0.278	-0.301	1
			36	Humbang Hasundutan (K. Dolog Sanggul)	715,993.96	162,111	4,417	-0.200	-0.234	1
			37	Pakpak Barat (K. Salak)	119,721.37	35,584	3,364	-0.312	-0.328	1
			38	Samosir (K. Pengururan)	823,407.76	125,145	6,580	0.160	0.080	1
			39	Serdang Begadai (K. Sei Rempah)	3,124,767.44	656,836	4,757	-0.154	-0.195	1
		Kota	40	Sibolga	539,968.80	89,627	6,025	0.054	-0.013	1
			41	Tanjung Balai	1,097,489.12	149,145	7,359	0.323	0.225	1
			42	Pematang Siantar	1,561,947.58	229,011	6,820	0.209	0.123	1
			43	Tebing Tinggi	839,631.12	138,377	6,068	0.062	-0.006	1
			44	Medan	23,600,002.95	2,122,579	11,119	1.289	1.091	1
			45	Binjai	1,360,506.32	227,478	5,981	0.046	-0.021	1
			46	Padang Sidempuan	669,503.30	182,111	3,676	-0.284	-0.306	1
		Rata-Rata			3,356,966.81	493,358.96	5.725	0.055		0
					83,924,170.31	12,333,974.00				0
3	Sumatera Barat	Kabupaten	47	Kepulauan Mentawai (K. Tua Pejat)	414,890.96	66,076	6,279	0.059	0.028	1
			48	Pesisir Selatan (K. Painan)	1,546,853.85	411,249	3,761	-0.289	-0.299	1
			49	Solok (K. Solok)	1,518,886.03	341,702	4,445	-0.217	-0.231	1
			50	Sawah Lunto - Sijunjung (K. Muaro Sijunjung)	971,540.46	181,047	5,366	-0.091	-0.114	1
			51	Tanah Datar (K. Batu Sangkar)	1,863,489.97	341,863	5,451	-0.078	-0.101	1
			52	Padang Pariaman (K. Pariaman)	1,794,952.82	380,683	4,715	-0.183	-0.200	1
			53	Agam (K. Lubukbasung)	2,190,890.17	437,831	5,004	-0.144	-0.163	1
			54	Lima Puluh Kota (K. Payakumbuh)	2,009,422.02	329,337	6,101	0.028	-0.001	1

Lampiran 4: Hasil Perhitungan Indeks entropi Theil Tahun 2004

No	Propinsi	Kabupaten/Kota		PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (Yj)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung	
				(1)	(2)					
			55	Pasaman (Lubuksikaping)	968,005.45	242,789	3.987	-0.267	-0.278	1
			56	Solok Selatan (K. Padang Aro)	460,185.49	131,324	3.504	-0.311	-0.319	1
			57	Dharmas Raya (K. Pulau Punjung)	799,311.30	161,656	4.945	-0.152	-0.171	1
			58	Pasaman Barat (K. Simpang Empat)	1,857,612.80	320,559	5.795	-0.023	-0.050	1
		Kota	59	Padang	8,653,178.04	774,748	11.169	1.189	1.104	1
			60	Solok	372,384.81	52,776	7.056	0.205	0.167	1
			61	Sawah Lunto	436,708.12	53,215	8.206	0.448	0.397	1
			62	Padang Panjang	294,282.03	43,127	6.824	0.160	0.124	1
			63	Bukit Tinggi	719,853.35	98,186	7.332	0.261	0.219	1
			64	Payakumbuh	609,222.96	105,005	5.802	-0.022	-0.049	1
			65	Pariaman	536,603.87	76,210	7.041	0.203	0.164	1
					1,474,646.03	239,441.21	5.936	0.041		0
					28,018,274.50	4,549,383.00				0
4	Sumatera Selatan	Kabupaten	66	OKU (K. Baturaja)	1,602,944.00	262,097	6.116	0.335	0.001	1
			67	OKI (K. Kayuagung)	2,384,139.00	656,828	3.630	-0.202	-0.309	1
			68	Muara Enim (K. Muara Enim)	3,798,041.00	641,204	5.923	0.284	-0.030	1
			69	Lahat (K. Lahat)	2,350,352.00	570,557	4.119	-0.119	-0.266	1
			70	Musi Rawas (K. Lubuk Linggau)	1,678,737.00	477,598	3.515	-0.220	-0.318	1
			71	Muba (K. Sekayu)	3,174,910.00	474,212	6.695	0.494	0.101	1
			72	Banyuasin (K. Pangkalan Balai)	3,602,704.83	681,088	5.290	0.127	-0.125	1
			73	OKUS (K. Muaradua)	904,980.00	329,055	2.750	-0.315	-0.359	1
			74	OKUT (K. Martapura)	1,678,262.00	562,189	2.985	-0.290	-0.350	1
			75	Ogan Ilir (K. Indralaya)	1,348,667.00	356,983	3.778	-0.179	-0.297	1
		Kota	76	Palembang	10,143,275.00	1,357,866	7.470	0.725	0.246	1
			77	Prabumulih	711,084.00	135,212	5.259	0.120	-0.129	1
			78	Pagar Alam	478,991.00	117,268	4.085	-0.126	-0.269	1
			79	Lubuk Linggau	794,404.00	176,032	4.513	-0.044	-0.224	1
					2,475,106.49	485,584.93	4.723	0.042		0
					34,651,490.83	6,798,189.00				0

Lampiran 4: Hasil Perhitungan Indeks entropi Theil Tahun 2004

No	Propinsi	Kabupaten/Kota		PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (Yj)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung	
				(1)	(2)					
5	Riau	Kabupaten	80	Kuansing (K. Teluk Kuantan)	1,944,515.67	243.772	7.977	0.172	0.349	1
			81	Indragiri Hulu (K. Rengat)	2,640,418.96	295.998	8.920	0.338	0.553	1
			82	Indragiri Hilir (K. Tembilahan)	4,335,963.68	624.359	6.945	0.010	0.146	1
			83	Pelalawan (K. Pangkalan Kincir)	2,050,712.95	220.836	9.286	0.406	0.637	1
			84	Siak (Siak Seindrapura)	2,478,750.37	292.144	8.485	0.260	0.457	1
			85	Kampar (K. Bangkinan)	3,022,420.46	532.236	5.679	-0.158	-0.068	1
			86	Rokan Hulu (K. Pasir Pengaraian)	1,535,724.27	340.701	4.508	-0.277	-0.224	1
			87	Bengkalis (K. Bengkalis)	3,126,467.10	637.163	4.907	-0.241	-0.176	1
			88	Rokan Hilir (K. Ujung Tanjung)	2,625,138.50	440.904	5.954	-0.125	-0.025	1
		Kota	89	Pekan Baru	4,970,924.32	702.717	7.074	0.029	0.170	1
			90	Dumai	1,271,000.33	215.761	5.891	-0.132	-0.035	1
				2,727,457.87	413,326.45	6.875	0.026		0	
				30,002,036.62	4,546,591.00				0	
6	Kepulauan Riau	Kabupaten	91	Kepri (K. Tanjungpinang)	1,428,306.74	113.267	12.610	-0.045	1.497	1
			92	Karimun (K. Tanjung B. Karimun)	1,432,777.90	187.457	7.643	-0.317	0.281	1
			93	Natuna (K. Ranai)	550,360.81	87.354	6.300	-0.353	0.032	1
			94	Lingga (K. Daik Lingga)	411,388.65	77.078	5.337	-0.366	-0.118	1
		Kota	95	Batam	21,164,391.79	572.452	36.971	2.876	10.900	1
			96	Tanjung Pinang	1,683,899.07	160.918	10.464	-0.185	0.923	1
				4,445,187.49	199,754.33	13.221	0.268		0	
				26,671,124.96	1,198,526.00				0	
7	Bangka Belitung	Kabupaten	97	Bangka (K. Sungailiat)	1,182,197.12	232.356	5.088	-0.260	-0.152	1
			98	Belitung (K. Tanjungpandan)	859,329.69	136.451	6.298	-0.141	0.032	1
			99	Bangka Barat (K. Mentok)	1,712,229.99	140.355	12.199	0.811	1.382	1
			100	Bangka Tengah (K. Koba)	928,236.22	130.013	7.140	-0.039	0.183	1
			101	Bangka Selatan (K. Toboali)	842,801.37	149.173	5.650	-0.209	-0.072	1
			102	Belitung Timur (K. Manggar)	855,508.88	87.944	9.728	0.351	0.741	1
		Kota	103	Pangkal Pinang	847,519.96	141.963	5.970	-0.177	-0.022	1
				1,032,546.17	145,465.00	7.439	0.048		0	

No	Propinsi	Kabupaten/Kota			PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (Yj)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung
					(1)	(2)				
					7,227,823.22	1,018,255.00				0
8	Bengkulu	Kabupaten	104	Bengkulu Selatan (K. Manna)	422,647.35	136,398	3.099	-0.152	-0.344	1
			105	Rejang Lebong *) (K. Curup)	999,195.93	248,000	4.029	0.088	-0.274	1
			106	Bengkulu Utara (K. Argamakmur)	860,109.94	345,455	2.490	-0.268	-0.366	1
			107	Kaur (K. Bintuhan)	191,831.50	103,834	1.847	-0.347	-0.362	1
			108	Seluma (K. Tais)	355,922.00	164,252	2.167	-0.315	-0.368	1
			109	Muko-muko (K. Muko-Muko)	417,269.75	133,768	3.119	-0.147	-0.343	1
			110	Lebong *) (K. Tuber)	579,420.70	91,725	6.317	0.902	0.035	1
			111	Kapahiang *) (K. Kapahiang)	570,842.90	119,940	4.759	0.317	-0.194	1
		Kota	112	Bengkulu	1,499,177.00	266,898	5.617	0.624	-0.077	1
					945,282.55	249,187.75	3.716	0.006		0
					5,896,417.07	1,610,270.00				0
9	Jambi	Kabupaten	113	Kerinci (K. Sungaipenuh)	1,189,989.82	305,632	3.894	0.064	-0.287	1
			114	Merangin (K. Bangko)	809,361.09	275,096	2.942	-0.176	-0.352	1
			115	Sarolangun (K. Sarolangun)	716,339.58	202,684	3.534	-0.035	-0.317	1
			116	Batanghari (K. Muara Bulian)	797,491.98	217,858	3.661	-0.001	-0.307	1
			117	Muaro Jambi (K. Sengiti)	669,949.16	294,408	2.276	-0.296	-0.368	1
			118	Tanjung Jabung Timur (K. Muara Sabak)	809,533.91	204,142	3.966	0.085	-0.280	1
			119	Tanjung Jabung Barat (K. Kuala Tungkal)	1,356,846.32	232,847	5.827	0.737	-0.045	1
			120	Tebo (K. Muara Tebo)	632,347.43	236,344	2.676	-0.230	-0.362	1
			121	Bungo (K. Muara Bungo)	814,044.04	240,637	3.383	-0.074	-0.327	1
		Kota	122	Jambi	2,196,912.20	489,289	4.490	0.249	-0.226	1
					999,281.55	269,893.70	3.665	0.032		0
					9,992,815.53	2,698,937.00				0
10	Lampung	Kabupaten	123	Lampung Barat (K. Liwa)	1,302,388.53	397,877	3.273	-0.165	-0.334	1
			124	Tanggamus (K. Kotaagung)	2,358,636.00	834,110	2.828	-0.246	-0.357	1
			125	Lampung Selatan (K. Kalianda)	4,078,426.53	1,226,009	3.327	-0.154	-0.331	1
			126	Lampung Timur (K. Sukadana)	2,833,716.00	927,642	3.055	-0.206	-0.347	1
			127	Lampung Tengah (K. Gunung Sugih)	4,521,693.00	1,105,630	4.090	0.022	-0.269	1

Lampiran 4: Hasil Perhitungan Indeks entropi Theil Tahun 2004

No	Propinsi	Kabupaten/Kota		PDRB TAHUN 2000 (JUTA)	JML PDDK TAHUN 2000	PDRB/Kapita (Y)	Theil Antar Kabupaten per Propinsi	Theil Antar Kabupaten per Sumatera	Kode Daerah Dihitung
				(1)	(2)				
		128	Lampung Utara (K. Kotabumi)	2.572.456.00	573.253	4.487	0.128	-0.226	1
		129	Way Kanan (K. Blambangan Umpu)	3.425.542.00	375.806	9.115	1.873	0.598	1
		130	Tulang Bawang (K. Menggala)	1.039.361.00	758.395	1.370	-0.367	-0.335	1
	Kota	131	Bandar Lampung	4.592.918.60	830.386	5.531	0.446	-0.090	1
		132	Metro	392.766.00	132.563	2.963	-0.223	-0.351	1
				2.711.790.37	716.167.10	4.004	0.111		
				27.117.903.66	7.161.671.00				
				275.420.349.98	45.815.086.00	6.107		0.061	132
				27.542.035.00	4.581.508.60				



IDENTITAS DIRI PENELITIAN

I. Ketua Peneliti

Nama Lengkap : **Ake Wihadanto**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Maret 1974
 Status Perkawinan : Kawin
 Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Universitas
 Terbuka
 Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe,
 Pamulang, Ciputat 15414,
 Tangerang atau PO BOX 6666 ,
 Jakarta 10001 Indonesia
 62-21-7490941 hunting ext 2109
 Alamat Rumah : Perumahan Vila Inti Persada, Blok
 D1 No. 19
 Jl. Raya Ciputat – Sawangan, Desa
 Pamulangan Timur – Kecamatan
 Pamulang 15417
 Email : ake@mail.ut.ac.id
 a_wihadanto@yahoo.com
 ake.wihadanto@gmail.com
 Pekerjaan : Dosen pada Fakultas Ekonomi
 Universitas Terbuka
 Pendidikan : **S-1 1998**
 Lulus S1, Program Studi Ilmu
 Ekonomi dan Studi Pembangunan,
 Fakultas Ekonomi, Universitas
 Pasundan Bandung.
S-2 2005
 Lulus S2, Program Magister
 Perencanaan Wilayah dan Kota,
 Departemen Teknik Planologi –
 Fakultas Teknik Sipil dan
 Perencanaan.
 Bidang Keahlian: Regional
 Development (Pengembangan
 Wilayah).

Penelitian :



Penelitian Bahan Ajar
 Jurusan IESP – Fakultas Ekonomi
 Universitas Terbuka

- Agustus 2006 – Desember 2006 : Penelitian **“Konsep Orde-Orde Kota Nasional”**, Bappenas dan Ditjen Cipta Karya Departemen PU.
- Maret 2006 – Desember 2006 : Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional, dengan Judul Penelitian: ***Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Penentuan Titik Akses Layanan Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka (Studi Kasus : UPBJJ Universitas Terbuka- Bandung)***
- September 2005 – Maret 2006 : Penelitian Mandiri yang di danai oleh LPPM UT, dengan Judul Penelitian: ***Studi Penyebaran Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka di UPBJJ-UT Bandung Berbasis Model Spasial GIS (Geographical Information System)***
- November 2004 – Desember 2004 : Penelitian: Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan dan Kesehatan “, Bagian Keuangan Propinsi DKI Jakarta
- Agustus 2004 – Oktober 2004 : Penelitian proyek “Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Sektor Energi dan Ketenagalistrikan di Jawa Barat”. Bidang Pekerjaan : “Penyusunan Rencana Pengembangan Panasbumi di Jawa Barat. PT. Deka Pentra Konsultan dan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat
- Februari 2004 – Agustus 2004 : Penelitian proyek, Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Industri Siap Bangun di Kabupaten Tebo – Jambi, PT. Arsita Engineering Consultant dan Bappeda Kabupaten Tebo Jambi
- November 2003 – Januari 2004 : Proyek Penelitian, “Masterplan Tata Ruang dan Tata Bangunan Di Unit Usaha Kawasan Cakung PT.



(Persero) Kawasan Berikat
Nusantara.” (SPK No. 05/PT-
PB/Dirut/IV/2003), , PT. Yodya
Karya (persero)

Publikasi Makalah/Papers/Modul :
Pelatihan

- Laporan Penelitian: “Otonomi Daerah Dalam Menggali Potensi Sumber Keuangan Daerah Sebagai Suatu Tinjauan”, disampaikan dalam pemilihan Mahasiswa Berprestasi tahun akademik 1994/1995 Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung
- Makalah: “Strategi Pengembangan Agroindustri dalam Pemberdayaan Perekonomian Daerah”. Disampaikan dalam kegiatan Temu Ilmiah Mahasiswa dan Sarasehan Nasional IESP, tema kegiatan “Penerapan Otonomi Daerah Menyongsong Era Pasar Bebas”, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (HIMA-IESP) Universitas Jember (Unej), Jember 28 November - 1 Desember 1996
- Laporan Penelitian : Analisis Korelasi Antara Profitabilitas Industri Pengolahan (Manufaktur) Non Migas dengan Tingkat Konsentrasi di Indonesia Tahun 1995, Skripsi Strata 1 (S-1) Jur. IESP FE-UNPAS tahun 1998
- Paper Ilmiah Kelompok “Pengelolaan Sungai Lintas Batas Sebagai Pengendali Banjir Di Jakarta, Studi Kasus Proyek Cross Connection Ciliwung-Cisadane, Tugas Akhir Kuliah Kelembagaan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, November 2002
- Laporan Penelitian “ Perancangan Sistem Pengelolaan Bersama (Co-Management) Ekosistem Mangrove di Laguna Segara Anakan Kabupaten Cilacap”, Tugas Akhir Kelompok Kuliah Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Mei 2003
- Laporan Penelitian “Rencana Pengembangan Wilayah Kawasan Puncak (Bopunjur) Kabupaten Bogor dan Cianjur”, dalam rangka Tugas Akhir Studio Perencanaan Wilayah Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Juni – Agustus 2003.
- Makalah “Prespektif Pengembangan Ekonomi Daerah Di Era Otonomi Daerah: Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah Menuju Perdagangan Bebas” makalah disampaikan dalam Dialog Seputar Ekonomi 2: Reposisi Pengembangan Ekonomi Regional dalam Era Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan – Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, 29 Maret 2004
- Laporan Penelitian : Identifikasi Pemanfaatan Remitan (Remittances) Pekerja Migran dalam Pembangunan Desa Asal (Studi Kasus: Di Tiga Desa: Desa Nanggalamekar, Desa Ciranjang, Desa Gunungsari-Kecamatan Ciranjang), Tesis Strata 2 (S-2) Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Planologi-Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan -



Program Pascasarjana ITB Tahun 2005.

- Modul “Pelatihan Pengenalan Structural Equation Model (SEM) dan LISREL”, Fakultas Ekonomi UT, Tanggal 22 Desember 2005
- Makalah/Paper Diskusi “Potensi Modal Manusia Dalam Pengelolaan Bersama (Co Management) SDA Lintas Batas Wilayah. Studi Kasus: Pengelolaan Ekosistem Magrove di Laguna Segara Anakan” makalah disampaikan dalam Diskusi/Seminar Internal – Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Jakarta, 13 Juli 2006
- Modul Pelatihan: Permodelan, Pengenalan Structural Equation Model (SEM) dan Path Analysis dan Penggunaan LISREL”, diselenggarakan PSDM UT, 5 s.d 7 September 2006
- Makalah/Paper Diskusi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Di Perguruan Tinggi Jarak Jauh: Sharing Pengalaman Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Merefleksikan Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 1 Desember 2006

Seminar dan Pelatihan :

- Seminar Community Empowerment for Poverty Alleviation : A Challenge in Rural and Urban Development, Bandung, 21 September 2002, diselenggarakan oleh Sub Regional Office of The Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP-SOCSEA) dan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota-ITB.
- Pelatihan Peneliti Mula, diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Terbuka, Pondok Cabe 22 – 23 Maret 2005
- Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, diselenggarakan oleh Unit Pengembangan SDM – Universitas Terbuka, Pondok Cabe, 7-9 Desember 2005
- Pelatihan Penulisan Proposal Untuk Kompetisi Hibah Bersaing, diselenggarakan oleh Unit Pengembangan SDM – Universitas Terbuka, Pondok Cabe 12 -16 Desember 2005.
- Pelatihan Penulisan Naskah Pembelajaran Web Based UT, diselenggarakan oleh Unit Pengembangan SDM – Universitas Terbuka, Pondok Cabe , November 2005
- Seminar Forum Geoinformasi, Pemetaan dan Riset Geomatika 2005; “Invetasi Berkualitas dengan Data dan Riset Spasial Berkualitas”, diselenggarakan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Hotel Nikko Jakarta, 7 Desember 2005
- Traning/Workshop On Video Script-Writing For Instruction, SEAMOLEC 4 – 6 January 2006

Partisipasi :

Diskusi/Seminar/Konferensi

- Pembicara dalam Seminar: Temu Ilmiah Mahasiswa dan Sarasehan Nasional IESP, tema kegiatan “Penerapan Otonomi Daerah Menyongsong Era Pasar Bebas”, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (HIMA-IESP) Universitas Jember (Unej), Jember 28 November - 1 Desember 1996



- Pembicara dalam Diskusi: Dialog Seputar Ekonomi 2: Reposisi Pengembangan Ekonomi Regional dalam Era Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan – Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, 29 Maret 2004
- Trainner: “Pelatihan Pengenalan Structural Equation Model (SEM) dan LISREL”, diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, 22 Desember 2005
- Trainner: “Pelatihan Structural Equation Model (SEM) dan LISREL”, diselenggarakan PSDM Universitas Terbuka, 5 s.d 7 September 2006
- Pembicara dalam Konferensi: Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Di Perguruan Tinggi Jarak Jauh: Sharing Pengalaman Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Merefleksikan Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 1 Desember 2006

Minat Bidang Kajian [Area of Expertise]	1. Ekonomi Industri
	2. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (Regional Planning)
	3. Migrasi (Migration) dan Remittances
	4. Pembiayaan Pembangunan
	5. Pemodelan Wilayah
Spesialisasi Bidang Pengajaran	1. Teori Ekonomi Mikro
	2. Teori Ekonomi Makro
	3. Ekonomi Regional
	4. Ekonomi Perkotaan dan Transportasi
	5. Metode Penelitian
	6. Metode Penelitian Bisnis



II. Anggota Peneliti

Nama Lengkap	:	Adrian Sutawijaya
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jentian, 03 Mei 1977
Status Perkawinan	:	Kawin
Alamat Kantor	:	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Ciputat 15414, Tangerang atau PO BOX 6666 . Jakarta 10001 Indonesia 62-21-7490941 hunting ext 2104 Email: adrian@mail.ut.ac.id
Alamat Rumah	:	Jl. Pramuka Sari I/10 Rt.10 Rw.08 Jakpus
Pekerjaan	:	Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka
Pendidikan	:	▪ S-1 2000 Lulus S1, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang. ▪ S-2 2002 Lulus S2, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
Penelitian	:	2006 Penelitian Mandiri yang di danai oleh LPPM UT.: "Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA"
Publikasi	:	1. Jurnal Ekonomi Pembangunan UII Yogyakarta (Terakreditasi Nasional SK Nomor: 52/DIKTI/Kep/2002) No.1//09/Juni 2004 dengan judul " <i>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tanah Sebagai Dasar Penilaian NJOP PBB di Kota Semarang</i> " 2. Jurnal Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta (Terakreditasi Nasional SK Nomor:



52/DIKTI/Kep/2002)
No.1/Th.XIV/28/Januari-Maret
2005 dengan judul “*Analisis
Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Investasi
Swasta*”

Minat Bidang Kajian [*Area of Expertise*] : • Ekonomi Pembangunan
• Perencanaan Pembangunan
• Pembangunan Ekonomi Daerah

Partisipasi :
Diskusi/Seminar/Konferensi

1. Peserta seminar “Pengaruh Volatilitas Nilai Tukar Rupiah Terhadap Permintaan Uang M2 Indonesia 1997.1-2002.4 Estimasi Data Non Stasioner”.
2. Pembicara dalam Konferensi: Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Di Perguruan Tinggi Jarak Jauh: Sharing Pengalaman Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Merefleksikan Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 1 Desember 2006
3. Peserta seminar “Segmentasi Pasar LA Lights”.
4. Peserta seminar “Efektivitas Pelaksanaan Strategi Pemasaran Pada PT. Orindo Alam Ayu”.
5. Peserta seminar “Kebijakan Keputusan Nama Merek Pada PT. Jaguar Garment dan Laundry Industries di Jakarta”
6. Peserta seminar “Kebijakan PT. Sayap Mas Utama dalam membangun Merek Deterjen Soklin”



7. Peserta seminar “Kekuasaan dalam Organisasi”
8. Peserta seminar “Meramal Perang AFI dengan Indonesian Idol
9. Peserta seminar “Evaluasi Bahan Ajar Matakuliah Ekonomi Moneter I (ESPA 4217)
10. Peserta seminar “Kepemimpinan”
11. Peserta seminar “Perbandingan Tingkat Kesukaran Soal UAS EKMA 4115 Antara Kisi-kisi Standar dan Hasil Analisis Butir Soal”
12. Peserta seminar “Menghadapi berbagai kontroversi Teori Manajemen Bagaimana Sikap Kita”
13. Peserta seminar “Mengetahui Kepuasan Mahasiswa Program Studi D2 Penyelia Industri dan Jasa terhadap Pelayanan UT”
14. Peserta seminar “Faktor-faktor Kualitas Jasa Pelayanan yang Mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa Universitas Terbuka”
15. Peserta seminar “Pengaruh Program Promosi Gratis Biaya Pendaftaran terhadap Keputusan Berlangganan Indosatnet Dial Up di PT. Indosat Mega Media (IndosatM2) Bandung”
16. Peserta seminar “Evaluasi Peranan dan Fungsi Satuan Pengawas Intern Studi Kasus pada PT. Arun Gas Natural Liquefaction Lhokseumawe Aceh Utara”
17. Peserta seminar “Sistem Akuntansi Manajemen dalam Era Kompetisi dan Informasi”
18. Peserta Seminar ISEI



- “Pembangunan Infrastruktur Melalui Moratorium Hutang”
19. Peserta seminar “Pendidikan Jarak jauh sebagai alternatif Solutif Pengembangan Perilaku Efisien dalam Krisis Multidimensi”.
 20. Peserta seminar “Analisis performance dan Kinerja” PT. Aneka Tambang
 21. Peserta seminar “Analisis Kepuasan Mahasiswa terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Universitas Kristen Krida Wacana”
 22. Peserta seminar “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta Periode 1994-2003 secara triwulan